



PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



**Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik
dan Persandian**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 telah dapat di selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud merupakan salah satu upaya menuju Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP) yang lebih baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk pelaporan kinerja di tahun terakhir pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.

Di sadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya, baik dalam penyajian data maupun dalam penulisan, kami perlu juga masukan dan saran untuk evaluasi kinerja maupun perbaikan di masa akan datang.

Di samping pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 ini merupakan satu kebutuhan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dilaksanakan guna penyempurnaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan suatu pemenuhan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama pimpinan beserta staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya untuk melakukan peningkatan Kinerja.

KEPALA DINAS
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Barito Selatan



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 5 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja..... | 5 |
| 1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. 6 | |
| 1.4.1 Kedudukan Dan Susunan Organisasi..... | 8 |
| 1.4.2 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah : | 19 |
| 1.4.3 Penelaahan Usulan Program: | 19 |
| 1.4.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah..... | 19 |
| 1.5. Isu - isu Strategis | 20 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA..... | 24 |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029..... | 24 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran..... | 25 |
| 2.3 Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis..... | 26 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja..... | 28 |
| 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025..... | 31 |
| 2.6 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis..... | 35 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 37 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 37 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025..... | 37 |
| 3.2 Akuntabilitas Keuangan | 191 |
| BAB IV PENUTUP | 195 |
| A. Kesimpulan..... | 195 |
| B. Saran..... | 195 |
| LAMPIRAN | 197 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2025 dalam Laporan Kinerja yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;;
3. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja

ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya, dan
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

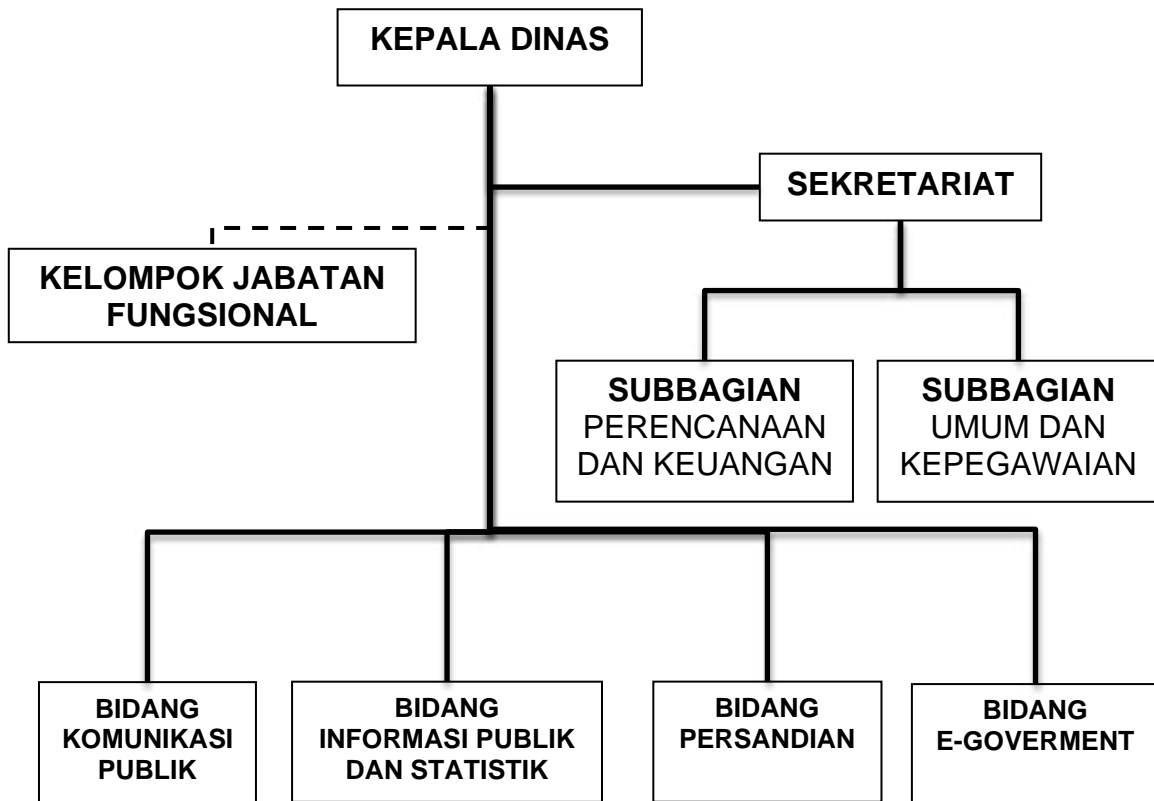
1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Sebagai perangkat daerah yang di bentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai implementasi tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan mulai memisahkan diri dengan dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017, kurang lebih lima tahun dengan struktur yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 42 Tahun 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
(Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 42 Tahun 2022)**



KETERANGAN

- : Garis Komando
————— : Garis Koordinasi Administratif

1.4.1 Kedudukan Dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Komunikasi Publik.
- d. Bidang Informasi Publik dan Statistik
- e. Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian
- f. Bidang E-Government
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pemberdayaan informasi masyarakat;
 - b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait serta organisasi lain di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian Sub Bidang dan cabang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan menganalisa pelaksanaan pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pendapat umum daerah;
 - f. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - h. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - i. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - j. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. Pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - g. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - i. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan kinerja Dinas dan surat menyurat;
 - j. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
 - k. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI), dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, Protokol dan Ketatalaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Renja Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

- c. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. Penyelenggaraan kepastakaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, protokol dan kehumasan;
 - h. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - g. Pengelolaan keuangan;
 - h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;

- j. Pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kinerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dapat menjadi Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Bagian Ketiga

Bidang Komunikasi Publik

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik, sumber daya komunikasi publik, kemitraan komunikasi, layanan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan media publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b. Monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - e. Pengelolaan media komunikasi publik;
 - f. Layanan hubungan media;
 - g. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - h. Manajemen komunikasi krisis;
 - i. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - j. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Bidang Komunikasi Publik sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Informasi Publik dan Statistik

Pasal 10

- (1) Bidang Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah serta melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
 - e. Membangun metadata statistik sektoral;
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - g. Pengembangan infrastruktur;
 - h. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah;
 - e. Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah;
 - f. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
 - h. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
 - i. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
 - j. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan komunikasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - k. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - l. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik;
 - m. Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - n. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang e-Government

Pasal 12

- (1) Bidang e-Government mempunyai tugas dalam perencanaan, pengelolaan, Penyusunan kebijakan, prosedur pengembangan ekosistem dan tata kelola bidang e-Government.
- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - b. Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - c. Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;

- f. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - g. Pengelolaan *e-Government Chief Information (GCIO)*; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang e-Government dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Bidang e-Government sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah dengan keahlian dan keterampilan tertentu. [] [] [] []

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, promosi dan penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Dinas

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator;

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok Jabatan.
- (2) Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik

melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 19

- a. Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- b. Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- d. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

- f. Dalam hal mekanisme penugasan dan penetapan Pejabat Penilaian Kinerja bagi pejabat pelaksana dan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

1.4.2 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

Review terhadap rancangan awal RPJMD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Barito Selatan semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RPJMD dan Indikator Kinerja Kabupaten yang tercantum dalam RPJMD selaras dengan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yaitu, Indeks SPBE dan Evaluasi Sakip yang merupakan indikator utama Pemerintah Daerah

1.4.3 Penelaahan Usulan Program:

Telaahan usulan program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian dari kegiatan Kinerja bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang harus dijalankan dan dicapai dalam satu tahun berdasarkan dengan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD.

1.4.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan, secara keseluruhan jumlah Personil di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Tahun 2025 sebanyak : 47 Personil yang terdiri dari : 24 Orang ASN, PPPK 17 Orang, dan 6 orang CPNS yang terdiri dari :

Tabel 1 Data Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Barito Selatan

| Jabatan | Jumlah/Orang | Perempuan | Laki-laki |
|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Kepala Dinas | 1 | - | 1 |
| Sekretaris | 1 | 1 | - |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Kepala bidang | 4 | 2 | 2 |
| Kepala Sub Bagian | 2 | 2 | - |
| Jabatan Fungsional Tertentu | 6 | 1 | 5 |
| Jabatan Fungsional Umum | 10 | 3 | 7 |
| Jumlah | 24 | 9 | 15 |

1.5. Isu - isu Strategis

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi, yaitu :

- a) Infrastruktur dan Sarana pendukung Pelayanan Publik masih terbatas dan belum memadai
- b) Pelayanan Publik belum efisien, terintegrasi dan berbasis kebutuhan Masyarakat

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah Peningkatan Responsivitas dan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas dan responsif merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong efisiensi birokrasi daerah. Di Kabupaten Barito Selatan, pelayanan publik masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, kecepatan, dan keterbukaan informasi akibat belum optimalnya sistem, regulasi, kapasitas SDM, serta infrastruktur penunjang. Upaya transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat perlu terus dikedepankan sebagai pondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Peningkatan kualitas layanan publik juga menjadi cerminan

dari kesiapan daerah dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan digital.

1. Pelayanan Publik Belum Efisien, Terintegrasi, dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Urusan: Komunikasi dan informatika

Topik:

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Masalah:

- a. Kualitas layanan, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik masih rendah
- b. Belum adanya regulasi dan sistem pelayanan publik yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

Akar Masalah:

- a. Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, e-government, dan pelimpahan kewenangan pada kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik
 - b. Belum adanya upaya perbaikan sistemik, termasuk dalam reformulasi standar pelayanan
 - c. Kualitas, kecepatan, dan responsivitas pelayanan masih rendah
 - d. Aksesibilitas layanan masih terbatas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau rentan
 - e. Keterbukaan informasi publik belum optimal, terlihat dari skor IKIP yang masih "menuju informatif"
 - f. Belum adanya peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pelayanan berbasis digital dan respons masyarakat
 - g. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan layanan masih rendah
2. Infrastruktur dan Sarana Pendukung Pelayanan Publik Masih Terbatas dan Belum Memadai

Urusan: Komunikasi dan informatika

Topik: Indeks Pelayanan Publik

Masalah:

Infrastruktur dan Sarana Pendukung Layanan Publik Masih Terbatas dan Belum Terintegrasi Secara Optimal

Akar Masalah:

- a. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
 - b. MPP (Mall Pelayanan Publik) belum berjalan dengan efektif dan optimal
 - c. Belum tersedianya fasilitas telepon kedaruratan dan pengaduan yang responsif seperti live chat, dan call centre 24 jam
 - d. Keterbatasan sarana operasional, seperti unit siaran keliling dan fasilitas multimedia lainnya
3. Sistem Pemerintahan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal
- Urusan: Komunikasi dan Informatika
- Topik:
- 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
- Masalah:
- Layanan dan penyederhanaan birokrasi secara digital yang belum optimal
- Akar Masalah:
- a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 - b. Keterbatasan koordinasi dalam pengembangan dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan data dan sistem untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan secara real-time
4. Konsistensi Data yang Rendah
- Urusan: Statistik
- Topik: Indeks Pembangunan Statistik
- Masalah:
- Belum optimalnya penguatan sistem satu data
- Akar Masalah:
- a. Keterbatasan kapasitas SDM dalam tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi
 - b. Sistem informasi yang masih berjalan sektoral
 - c. Tidak konsistennya penggunaan indikator dan variabel data
 - d. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah
5. Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Belum Optimal
- Urusan: Komunikasi dan Informatika
- Topik: Minimnya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler/Handphone dengan Kondisi “Sinyal Sangat Kuat”
- Masalah:
- Kesenjangan akses digital di daerah terpencil dan pedalaman

Akar Masalah:

- a. Banyaknya desa/kelurahan yang tidak memiliki penerimaan terhadap sinyal internet
 - b. Minimnya ketersediaan Base Transceiver Station (BTS)
 - c. Kondisi lokasi desa yang masih banyak terdapat di perbukitan dan kawasan hutan sehingga menjadi tantangan dalam membangun menara telekomunikasi
 - d. Biaya operasional BTS yang tinggi
 - e. Kualitas sinyal dan kecepatan internet belum sepenuhnya merata
 - f. Kapasitas dan jangkauan tiap BTS masih terbatas
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Persandian yang kompeten, baik dari segi jumlah maupun kapasitas teknis.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

1. Visi dan Misi

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap perangkat daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan visi dan misi masing – masing perangkat daerah, visi dan misi daerah hanya satu yaitu visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih atau visi dan misi Kabupaten.

Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025 – 2029 pembuatan visi dan misi Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029, dimana RPJMD ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, pembangunan lintas daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2025 – 2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2006-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2025 – 2029 adalah: ***“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”***

Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 5 (lima) misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
3. Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik

2.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan strategis ini merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategis dimaksud merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan startegis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih cepat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis digunakan untuk : (a) rumusan tujuan organisasi (visi dan misi), (b) sasaran strategis yang spesifik, jelas dan terukur, (c) formulasi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya, dan (d) target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

Rencana strategis tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan lima tahun ke depan yang dijadikan tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029 untuk menunjang kegiatan dan tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Tujuan.

Tujuan strategis merupakan arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai keberhasilan suatu dinas atau organisasi. Adapun tujuan yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dimana visi “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara” dan misi “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”.

Tujuan sesuai dengan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ada 2 yaitu:

1. Integrasi standar pelayanan dan sistem tata Kelola pemerintahan berbasis digital.
2. Meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2.2.2. Sasaran.

Memperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, tentu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan harus menentukan sasaran, dimana sasaran tersebut tidak jauh beda dengan sasaran yang ditentukan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan yaitu:

“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara “.

Sasaran Strategis sesuai dengan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ada 2 yaitu:

1. Meningkatkan Standarisasi pelayanan dan system tata Kelola pemerintahan berbasis digital
2. Meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

2.3 Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari *kebijakan* dan *program* yang akan dilaksanakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan *sasaran, tujuan, visi* dan *misi* instansi pemerintah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis atau terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai *sasaran* atau *tujuan* tertentu.

1.3.1. Strategi

1. Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik yang responsif.
2. Penguatan kapasitas aparatur dan maturitas tata Kelola birokrasi yang adiktif.
3. Penguatan supremasi hukum yang transparan, adil dan netral.
4. Optimalisasi sinergitas perencanaan yang terpadu dan partisipatif.

2.3.2. Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang sudah ada untuk mencapai indikator kinerja utama perlu strategi dan arah kebijakan yang jelas bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu layanan publik melalui integrasi platform digital dan penguatan fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang responsif.
2. Pengembangan pusat data untuk optimalisasi dan pembaharuan data sebagai dasar pengembalian kebijakan yang terukur dan tepat sasaran.
3. Penguatan tata Kelola data Pembangunan melalui integrasi system database sectoral yang konsisten, baik antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan.
4. Penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan smart government yang mendorong tata Kelola pemerintahan yang adiktif, transparan dan responsif.
5. Penguatan pengelolaan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas aparatur yang professional dan bebas dari Tindakan korupsi

6. Penguatan struktur kelembagaan dan penempatan aparatur daerah secara tepat fungsi dan tepat kompetisi guna mendorong kinerja organisasi yang efektif.
7. Penguatan reformasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, transparan dan aksesibel bagi seluruh lapisan Masyarakat.
8. Optimalisasi pelaksanaan zonasi wilayah yang telah ditetapkan guna mempercepat Pembangunan lintas sektor sesuai potensi kewilayahan.
9. Harmonisasi Pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Penguatan mekanisme pengendalian Pembangunan, melalui implementasi manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemerintahan.
11. Peningkatan Upaya perthahelix melalui pelibatan Masyarakat adat dan umum dalam forum perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan.
12. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong penataan wilayah administratif pemerintahan yang adiktif terhadap kondisi geografis, beban kerja ke wilayahan dan dinamika kependudukan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen dan berupa tanggung Jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dengan Pemerintah Daerah yang menyangkut sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan selama 1 (satu) tahun. Adapun perjanjian kerja meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kerja (PK) dan Penetapan Pengukuran Kinerja (PPK).

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam RKT Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin di capai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1: Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang memuat Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Stratregi dan Arah Kebijakan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|----|---|--|--------|-------------|
| 01 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DiskominfoSP | Indeks | 66 / Baik |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | Nilai | 3,19 |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 2,50 |
| 04 | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 78,50 |
| 05 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | Persen | 40,00 |
| 06 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 2,8 / Baik |
| 07 | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,90 |
| 08 | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Nilai | Tingkat I |

Program Kegiatan dan Rencana Aksi untuk Rencana Kerja Tahunan

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|---|---|--|
| 01 | Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun |
| 02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi |
| 03 | Program Aplikasi Informatika | Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Aplikasi yang dikelola |
| 04 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik sektoral dalam melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 05 | Program Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandiaan untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah |

Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk Rencana Kerja Tahunan

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 1 Januari s.d 31 Desember 2025 | Sekretariat |
| 02 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1 Januari s.d 31 Desember 2025 | Bidang Komunikasi Publik dan Bidang |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|---|
| | | | Informasi Publik dan Statistik |
| 03 | Program Aplikasi Informatika | 1 Januari s.d 31 Desember 2025 | Bidang E-Government |
| 04 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1 Januari s.d 31 Desember 2025 | Bidang Informasi Publik dan Statistik |
| 05 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 1 Januari s.d 31 Desember 2025 | Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian |

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan indikator kinerja dari rencana kinerja tahunan, yang akan di capai dan disepakati antar pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanat/tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.1:

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 |
|----|---|--|--------|-------------|
| 01 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DiskominfoSP | Indeks | 66 / Baik |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | Nilai | 3,19 |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 2,50 |
| 04 | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 78,50 |
| 05 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | Persen | 40,00 |
| 06 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 2,8 / Baik |
| 07 | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,90 |
| 08 | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Nilai | Tingkat I |

2. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan adalah untuk memperoleh

- a. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama di gunakan instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
6. Pemantauan dan pengadilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dan IKU sebagai berikut :

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|--|-------------------------|---|---|--|
| 01. | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | <p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <p>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai FP1} + \text{nilai FP2} + \text{nilai FP3}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$</p> <p>2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$</p> <p>3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</p> | Pendoman Penyalarsan Muatan RPJMD dan RPJMN | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rensta Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pada tahun 2025 struktur dari Belanja terdiri dari belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025 Rincian dana anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp 20.170.928.785** Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **12.240.257.166,-** Belanja Pegawai Rp **4.013.169.235,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp **8.387.647.950,-** Belanja Modal Rp **7.770.111.600,-**

Tabel 2.5.1
Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2025

| No | Uraian | Anggaran |
|----------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Belanja Operasi | |
| | 5.1.1 Belanja Pegawai | 4.013.169.235,- |
| | 5.1.1 Belanja Barang dan Jasa | 8.387.647.950,- |
| 2 | Belanja Modal | |
| | 5.2.2. Belanja Modal Aset Tetap | 7.770.111.600,- |

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
| | TOTAL BELANJA | 20.170.928.785,- |

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 memiliki sebanyak 3 Urusan, 5 Program 13 Kegiatan dan 52 sub kegiatan, untuk membiayai Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel : 2.5.2

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

| No | Uraian Program & Kegiatan | | Rencana Anggaran |
|-----------|--|---|--------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.057.000,00,- |
| | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.000.000,00,- |
| | 0003 | Koordinasi dan Susunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.000.000,00,- |
| | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 10.000.000,00,- |
| | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 10.000.000,00,- |
| | 0006 | Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.000.000,00,- |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.013.169.235,00,- |
| | 0002 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 20.000.000,00,- |
| | 0003 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 206.840.000,00,- |
| | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 20.000.000,00,- |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | |
| 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.000.000,00,- |
| | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.000.000,00,- |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 32.250.000,00,- |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34.280.050,00,- |
| | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.249.900,00,- |
| | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 33.852.800,00,- |
| | 0004 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 53.580.000,00,- |
| | 0005 | Penyediaan Bahan Logistik | 214.416.800,00,- |
| | 0006 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 124.699.400,00,- |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah | | |
| 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.600.000,00,- |
| | 0005 | Pengadaan Mebel | 202.598.000,00,- |
| | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | 7.217.600.000,00,- |

| | | | |
|-------------|---|--|--------------------|
| | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 139.963.600,00,- |
| | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.032.000,00,- |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. | | |
| 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000,00,- |
| | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 155.000.000,00,- |
| | 0003 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 212.850.000,00,- |
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| 2.09 | 0001 | Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan atau kendaraan dinas jabatan | 62.000.000,00,- |
| | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 10.000.000,00,- |
| 9. | Penataan Organisasi | | |
| 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 25.000.000,00,- |
| II | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | |
| 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 2.01 | 0014 | Relasi Media | 4.266.822.000,00,- |
| | 0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 50.000.000,00,- |
| | 0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 7.710.000,00,- |
| | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | 318.902.000,00,- |
| | 0012 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | 84.420.000,00,- |
| | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 80.000.000,00,- |
| | 0023 | Penyusunan Konten | 200.000.000,00,- |
| | 0013 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | 30.000.000,00,- |
| III | Program Aplikasi Informatika | | |
| 1 | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota | | |
| 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 25.204.000,00,- |
| 2. | Pengelolaan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 2.02 | 0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 80.000.000,00,- |
| | 0018 | Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | 25.574.000,00,- |
| | 0019 | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | 30.372.000,00,- |

| | | | |
|------------|-------------|---|----------------------------|
| | 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah daerah | 150.000.000,00,- |
| | 0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 85.808.000,00,- |
| | 0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | 28.324.000,00,- |
| | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 54.252.000,00,- |
| | 0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | 820.632.000,00,- |
| | 0029 | Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | 30.000.000,00,- |
| | 0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | 240.000.000,00,- |
| IV. | | PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK | |
| | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | |
| | 0008 | Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 39.482.000,00,- |
| | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 58.500.000,00,- |
| | 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | 30.000.000,00,- |
| | 2.01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN DAN PENGAMANAN INFORMASI | |
| | 2.01 | Penyelenggaraan Persandiaan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 16.222.000,00,- |
| | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 20.484.000,00,- |
| | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.180.000,00,- |
| | 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 0001 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 30.648.000,00,- |
| | | Jumlah | 20.170.928.785,00,- |

2.6 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6.1

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

| No. | Sasaran | Anggaran | Keterangan |
|------------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 13.347.392.785,- | |

| | | | |
|----|---|---------------------------|--|
| 2. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp 5.037.854.000,- | |
| 3. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp 1.570.166.000,- | |
| 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp 127.982.000,- | |
| 5. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp 87.534.000,- | |
| | Jumlah | Rp20.170.928.785,- | |

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 5 program yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yaitu 1 Program diampu oleh Sekretariat, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2 Program diampu oleh bidang Informasi Publik dan Statistik yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, 1 Program diampu oleh Bidang E-Government, yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, 1 Program diampu oleh Bidang Infrastruktur, Teknologi Informatika dan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan 1 Program lagi diampu oleh Bidang Komunikasi Publik yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra-syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagai badan yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sehingga sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Apabila melihat poin 2 (dua) dari faktor-faktor perbandingan dalam evaluasi kinerja, karena ada faktor perbandingan hasil kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam bab ini yang dapat di coba di analisa adalah yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 beserta analisis pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan dan analisis keuangan.

3.1.1. Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025, adalah merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian

kinerjanya sasaran dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Capaian Kinerja Sasaran

| Urutan | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ≥ 91 | Sangat Tinggi | |
| II | 75,1 – 90,0 | Tinggi | |
| III | 65,1 – 75,0 | Sedang | |
| IV | 50,1 - 65, 0 | Rendah | |
| V | ≤50,0 | Sangat Rendah | |

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus serbagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi})}{(\text{Rencana})} \times 100$$

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indikator) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tanggal 18 September 2017, tentang Tata Cara Perencana dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator Utama Instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indicator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk:

- 2 Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 3 Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui tahapan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
4. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
5. Kebutuhan data statistik pemerintah
6. RKA/DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

3.1.2. Analisa Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Sasaran Strategis Pertama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Pertama Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah, Indikator Kinerja Nilai Sakip dengan Target Kinerja B nilai atau skor 66,00 pada tahun 2025 penilaian sakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan memperoleh nilai predikat B/baik dengan skor nilai 66,55

Capaian Indikator Kinerja Utama untuk Nilai Sakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan predikat baik dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{66,55}{66,00} \times 100 \% \\ &= 100,83 \%\end{aligned}$$

Dilihat dari interval nilai dalam skala pengukuran ordinal kriteria penilaiannya sangat tinggi, artinya semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pencapaian ini dapat kita lihat dengan adanya Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Nomor : 700/39/LHE/INSP/2025, Tanggal 26 Mei 2025

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dengan Bupati Barito Selatan Tahun 2025.

Hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Pertama Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital dengan indikator kinerja indeks Pelayanan Publik dengan target indeks 2,50. hasil capaian evaluasi indeks Pelayanan Publik untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dengan skor indeks 4,01.

Capaian Indikator Kinerja Utama hasil evaluasi keterbukaan publik dengan menggunakan interval nilai dalam skala pengukuran ordinal kriteria penilaiannya tinggi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{4,01}{2,50} \times 100\% = 160,4\%$$

Dari Penilaian capaian kinerja menurut pengukuran ordinal berdasarkan skala interval kategori sangat tinggi



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); dan
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR
ARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NEGUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH
TAHUN 2025HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025**A. KEMENTERIAN/LEMBAGA**

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| 1 | Badan Pusat Statistik | 4.92 | A |
| 2 | Kementerian Keuangan | 4.87 | A |
| 3 | Kementerian Kesehatan | 4.87 | A |
| 4 | Kejaksaan Agung | 4.85 | A |
| 5 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 4.80 | A |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 4.80 | A |
| 7 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 4.80 | A |
| 8 | Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan | 4.80 | A |
| 9 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 4.80 | A |
| 10 | Badan Riset Dan Inovasi Nasional | 4.77 | A |
| 11 | Badan Narkotika Nasional | 4.77 | A |
| 12 | Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan | 4.77 | A |
| 13 | Badan Kepegawaian Negara | 4.76 | A |
| 14 | Kementerian Dalam Negeri | 4.76 | A |
| 15 | Kementerian Pertanian | 4.75 | A |
| 16 | Ombudsman Republik Indonesia | 4.72 | A |
| 17 | Kementerian Pekerjaan Umum | 4.68 | A |
| 18 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 4.67 | A |
| 19 | Kementerian Sosial | 4.66 | A |
| 20 | Komisi Pemilihan Umum | 4.66 | A |
| 21 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 4.62 | A |
| 22 | Kementerian Pariwisata | 4.61 | A |
| 23 | Kementerian Agama | 4.61 | A |
| 24 | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 4.61 | A |
| 25 | Lembaga Administrasi Negara | 4.59 | A |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| 26 | Kementerian Luar Negeri | 4.58 | A |
| 27 | Kementerian Hukum | 4.58 | A |
| 28 | Kementerian Perindustrian | 4.58 | A |
| 29 | Kementerian Ketenagakerjaan | 4.57 | A |
| 30 | Kepolisian Negara RI | 4.57 | A |
| 31 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI | 4.52 | A |
| 32 | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 4.51 | A |
| 33 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 4.51 | A |
| 34 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 4.51 | A |
| 35 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 4.51 | A |
| 36 | Badan Standardisasi Nasional | 4.47 | A- |
| 37 | Badan Informasi Geospasial | 4.45 | A- |
| 38 | Kementerian Perhubungan | 4.44 | A- |
| 39 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 4.44 | A- |
| 40 | Kementerian Perdagangan | 4.43 | A- |
| 41 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 4.41 | A- |
| 42 | Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 4.41 | A- |
| 43 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 4.40 | A- |
| 44 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 4.39 | A- |
| 45 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi | 4.37 | A- |
| 46 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah | 4.36 | A- |
| 47 | Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat | 4.36 | A- |
| 48 | Kementerian Koperasi | 4.34 | A- |
| 49 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 4.34 | A- |
| 50 | Kementerian Kehutanan | 4.33 | A- |
| 51 | Perpustakaan Nasional | 4.30 | A- |
| 52 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | 4.26 | A- |
| 53 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | 4.25 | A- |
| 54 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 4.25 | A- |
| 55 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 4.22 | A- |
| 56 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 4.11 | A- |
| 57 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 4.05 | A- |
| 58 | Kementerian Sekretariat Negara | 4.05 | A- |
| 59 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 4.04 | A- |
| 60 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | 4.03 | A- |
| 61 | Badan Siber dan Sandi Negara | 4.02 | A- |
| 62 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 4.00 | B |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|----|--|--------|----------|
| 63 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 3.99 | B |
| 64 | Kementerian Kebudayaan | 3.96 | B |
| 65 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.93 | B |
| 66 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 3.93 | B |
| 67 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 3.90 | B |
| 68 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 3.85 | B |
| 69 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 3.85 | B |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 3.85 | B |
| 71 | Badan Intelijen Negara | 3.85 | B |
| 72 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 3.83 | B |
| 73 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 3.82 | B |
| 74 | Kementerian Transmigrasi | 3.81 | B |
| 75 | Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan | 3.78 | B |
| 76 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 3.62 | B |
| 77 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 3.62 | B |
| 78 | Badan Pangan Nasional | 3.53 | B |
| 79 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 3.48 | B- |
| 80 | Lembaga Ketahanan Nasional | 3.32 | B- |
| 81 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 3.32 | B- |
| 82 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 3.18 | B- |
| 83 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 3.15 | B- |
| 84 | Kementerian Hak Asasi Manusia | 3.11 | B- |
| 85 | Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat | 3.09 | B- |
| 86 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.03 | B- |
| 87 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | 3.03 | B- |
| 88 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 3.02 | B- |
| 89 | Kementerian Pertahanan | 3.02 | B- |
| 90 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 3.01 | B- |
| 91 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | 2.93 | C |
| 92 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan | N/A | N/A |
| 93 | Badan Gizi Nasional | N/A | N/A |

B. PROVINSI

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|----|--|--------|----------|
| 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 4.75 | A |
| 2 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 4.73 | A |
| 3 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 4.72 | A |
| 4 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 4.71 | A |
| 5 | Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 4.69 | A |
| 6 | Pemerintah Provinsi Bali | 4.68 | A |
| 7 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 4.63 | A |
| 8 | Pemerintah Provinsi Aceh | 4.56 | A |
| 9 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 4.56 | A |
| 10 | Pemerintah Provinsi Gorontalo | 4.48 | A- |
| 11 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 4.48 | A- |
| 12 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 4.41 | A- |
| 13 | Pemerintah Provinsi Banten | 4.35 | A- |
| 14 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 4.35 | A- |
| 15 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 4.34 | A- |
| 16 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 4.27 | A- |
| 17 | Pemerintah Provinsi Riau | 4.27 | A- |
| 18 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 4.21 | A- |
| 19 | Pemerintah Provinsi Lampung | 4.19 | A- |
| 20 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4.18 | A- |
| 21 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 4.17 | A- |
| 22 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 4.11 | A- |
| 23 | Pemerintah Provinsi Jambi | 4.03 | A- |
| 24 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 4.01 | A- |
| 25 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 3.97 | B |
| 26 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | 3.96 | B |
| 27 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 3.89 | B |
| 28 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | 3.86 | B |
| 29 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 3.70 | B |
| 30 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 3.44 | B- |
| 31 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 3.17 | B- |
| 32 | Pemerintah Provinsi Maluku | 2.91 | C |
| 33 | Pemerintah Provinsi Papua | 2.79 | C |
| 34 | Pemerintah Provinsi Papua Barat | N/A | N/A |
| 35 | Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya | N/A | N/A |
| 36 | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan | N/A | N/A |
| 37 | Pemerintah Provinsi Papua Selatan | N/A | N/A |
| 38 | Pemerintah Provinsi Papua Tengah | N/A | N/A |

C. KOTA

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|----|-----------------------------------|--------|----------|
| 1 | Pemerintah Kota Surabaya | 4.84 | A |
| 2 | Pemerintah Kota Surakarta | 4.80 | A |
| 3 | Pemerintah Kota Denpasar | 4.80 | A |
| 4 | Pemerintah Kota Depok | 4.76 | A |
| 5 | Pemerintah Kota Bandung | 4.73 | A |
| 6 | Pemerintah Kota Bekasi | 4.73 | A |
| 7 | Pemerintah Kota Pontianak | 4.71 | A |
| 8 | Pemerintah Kota Pasuruan | 4.71 | A |
| 9 | Pemerintah Kota Madiun | 4.71 | A |
| 10 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 4.70 | A |
| 11 | Pemerintah Kota Balikpapan | 4.70 | A |
| 12 | Pemerintah Kota Cirebon | 4.70 | A |
| 13 | Pemerintah Kota Pekalongan | 4.70 | A |
| 14 | Pemerintah Kota Blitar | 4.69 | A |
| 15 | Pemerintah Kota Batam | 4.69 | A |
| 16 | Pemerintah Kota Bogor | 4.69 | A |
| 17 | Pemerintah Kota Yogyakarta | 4.69 | A |
| 18 | Pemerintah Kota Mojokerto | 4.67 | A |
| 19 | Pemerintah Kota Prabumulih | 4.67 | A |
| 20 | Pemerintah Kota Samarinda | 4.67 | A |
| 21 | Pemerintah Kota Kediri | 4.66 | A |
| 22 | Pemerintah Kota Malang | 4.64 | A |
| 23 | Pemerintah Kota Singkawang | 4.63 | A |
| 24 | Pemerintah Kota Batu | 4.62 | A |
| 25 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 4.62 | A |
| 26 | Pemerintah Kota Cimahi | 4.61 | A |
| 27 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 4.59 | A |
| 28 | Pemerintah Kota Banjar | 4.59 | A |
| 29 | Pemerintah Kota Medan | 4.54 | A |
| 30 | Pemerintah Kota Bontang | 4.53 | A |
| 31 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 4.50 | A- |
| 32 | Pemerintah Kota Sukabumi | 4.50 | A- |
| 33 | Pemerintah Kota Palembang | 4.48 | A- |
| 34 | Pemerintah Kota Semarang | 4.48 | A- |
| 35 | Pemerintah Kota Padang Panjang | 4.47 | A- |
| 36 | Pemerintah Kota Probolinggo | 4.47 | A- |
| 37 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 4.45 | A- |
| 38 | Pemerintah Kota Tanjung Pinang | 4.44 | A- |
| 39 | Pemerintah Kota Mataram | 4.42 | A- |
| 40 | Pemerintah Kota Salatiga | 4.42 | A- |
| 41 | Pemerintah Kota Pematangsiantar | 4.40 | A- |
| 42 | Pemerintah Kota Tarakan | 4.36 | A- |
| 43 | Pemerintah Kota Payakumbuh | 4.35 | A- |
| 44 | Pemerintah Kota Palangkaraya | 4.35 | A- |
| 45 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 4.32 | A- |
| 46 | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 4.31 | A- |
| 47 | Pemerintah Kota Metro | 4.31 | A- |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 48 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 4.31 | A- |
| 49 | Pemerintah Kota Tegal | 4.28 | A- |
| 50 | Pemerintah Kota Magelang | 4.28 | A- |
| 51 | Pemerintah Kota Palu | 4.23 | A- |
| 52 | Pemerintah Kota Banda Aceh | 4.21 | A- |
| 53 | Pemerintah Kota Cilegon | 4.21 | A- |
| 54 | Pemerintah Kota Tomohon | 4.20 | A- |
| 55 | Pemerintah Kota Pekanbaru | 4.18 | A- |
| 56 | Pemerintah Kota Bengkulu | 4.17 | A- |
| 57 | Pemerintah Kota Serang | 4.16 | A- |
| 58 | Pemerintah Kota Sabang | 4.12 | A- |
| 59 | Pemerintah Kota Padang Sidempuan | 4.10 | A- |
| 60 | Pemerintah Kota Bitung | 4.08 | A- |
| 61 | Pemerintah Kota Ambon | 4.06 | A- |
| 62 | Pemerintah Kota Kupang | 4.02 | A- |
| 63 | Pemerintah Kota Jambi | 4.00 | B |
| 64 | Pemerintah Kota Sibolga | 4.00 | B |
| 65 | Pemerintah Kota Dumai | 3.92 | B |
| 66 | Pemerintah Kota Tangerang | 3.90 | B |
| 67 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 3.90 | B |
| 68 | Pemerintah Kota Bima | 3.84 | B |
| 69 | Pemerintah Kota Bau Bau | 3.83 | B |
| 70 | Pemerintah Kota Langsa | 3.76 | B |
| 71 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 3.75 | B |
| 72 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | 3.72 | B |
| 73 | Pemerintah Kota Kotamobagu | 3.71 | B |
| 74 | Pemerintah Kota Manado | 3.67 | B |
| 75 | Pemerintah Kota Gunungsitoli | 3.66 | B |
| 76 | Pemerintah Kota Makassar | 3.44 | B- |
| 77 | Pemerintah Kota Subulussalam | 3.39 | B- |
| 78 | Pemerintah Kota Padang | 3.38 | B- |
| 79 | Pemerintah Kota Parepare | 3.33 | B- |
| 80 | Pemerintah Kota Binjai | 3.32 | B- |
| 81 | Pemerintah Kota Gorontalo | 3.19 | B- |
| 82 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 3.11 | B- |
| 83 | Pemerintah Kota Pariaman | 3.10 | B- |
| 84 | Pemerintah Kota Bukittinggi | 3.05 | B- |
| 85 | Pemerintah Kota Kendari | 3.04 | B- |
| 86 | Pemerintah Kota Sawahlunto | 3.04 | B- |
| 87 | Pemerintah Kota Jayapura | 2.97 | C |
| 88 | Pemerintah Kota Solok | 2.93 | C |
| 89 | Pemerintah Kota Ternate | 2.72 | C |
| 90 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 2.66 | C |
| 91 | Pemerintah Kota Tual | 2.45 | C- |
| 92 | Pemerintah Kota Palopo | N/A | N/A |
| 93 | Pemerintah Kota Sorong | N/A | N/A |

D. KABUPATEN

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Sumedang | 4.72 | A |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Sleman | 4.70 | A |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Batang | 4.69 | A |
| 4 | Pemerintah Kabupaten Jombang | 4.69 | A |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Bantul | 4.68 | A |
| 6 | Pemerintah Kabupaten Bojonegoro | 4.68 | A |
| 7 | Pemerintah Kabupaten Jember | 4.68 | A |
| 8 | Pemerintah Kabupaten Garut | 4.68 | A |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Kediri | 4.67 | A |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Magetan | 4.67 | A |
| 11 | Pemerintah Kabupaten Muara Enim | 4.66 | A |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Pemalang | 4.66 | A |
| 13 | Pemerintah Kabupaten Cilacap | 4.66 | A |
| 14 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | 4.66 | A |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Tulungagung | 4.66 | A |
| 16 | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas | 4.66 | A |
| 17 | Pemerintah Kabupaten Banjar | 4.66 | A |
| 18 | Pemerintah Kabupaten Bekasi | 4.65 | A |
| 19 | Pemerintah Kabupaten Majalengka | 4.65 | A |
| 20 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 4.64 | A |
| 21 | Pemerintah Kabupaten Ciamis | 4.63 | A |
| 22 | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | 4.63 | A |
| 23 | Pemerintah Kabupaten Bintan | 4.63 | A |
| 24 | Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 4.62 | A |
| 25 | Pemerintah Kabupaten Pamekasan | 4.62 | A |
| 26 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu | 4.61 | A |
| 27 | Pemerintah Kabupaten Karawang | 4.61 | A |
| 28 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 4.61 | A |
| 29 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | 4.61 | A |
| 30 | Pemerintah Kabupaten Wonogiri | 4.60 | A |
| 31 | Pemerintah Kabupaten Bandung | 4.60 | A |
| 32 | Pemerintah Kabupaten Cirebon | 4.60 | A |
| 33 | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | 4.60 | A |
| 34 | Pemerintah Kabupaten Ponorogo | 4.59 | A |
| 35 | Pemerintah Kabupaten Banyumas | 4.59 | A |
| 36 | Pemerintah Kabupaten Badung | 4.59 | A |
| 37 | Pemerintah Kabupaten Probolinggo | 4.59 | A |
| 38 | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | 4.59 | A |
| 39 | Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman | 4.58 | A |
| 40 | Pemerintah Kabupaten Pinrang | 4.58 | A |
| 41 | Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai | 4.58 | A |
| 42 | Pemerintah Kabupaten Pringsewu | 4.58 | A |
| 43 | Pemerintah Kabupaten Balangan | 4.57 | A |
| 44 | Pemerintah Kabupaten Pangandaran | 4.57 | A |
| 45 | Pemerintah Kabupaten Tegal | 4.57 | A |
| 46 | Pemerintah Kabupaten Sragen | 4.56 | A |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|----|--|--------|----------|
| 47 | Pemerintah Kabupaten Kayong Utara | 4.56 | A |
| 48 | Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir | 4.55 | A |
| 49 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | 4.55 | A |
| 50 | Pemerintah Kabupaten Klaten | 4.54 | A |
| 51 | Pemerintah Kabupaten Banyuasin | 4.54 | A |
| 52 | Pemerintah Kabupaten Pacitan | 4.52 | A |
| 53 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | 4.52 | A |
| 54 | Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | 4.51 | A |
| 55 | Pemerintah Kabupaten Belitung Timur | 4.51 | A |
| 56 | Pemerintah Kabupaten Purwakarta | 4.51 | A |
| 57 | Pemerintah Kabupaten Madiun | 4.50 | A- |
| 58 | Pemerintah Kabupaten Banjarnegara | 4.50 | A- |
| 59 | Pemerintah Kabupaten Blora | 4.49 | A- |
| 60 | Pemerintah Kabupaten Sampang | 4.49 | A- |
| 61 | Pemerintah Kabupaten Deli Serdang | 4.49 | A- |
| 62 | Pemerintah Kabupaten Sukabumi | 4.48 | A- |
| 63 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | 4.47 | A- |
| 64 | Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi | 4.47 | A- |
| 65 | Pemerintah Kabupaten Lumajang | 4.47 | A- |
| 66 | Pemerintah Kabupaten Pasaman | 4.47 | A- |
| 67 | Pemerintah Kabupaten Tabalong | 4.46 | A- |
| 68 | Pemerintah Kabupaten Bogor | 4.46 | A- |
| 69 | Pemerintah Kabupaten Ngawi | 4.46 | A- |
| 70 | Pemerintah Kabupaten Kendal | 4.45 | A- |
| 71 | Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin | 4.45 | A- |
| 72 | Pemerintah Kabupaten Solok | 4.44 | A- |
| 73 | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | 4.44 | A- |
| 74 | Pemerintah Kabupaten Sumenep | 4.44 | A- |
| 75 | Pemerintah Kabupaten Kuningan | 4.43 | A- |
| 76 | Pemerintah Kabupaten Langkat | 4.43 | A- |
| 77 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | 4.43 | A- |
| 78 | Pemerintah Kabupaten Purworejo | 4.41 | A- |
| 79 | Pemerintah Kabupaten Karanganyar | 4.41 | A- |
| 80 | Pemerintah Kabupaten Indramayu | 4.41 | A- |
| 81 | Pemerintah Kabupaten Pandeglang | 4.41 | A- |
| 82 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 4.40 | A- |
| 83 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir | 4.39 | A- |
| 84 | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat | 4.39 | A- |
| 85 | Pemerintah Kabupaten Mojokerto | 4.38 | A- |
| 86 | Pemerintah Kabupaten Lingga | 4.38 | A- |
| 87 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | 4.37 | A- |
| 88 | Pemerintah Kabupaten Paser | 4.37 | A- |
| 89 | Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan | 4.37 | A- |
| 90 | Pemerintah Kabupaten Semarang | 4.36 | A- |
| 91 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 4.36 | A- |
| 92 | Pemerintah Kabupaten Gresik | 4.35 | A- |
| 93 | Pemerintah Kabupaten Barito Kuala | 4.35 | A- |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 94 | Pemerintah Kabupaten Ketapang | 4.34 | A- |
| 95 | Pemerintah Kabupaten Klungkung | 4.33 | A- |
| 96 | Pemerintah Kabupaten Kebumen | 4.33 | A- |
| 97 | Pemerintah Kabupaten Sambas | 4.33 | A- |
| 98 | Pemerintah Kabupaten Nunukan | 4.32 | A- |
| 99 | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 4.32 | A- |
| 100 | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu | 4.32 | A- |
| 101 | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara | 4.32 | A- |
| 102 | Pemerintah Kabupaten Wonosobo | 4.32 | A- |
| 103 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | 4.32 | A- |
| 104 | Pemerintah Kabupaten Batanghari | 4.32 | A- |
| 105 | Pemerintah Kabupaten Mesuji | 4.31 | A- |
| 106 | Pemerintah Kabupaten Katingan | 4.31 | A- |
| 107 | Pemerintah Kabupaten Berau | 4.30 | A- |
| 108 | Pemerintah Kabupaten Kubu Raya | 4.30 | A- |
| 109 | Pemerintah Kabupaten Kapuas | 4.29 | A- |
| 110 | Pemerintah Kabupaten Asahan | 4.28 | A- |
| 111 | Pemerintah Kabupaten Karimun | 4.28 | A- |
| 112 | Pemerintah Kabupaten Kampar | 4.27 | A- |
| 113 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan | 4.27 | A- |
| 114 | Pemerintah Kabupaten Lahat | 4.26 | A- |
| 115 | Pemerintah Kabupaten Subang | 4.26 | A- |
| 116 | Pemerintah Kabupaten Tapin | 4.26 | A- |
| 117 | Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat | 4.25 | A- |
| 118 | Pemerintah Kabupaten Magelang | 4.25 | A- |
| 119 | Pemerintah Kabupaten Bengkalis | 4.25 | A- |
| 120 | Pemerintah Kabupaten Dharmasraya | 4.25 | A- |
| 121 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir | 4.24 | A- |
| 122 | Pemerintah Kabupaten Bangka | 4.24 | A- |
| 123 | Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara | 4.23 | A- |
| 124 | Pemerintah Kabupaten Bombana | 4.23 | A- |
| 125 | Pemerintah Kabupaten Tangerang | 4.22 | A- |
| 126 | Pemerintah Kabupaten Lampung Utara | 4.22 | A- |
| 127 | Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota | 4.21 | A- |
| 128 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | 4.20 | A- |
| 129 | Pemerintah Kabupaten Buleleng | 4.20 | A- |
| 130 | Pemerintah Kabupaten Tanggamus | 4.19 | A- |
| 131 | Pemerintah Kabupaten Grobogan | 4.18 | A- |
| 132 | Pemerintah Kabupaten Bulungan | 4.18 | A- |
| 133 | Pemerintah Kabupaten Nias Utara | 4.17 | A- |
| 134 | Pemerintah Kabupaten Malang | 4.16 | A- |
| 135 | Pemerintah Kabupaten Demak | 4.15 | A- |
| 136 | Pemerintah Kabupaten Bondowoso | 4.15 | A- |
| 137 | Pemerintah Kabupaten Tanah Datar | 4.15 | A- |
| 138 | Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah | 4.15 | A- |
| 139 | Pemerintah Kabupaten Tuban | 4.14 | A- |
| 140 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur | 4.13 | A- |
| 141 | Pemerintah Kabupaten Blitar | 4.12 | A- |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----|---|--------|----------|
| 142 | Pemerintah Kabupaten Dairi | 4.10 | A- |
| 143 | Pemerintah Kabupaten Pekalongan | 4.10 | A- |
| 144 | Pemerintah Kabupaten Minahasa | 4.09 | A- |
| 145 | Pemerintah Kabupaten Kudus | 4.08 | A- |
| 146 | Pemerintah Kabupaten Bireuen | 4.08 | A- |
| 147 | Pemerintah Kabupaten Kerinci | 4.08 | A- |
| 148 | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat | 4.07 | A- |
| 149 | Pemerintah Kabupaten Pohuwato | 4.07 | A- |
| 150 | Pemerintah Kabupaten Belitung | 4.06 | A- |
| 151 | Pemerintah Kabupaten Tana Tidung | 4.06 | A- |
| 152 | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | 4.05 | A- |
| 153 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara | 4.05 | A- |
| 154 | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara | 4.04 | A- |
| 155 | Pemerintah Kabupaten Temanggung | 4.04 | A- |
| 156 | Pemerintah Kabupaten Solok Selatan | 4.03 | A- |
| 157 | Pemerintah Kabupaten Tabanan | 4.02 | A- |
| 158 | Pemerintah Kabupaten Cianjur | 4.02 | A- |
| 159 | Pemerintah Kabupaten Situbondo | 4.02 | A- |
| 160 | Pemerintah Kabupaten Barito Selatan | 4.01 | A- |
| 161 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan | 4.00 | B |
| 162 | Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu | 3.99 | B |
| 163 | Pemerintah Kabupaten Sijunjung | 3.99 | B |
| 164 | Pemerintah Kabupaten Karangasem | 3.98 | B |
| 165 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 3.97 | B |
| 166 | Pemerintah Kabupaten Simalungun | 3.97 | B |
| 167 | Pemerintah Kabupaten Majene | 3.97 | B |
| 168 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara | 3.97 | B |
| 169 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow | 3.96 | B |
| 170 | Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu | 3.95 | B |
| 171 | Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang | 3.95 | B |
| 172 | Pemerintah Kabupaten Sukamara | 3.94 | B |
| 173 | Pemerintah Kabupaten Simeulue | 3.93 | B |
| 174 | Pemerintah Kabupaten Aceh Besar | 3.93 | B |
| 175 | Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah | 3.92 | B |
| 176 | Pemerintah Kabupaten Sintang | 3.91 | B |
| 177 | Pemerintah Kabupaten Natuna | 3.90 | B |
| 178 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara | 3.89 | B |
| 179 | Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 3.88 | B |
| 180 | Pemerintah Kabupaten Lebong | 3.87 | B |
| 181 | Pemerintah Kabupaten Gianyar | 3.85 | B |
| 182 | Pemerintah Kabupaten Lombok Timur | 3.84 | B |
| 183 | Pemerintah Kabupaten Konawe | 3.83 | B |
| 184 | Pemerintah Kabupaten Barito Utara | 3.83 | B |
| 185 | Pemerintah Kabupaten Kaur | 3.81 | B |
| 186 | Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya | 3.81 | B |
| 187 | Pemerintah Kabupaten Banggai Laut | 3.79 | B |
| 188 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 3.79 | B |
| 189 | Pemerintah Kabupaten Agam | 3.78 | B |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 190 | Pemerintah Kabupaten Bangkalan | 3.78 | B |
| 191 | Pemerintah Kabupaten Aceh Timur | 3.78 | B |
| 192 | Pemerintah Kabupaten Lamandau | 3.77 | B |
| 193 | Pemerintah Kabupaten Bangli | 3.76 | B |
| 194 | Pemerintah Kabupaten Murung Raya | 3.76 | B |
| 195 | Pemerintah Kabupaten Empat Lawang | 3.74 | B |
| 196 | Pemerintah Kabupaten Pesawaran | 3.74 | B |
| 197 | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan | 3.74 | B |
| 198 | Pemerintah Kabupaten Jepara | 3.74 | B |
| 199 | Pemerintah Kabupaten Wakatobi | 3.74 | B |
| 200 | Pemerintah Kabupaten Boyolali | 3.74 | B |
| 201 | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat | 3.74 | B |
| 202 | Pemerintah Kabupaten Kepahiang | 3.73 | B |
| 203 | Pemerintah Kabupaten Samosir | 3.73 | B |
| 204 | Pemerintah Kabupaten Nias | 3.72 | B |
| 205 | Pemerintah Kabupaten Purbalingga | 3.72 | B |
| 206 | Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 3.71 | B |
| 207 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang | 3.71 | B |
| 208 | Pemerintah Kabupaten Serang | 3.70 | B |
| 209 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara | 3.69 | B |
| 210 | Pemerintah Kabupaten Seruyan | 3.69 | B |
| 211 | Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya | 3.68 | B |
| 212 | Pemerintah Kabupaten Batu Bara | 3.68 | B |
| 213 | Pemerintah Kabupaten Aceh Utara | 3.67 | B |
| 214 | Pemerintah Kabupaten Karo | 3.67 | B |
| 215 | Pemerintah Kabupaten Bengkayang | 3.66 | B |
| 216 | Pemerintah Kabupaten Lampung Timur | 3.66 | B |
| 217 | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil | 3.66 | B |
| 218 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan | 3.65 | B |
| 219 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | 3.64 | B |
| 220 | Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara | 3.64 | B |
| 221 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah | 3.63 | B |
| 222 | Pemerintah Kabupaten Bone | 3.63 | B |
| 223 | Pemerintah Kabupaten Brebes | 3.62 | B |
| 224 | Pemerintah Kabupaten Bener Meriah | 3.61 | B |
| 225 | Pemerintah Kabupaten Soppeng | 3.58 | B |
| 226 | Pemerintah Kabupaten Lembata | 3.57 | B |
| 227 | Pemerintah Kabupaten Kutai Barat | 3.56 | B |
| 228 | Pemerintah Kabupaten Kolaka | 3.56 | B |
| 229 | Pemerintah Kabupaten Mempawah | 3.55 | B |
| 230 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | 3.55 | B |
| 231 | Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan | 3.55 | B |
| 232 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara | 3.54 | B |
| 233 | Pemerintah Kabupaten Muko Muko | 3.54 | B |
| 234 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat | 3.51 | B |
| 235 | Pemerintah Kabupaten Dompu | 3.50 | B- |
| 236 | Pemerintah Kabupaten Melawi | 3.50 | B- |
| 237 | Pemerintah Kabupaten Gowa | 3.50 | B- |
| 238 | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan | 3.49 | B- |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 239 | Pemerintah Kabupaten Lombok Utara | 3.48 | B- |
| 240 | Pemerintah Kabupaten Pelalawan | 3.48 | B- |
| 241 | Pemerintah Kabupaten Bone Bolango | 3.46 | B- |
| 242 | Pemerintah Kabupaten Seluma | 3.46 | B- |
| 243 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 3.46 | B- |
| 244 | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara | 3.45 | B- |
| 245 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara | 3.45 | B- |
| 246 | Pemerintah Kabupaten Gorontalo | 3.45 | B- |
| 247 | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara | 3.43 | B- |
| 248 | Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | 3.43 | B- |
| 249 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat | 3.42 | B- |
| 250 | Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | 3.41 | B- |
| 251 | Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | 3.41 | B- |
| 252 | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan | 3.41 | B- |
| 253 | Pemerintah Kabupaten Sekadau | 3.41 | B- |
| 254 | Pemerintah Kabupaten Way Kanan | 3.41 | B- |
| 255 | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir | 3.40 | B- |
| 256 | Pemerintah Kabupaten Lebak | 3.40 | B- |
| 257 | Pemerintah Kabupaten Pidie | 3.38 | B- |
| 258 | Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro | 3.38 | B- |
| 259 | Pemerintah Kabupaten Landak | 3.37 | B- |
| 260 | Pemerintah Kabupaten Gunung Mas | 3.37 | B- |
| 261 | Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat | 3.37 | B- |
| 262 | Pemerintah Kabupaten Kotabaru | 3.36 | B- |
| 263 | Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur | 3.36 | B- |
| 264 | Pemerintah Kabupaten Toba | 3.34 | B- |
| 265 | Pemerintah Kabupaten Gayo Lues | 3.34 | B- |
| 266 | Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una | 3.33 | B- |
| 267 | Pemerintah Kabupaten Sigi | 3.31 | B- |
| 268 | Pemerintah Kabupaten Sanggau | 3.31 | B- |
| 269 | Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong | 3.30 | B- |
| 270 | Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau | 3.27 | B- |
| 271 | Pemerintah Kabupaten Bangka Barat | 3.27 | B- |
| 272 | Pemerintah Kabupaten Rote Ndao | 3.27 | B- |
| 273 | Pemerintah Kabupaten Malinau | 3.27 | B- |
| 274 | Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah | 3.24 | B- |
| 275 | Pemerintah Kabupaten Manokwari | 3.23 | B- |
| 276 | Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat | 3.22 | B- |
| 277 | Pemerintah Kabupaten Muna | 3.21 | B- |
| 278 | Pemerintah Kabupaten Buton | 3.21 | B- |
| 279 | Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu | 3.21 | B- |
| 280 | Pemerintah Kabupaten Rembang | 3.20 | B- |
| 281 | Pemerintah Kabupaten Siak | 3.19 | B- |
| 282 | Pemerintah Kabupaten Buton Selatan | 3.18 | B- |
| 283 | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar | 3.16 | B- |
| 284 | Pemerintah Kabupaten Bima | 3.16 | B- |
| 285 | Pemerintah Kabupaten Ende | 3.15 | B- |
| 286 | Pemerintah Kabupaten Merangin | 3.15 | B- |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----|---|--------|----------|
| 287 | Pemerintah Kabupaten Tolikara | 3.15 | B- |
| 288 | Pemerintah Kabupaten Buru | 3.14 | B- |
| 289 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti | 3.13 | B- |
| 290 | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.13 | B- |
| 291 | Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi | 3.08 | B- |
| 292 | Pemerintah Kabupaten Manggarai | 3.08 | B- |
| 293 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur | 3.06 | B- |
| 294 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe | 3.04 | B- |
| 295 | Pemerintah Kabupaten Barru | 3.02 | B- |
| 296 | Pemerintah Kabupaten Sinjai | 3.01 | B- |
| 297 | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat | 3.00 | C |
| 298 | Pemerintah Kabupaten Muna Barat | 2.96 | C |
| 299 | Pemerintah Kabupaten Pati | 2.96 | C |
| 300 | Pemerintah Kabupaten Boalemo | 2.95 | C |
| 301 | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong | 2.95 | C |
| 302 | Pemerintah Kabupaten Sumba Timur | 2.94 | C |
| 303 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah | 2.94 | C |
| 304 | Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu | 2.92 | C |
| 305 | Pemerintah Kabupaten Tebo | 2.91 | C |
| 306 | Pemerintah Kabupaten Biak Numfor | 2.90 | C |
| 307 | Pemerintah Kabupaten Fak Fak | 2.90 | C |
| 308 | Pemerintah Kabupaten Morowali Utara | 2.90 | C |
| 309 | Pemerintah Kabupaten Mamasa | 2.89 | C |
| 310 | Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara | 2.88 | C |
| 311 | Pemerintah Kabupaten Buton Tengah | 2.85 | C |
| 312 | Pemerintah Kabupaten Poso | 2.84 | C |
| 313 | Pemerintah Kabupaten Morowali | 2.83 | C |
| 314 | Pemerintah Kabupaten Alor | 2.81 | C |
| 315 | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan | 2.81 | C |
| 316 | Pemerintah Kabupaten Flores Timur | 2.79 | C |
| 317 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula | 2.79 | C |
| 318 | Pemerintah Kabupaten Buton Utara | 2.79 | C |
| 319 | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal | 2.78 | C |
| 320 | Pemerintah Kabupaten Sarolangun | 2.77 | C |
| 321 | Pemerintah Kabupaten Sumbawa | 2.77 | C |
| 322 | Pemerintah Kabupaten Nagan Raya | 2.76 | C |
| 323 | Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2.75 | C |
| 324 | Pemerintah Kabupaten Mamuju | 2.74 | C |
| 325 | Pemerintah Kabupaten Tana Toraja | 2.73 | C |
| 326 | Pemerintah Kabupaten Bulukumba | 2.72 | C |
| 327 | Pemerintah Kabupaten Banggai | 2.71 | C |
| 328 | Pemerintah Kabupaten Nagekeo | 2.69 | C |
| 329 | Pemerintah Kabupaten Barito Timur | 2.69 | C |
| 330 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2.67 | C |
| 331 | Pemerintah Kabupaten Belu | 2.65 | C |
| 332 | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur | 2.64 | C |
| 333 | Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat | 2.62 | C |
| 334 | Pemerintah Kabupaten Maros | 2.60 | C |
| 335 | Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.59 | C |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----|--|--------|----------|
| 336 | Pemerintah Kabupaten Wajo | 2.59 | C |
| 337 | Pemerintah Kabupaten Ngada | 2.59 | C |
| 338 | Pemerintah Kabupaten Nias Selatan | 2.57 | C |
| 339 | Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah | 2.56 | C |
| 340 | Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara | 2.56 | C |
| 341 | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur | 2.55 | C |
| 342 | Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara | 2.54 | C |
| 343 | Pemerintah Kabupaten Padang Lawas | 2.54 | C |
| 344 | Pemerintah Kabupaten Jembrana | 2.53 | C |
| 345 | Pemerintah Kabupaten Pasangkayu | 2.52 | C |
| 346 | Pemerintah Kabupaten Buol | 2.50 | C- |
| 347 | Pemerintah Kabupaten Sikka | 2.49 | C- |
| 348 | Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat | 2.47 | C- |
| 349 | Pemerintah Kabupaten Raja Ampat | 2.44 | C- |
| 350 | Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua | 2.43 | C- |
| 351 | Pemerintah Kabupaten Jeneponto | 2.42 | C- |
| 352 | Pemerintah Kabupaten Luwu Utara | 2.41 | C- |
| 353 | Pemerintah Kabupaten Jayapura | 2.41 | C- |
| 354 | Pemerintah Kabupaten Kaimana | 2.40 | C- |
| 355 | Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan | 2.35 | C- |
| 356 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 2.31 | C- |
| 357 | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara | 2.30 | C- |
| 358 | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat | 2.28 | C- |
| 359 | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah | 2.27 | C- |
| 360 | Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya | 2.26 | C- |
| 361 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | 2.25 | C- |
| 362 | Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya | 2.19 | C- |
| 363 | Pemerintah Kabupaten Bungo | 2.18 | C- |
| 364 | Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya | 2.18 | C- |
| 365 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 2.18 | C- |
| 366 | Pemerintah Kabupaten Bantaeng | 2.14 | C- |
| 367 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud | 2.13 | C- |
| 368 | Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah | 2.10 | C- |
| 369 | Pemerintah Kabupaten Donggala | 2.06 | C- |
| 370 | Pemerintah Kabupaten Merauke | 2.06 | C- |
| 371 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 2.03 | C- |
| 372 | Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 2.01 | C- |
| 373 | Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama | 1.99 | D |
| 374 | Pemerintah Kabupaten Kupang | 1.97 | D |
| 375 | Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu | 1.96 | D |
| 376 | Pemerintah Kabupaten Buru Selatan | 1.96 | D |
| 377 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru | 1.84 | D |
| 378 | Pemerintah Kabupaten Sorong | 1.83 | D |
| 379 | Pemerintah Kabupaten Takalar | 1.76 | D |
| 380 | Pemerintah Kabupaten Nias Barat | 1.54 | D |
| 381 | Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni | 1.38 | E |
| 382 | Pemerintah Kabupaten Yahukimo | 1.16 | E |

| No | Instansi | Indeks | Kategori |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| 383 | Pemerintah Kabupaten Mappi | 1.13 | E |
| 384 | Pemerintah Kabupaten Nduga | N/A | N/A |
| 385 | Pemerintah Kabupaten Malaka | N/A | N/A |
| 386 | Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat | N/A | N/A |
| 387 | Pemerintah Kabupaten Supiori | N/A | N/A |
| 388 | Pemerintah Kabupaten Asmat | N/A | N/A |
| 389 | Pemerintah Kabupaten Boven Digoel | N/A | N/A |
| 390 | Pemerintah Kabupaten Deiyai | N/A | N/A |
| 391 | Pemerintah Kabupaten Dogiyai | N/A | N/A |
| 392 | Pemerintah Kabupaten Enrekang | N/A | N/A |
| 393 | Pemerintah Kabupaten Intan Jaya | N/A | N/A |
| 394 | Pemerintah Kabupaten Jayawijaya | N/A | N/A |
| 395 | Pemerintah Kabupaten Keerom | N/A | N/A |
| 396 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen | N/A | N/A |
| 397 | Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya | N/A | N/A |
| 398 | Pemerintah Kabupaten Luwu | N/A | N/A |
| 399 | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya | N/A | N/A |
| 400 | Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah | N/A | N/A |
| 401 | Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan | N/A | N/A |
| 402 | Pemerintah Kabupaten Maybrat | N/A | N/A |
| 403 | Pemerintah Kabupaten Mimika | N/A | N/A |
| 404 | Pemerintah Kabupaten Nabire | N/A | N/A |
| 405 | Pemerintah Kabupaten Paniai | N/A | N/A |
| 406 | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak | N/A | N/A |
| 407 | Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang | N/A | N/A |
| 408 | Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai | N/A | N/A |
| 409 | Pemerintah Kabupaten Puncak | N/A | N/A |
| 410 | Pemerintah Kabupaten Sarmi | N/A | N/A |
| 411 | Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan | N/A | N/A |
| 412 | Pemerintah Kabupaten Tambrauw | N/A | N/A |
| 413 | Pemerintah Kabupaten Toli Toli | N/A | N/A |
| 414 | Pemerintah Kabupaten Waropen | N/A | N/A |
| 415 | Pemerintah Kabupaten Yalimo | N/A | N/A |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN
DAERAH TAHUN 2025

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

| INDEKS | KATEGORI |
|-----------|----------|
| 4,51-5,00 | A |
| 4,01-4,50 | A- |
| 3,51-4,00 | B |
| 3,01-3,50 | B- |
| 2,51-3,00 | C |
| 2,00-2,51 | C- |
| 1,51-2,00 | D |
| 1,01-1,50 | E |
| 0,10-1,00 | F |

Keterangan:

N/A adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak menandatangani nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dengan Bupati Barito Selatan Tahun 2025.

Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah, Indikator Kinerja Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan target 66,00 / Baik. Rincian hasil evaluasi tahun 2024 dan 2025, dengan rincian sebagai berikut

| No. | Komponen/SubKomponen/ Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------|------------------------|
| | | | Tahun sebelumnya 2024 | Tahun Evaluasi 2025 |
| 01. | Perencanaan Kinerja | 30,00 | 22,60 | 22,80 |
| 02. | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 16,55 | 16,85 |
| 03. | Pelaporan Kinerja | 15,00 | 10,60 | 10,70 |
| 04. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 15,60 | 16,20 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 65,35 | 66,55 |
| Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | B | B |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025, Nomor : 700/39/LHE/INSP/2025, Tanggal 26 Mei 2025

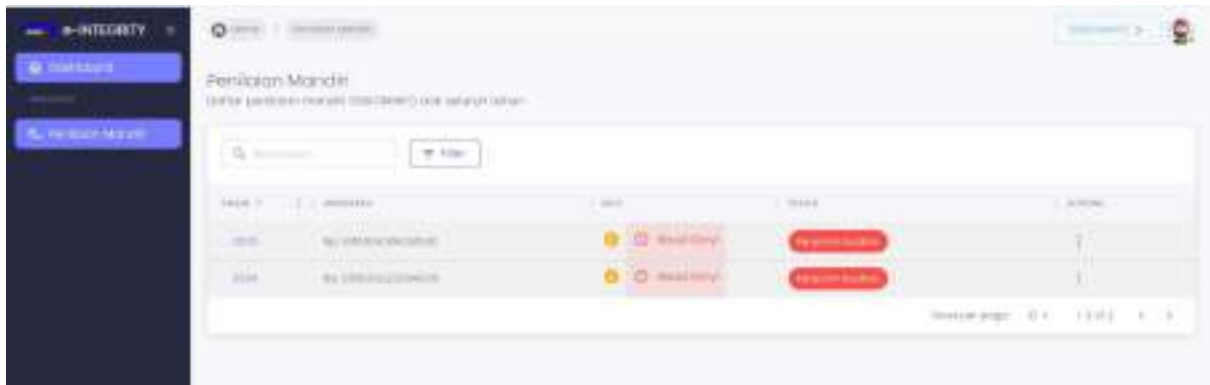
Capaian Indikator Kinerja hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan menggunakan interval nilai dalam skala pengukuran kriteria penilaiannya tinggi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{66,55}{66,00} \times 100\% = 100,75\%$$

Dari Penilaian capaian kinerja menurut pengukuran ordinal berdasarkan skala interval kategori sangat tinggi

Sasaran Strategis selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah, Indikator Kinerja Nilai dengan target nilai baik, 3,19.

Pada tahun 2025 ini, tidak dilaksanakan penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga tidak terdapat capaian nilai SPIP yang dapat dilaporkan. Penilai SPIP berstatus Penjamin Kualitas yang terlampir pada bukti dukung SPIP sebagai berikut:



Gambar 1 Bukti dukung Penilaian SPIP

Sasaran Strategis selanjutnya adalah Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target 78,50. Hasil capaian evaluasi keterbukaan informasi publik untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan informatif dengan skor nilai 90,19.

Capaian Indikator Kinerja hasil evaluasi keterbukaan publik dengan menggunakan interval nilai dalam skala pengukuran kriteria penilaiannya tinggi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{90,19}{78,50} \times 100\% = 114,89\%$$

Dari Penilaian capaian kinerja menurut pengukuran ordinal berdasarkan skala interval kategori sangat tinggi



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 095.1/KEP/ KI
KALTENG/X/2025

TENTANG

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
 - b. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
 - c. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik sebagai sarana memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, maka perlu diadakan pemeringkatan atas hasil evaluasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4),
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli 2022.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: **KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025;**
- KEDUA : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025, yang dilaksanakan dengan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri empat kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan terhadap badan publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak dapat diganggu gugat;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 **KATEGORI INFORMATIF**

A. Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

| No. | OPD Provinsi | Nilai |
|-----|---|-------|
| 1. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 94,60 |
| 2. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 94,09 |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 93,20 |
| 4. | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 92,94 |
| 5. | Badan Kepegawaian Daerah | 92,71 |
| 6. | Dinas Kesehatan | 92,37 |
| 7. | Dinas Pendidikan | 92,24 |
| 8. | Dinas Perhubungan | 92,19 |
| 9. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 92,15 |
| 10. | Biro Administrasi Pimpinan Setda | 92,12 |
| 11. | Biro Umum Setda | 92,11 |
| 12. | Inspektorat Daerah | 92,09 |
| 13. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 91,97 |
| 14. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 91,54 |
| 15. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 90,91 |
| 16. | Sekretariat DPRD | 90,46 |
| 17. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 90,37 |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 90,22 |
| 19. | Dinas Kehutanan | 90,14 |
| 20. | Biro Administrasi Pembangunan Setda | 90,05 |

B. Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah

| No. | Badan Publik Vertikal | Nilai |
|-----|--|-------|
| 1. | Badan Pusat Statistik | 95,17 |
| 2. | Balai Besar POM Palangka Raya | 95,14 |
| 3. | BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah | 92,14 |
| 4. | Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya | 91,74 |
| 5. | Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya | 91,03 |
| 6. | Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah | 90,35 |
| 7. | KPU Provinsi Kalimantan Tengah | 90,29 |
| 8. | Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah | 90,03 |

C. Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|------------------------------|-------|
| 1. | Kota Palangka Raya | 94,29 |
| 2. | Kabupaten Kapuas | 93,72 |
| 3. | Kabupaten Kotawaringin Timur | 93,63 |
| 4. | Kabupaten Katingan | 91,13 |
| 5. | Kabupaten Lamandau | 91,02 |
| 6. | Kabupaten Gunung Mas | 90,24 |
| 7. | Kabupaten Barito Selatan | 90,19 |

D. Badan Publik PPID Badan Kepemiluan

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur | 93,43 |
| 2. | Bawaslu Kota Palangka Raya | 93,17 |
| 3. | Bawaslu Kabupaten Seruyan | 91,97 |
| 4. | KPU Kabupaten Seruyan | 91,46 |
| 5. | Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau | 91,27 |
| 6. | Bawaslu Kabupaten Sukamara | 90,33 |
| 7. | Bawaslu Kabupaten Barito Timur | 90,29 |
| 8. | Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat | 90,09 |
| 9. | Bawaslu Kabupaten Murung Raya | 90,03 |

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

Lampiran II
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah
Nomor : 095.1/KEP/ KI KALTENG/X/2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 **KATEGORI MENUJU INFORMATIF**

A. Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

| | OPD Provinsi | Nilai |
|----|--|-------|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 86,25 |
| 2. | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 84,80 |
| 3. | RSJ Kalawa Atei | 83,25 |
| 4. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 82,80 |
| 5. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 82,00 |
| 6. | Biro Kesejahteraan Rakyat Setda | 81,90 |

B. Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | Badan Publik Vertikal | Nilai |
|----|--|-------|
| 1. | RRI Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah | 84,20 |

C. Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|------------------------------|-------|
| 1. | Kabupaten Kotawaringin Barat | 80,05 |

D. Badan Publik PPID Badan Kepemiluan

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Bawaslu Kabupaten Barito Utara | 89,00 |
| 2. | Bawaslu Kabupaten Barito Selatan | 87,75 |
| 3. | KPU Kota Palangka Raya | 84,65 |

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 **KATEGORI CUKUP INFORMATIF**

A. Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | OPD Provinsi | Nilai |
|-----|---|-------|
| 1. | Dinas Perkebunan | 79,50 |
| 2. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan | 79,45 |
| 3. | RSUD dr. Doris Sylvanus | 77,35 |
| 4. | Dinas Lingkungan Hidup | 75,80 |
| 5. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 75,50 |
| 6. | Biro Perekonomian Setda | 72,70 |
| 7. | Biro Organisasi Setda | 70,20 |
| 8. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 68,60 |
| 9. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 68,05 |
| 10. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 65,75 |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | 60,60 |

B. Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | Badan Publik Vertikal | Nilai |
|----|-------------------------------------|-------|
| 1. | Kanwil Kementerian Agama | 79,85 |
| 2. | Kanwil Kementerian ATR/BPN | 70,55 |
| 3. | BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya | 67,30 |

C. Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Kabupaten Pulang Pisau | 79,35 |
| 2. | Kabupaten Sukamara | 70,65 |
| 3. | Kabupaten Seruyan | 65,20 |

D. Badan Publik PPID Badan Kepemiluan

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|------------------------------|-------|
| 1. | Bawaslu Kabupaten Kapuas | 79,90 |
| 2. | Bawaslu Kabupaten Lamandau | 70,40 |
| 3. | Bawaslu Kabupaten Gunung Mas | 69,50 |
| 4. | KPU Kabupaten Barito Selatan | 61,85 |

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

Lampiran IV
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah
Nomor : 095.1/KEP/ KI KALTENG/X/2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 **KATEGORI KURANG INFORMATIF**

A. Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | OPD Provinsi | Nilai |
|----|--|-------|
| 1. | Dinas Ketahanan Pangan | 50,65 |
| 2. | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda | 49,00 |
| 3. | Badan Pendapatan Daerah | 48,68 |

B. Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | Badan Publik Vertikal | Nilai |
|----|---|-------|
| 1. | Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah | 49,75 |

C. Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

| | Kabupaten / Kota | |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Kabupaten Murung Raya | 53,85 |
| 2. | Kabupaten Barito Timur | 48,60 |

D. Badan Publik PPID Badan Kepemiluan

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|----------------------------|-------|
| 1. | KPU Kabupaten Barito Timur | 43,50 |

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

Lampiran V
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 095.1/KEP/ KI KALTENG/X/2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025 **KATEGORI TIDAK INFORMATIF**

A. Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | OPD Provinsi | Nilai |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1. | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda | 35,50 |
| 2. | RSUD Hanau | 31,80 |
| 3. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 20,85 |
| 4. | Dinas Sosial | 12,43 |
| 5. | Badan Penghubung Pemda di Jakarta | 0 |
| 6. | Biro Hukum Setda | 0 |

B. Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

| No | Badan Publik Vertikal | Nilai |
|----|--|-------|
| 1. | BPTD Kelas II Kalimantan Tengah | 35,25 |
| 2. | Kanwil Kementerian Imigrasi Provinsi Kalimantan Tengah | 27,75 |

C. Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Kabupaten Barito Utara | 19,85 |

D. Badan Publik PPID Badan Kepemiluan

| No | Kabupaten / Kota | Nilai |
|----|----------------------------------|-------|
| 1. | Bawaslu Kabupaten Katingan | 37,30 |
| 2. | KPU Kabupaten Kotawaringin Timur | 6,00 |
| 3. | KPU Kabupaten Gunung Mas | 0,30 |

Ketua,



Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

Sasaran strategis selanjutnya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator Kinerja persentase Proporsi Desa/ Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat dengan target 40%.

Hasil capaian evaluasi persentase Proporsi Desa/ Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat dengan pencapaian 65,59%.

Capaian Indikator Kinerja hasil evaluasi persentase Proporsi Desa/ Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat dengan menggunakan interval nilai dalam skala pengukuran kriteria penilaiannya tinggi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{65,59}{40,00} \times 100\% = 163,97\%$$

Dari Penilaian capaian kinerja menurut pengukuran ordinal berdasarkan skala interval kategori sangat tinggi

DATA TITIK BASE TRANSCIVER STATION (BTS) DAN DATA TITIK BLANKSPOT
KABUPATEN BARITO SELATAN

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Latitude | Longitude | Provider | Kategori Kekuatan Sinyal |
|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.7145 | 114.84969 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 2 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.7157111 | 114.859 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 3 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.72204 | 114.846 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 4 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.715535 | 114.843826 | Telkomsel dan XL | Sinyal Kuat |
| 5 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.71785 | 114.85338 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 6 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.715282 | 114.847674 | Telkomsel dan Indosat | Sinyal Kuat |
| 7 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.71691 | 114.8382 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 8 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.71057 | 114.87049 | Telkomsel dan Indosat | Sinyal Kuat |
| 9 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.71904 | 114.83244 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 10 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUNTOK KOTA | -1.7209074 | 114.8312531 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 11 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.72825 | 114.83653 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 12 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.7223 | 114.8358 | Telkomsel, XL, dan Indosat | Sinyal Kuat |
| 13 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.7226913 | 114.8330612 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.7198 | 114.83886 | Indosat | Sinyal Kuat |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.72115 | 114.8423 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 16 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.72899 | 114.84248 | Telkomsel dan XL | Sinyal Kuat |
| 17 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | HILIR SPER | -1.7345111 | 114.8435611 | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 18 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | JELAPAT | -1.7362 | 114.83162 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | JELAPAT | -1.7434376 | 114.8268098 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 20 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | PAMANGKA | -1.689867 | 114.967072 | XL | Sinyal Lemah |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | SABABILAH | -1.698027 | 114.920241 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 22 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | SABABILAH | -1.6862516 | 114.9076006 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 23 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | SABABILAH | -1.686528 | 114.909873 | XL | Sinyal Lemah |
| 24 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | MANGARIS | -1.72961 | 114.967128 | XL | Sinyal Kuat |
| 25 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DANAU SADAR | -1.7835467 | 114.818225 | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 26 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BARU | -1.77948 | 114.80412 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 27 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DANGKA | 1.639895 | 115.034823 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 28 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | MUARA TALANG | -1.7954583 | 114.788045 | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 29 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | TELUK MAMPUN | -1.596402 | 114.83554 | XL | Sinyal Kuat |
| 30 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | LEMBENG | -1.651318 | 114.845682 | XL | Sinyal Kuat |
| 31 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | PENDA ASAM | -1.629049 | 114.8421265 | XL | Sinyal Lemah |
| 32 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | PENDA ASAM | -1.6290603 | 114.8421407 | Telkomsel dan Indosat | Sinyal Kuat |
| 33 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | MURUNG PAKEN | -1.682721 | 114.770996 | XL | Sinyal Kuat |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 34 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BALABEN | -1.842333 | 115.81418 | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 35 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | TEPE LARANG | -1.964143 | 115.908218 | XL | Sinyal Lemah |
| 36 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BARBARA | -1.880618 | 116.7115717 | XL | Sinyal Lemah |
| 37 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | TELANG ANDRAU | -1.80768 | 115.80015 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 38 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DANAU GANTING | - | - | - | Sinyal Lemah |
| 39 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | PAMUK | - | - | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 40 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | TELUK TELAGA | - | - | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 41 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | SANWEL | - | - | - | Sinyal Lemah |
| 42 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DANAU MASURA | - | - | - | Blankspot |
| 43 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | BUKAR RUPUS | - | - | - | Blankspot |
| 44 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | PABARPAK | - | - | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 45 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | TANJUNG LIRANG | - | - | - | Blankspot |
| 46 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | MARJUN | - | - | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 47 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DUSUN PABIK | - | - | - | Blankspot |
| 48 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DUSUN SAMBALER | - | - | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 49 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DUSUN MAMANTAM | - | - | - | Blankspot |
| 50 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN SELATAN | DUSUN DANAU RUTUH | - | - | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 51 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PENDANG | 114° 51' 15.27" | 01° 30' 37.37" | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 52 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PENDANG | 114° 51' 14.97" BT | 01° 30' 37.37" LS | Indosat | Sinyal Lemah |
| 53 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PENDANG | - | - | XL | Sinyal Lemah |
| 54 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | MUNDU TELANG | 1.906271 | 115.845092 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 55 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | MALINDRE | -1.553658 | 115.917128 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 56 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | BUNDIR | 1.87902 | 115.916077 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 57 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | TALIKOI | - | - | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 58 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | MARJAN LAMA | 1.451968 | 114.884739 | Telkomsel, XL, dan Indosat | Sinyal Lemah |
| 59 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | MARJAN BARU | 1.4318373 | 114.884558 | Telkomsel, XL, dan Indosat | Sinyal Kuat |
| 60 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | REONG | 1.409007 | 115.913773 | XL | Sinyal Lemah |
| 61 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | TARUSAN | - | - | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 62 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PANAYUKAN | - | - | Telkomsel | Sinyal Lemah |
| 63 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | MARJUN | 1.427889 | 115.9168 | Indosat | Sinyal Kuat |
| 64 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PENDANG | 1.87751 | 115.916175 | Indosat | Sinyal Kuat |
| 65 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | DANAU MARJUN | 1.430679 | 115.91359 | Indosat | Sinyal Kuat |
| 66 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | TAMPARAK | -1.45108 | 115.9668 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 67 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | SELU TAMPAK | 1.346813 | 115.915765 | Indosat | Sinyal Lemah |
| 68 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | SANTAI BAMBURE | 115° 08' 50.9" BT | 01° 24' 01.5" LS | Indosat | Sinyal Kuat |
| 69 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | SANTAI BAMBURE | 115° 08' 50.7" BT | 01° 24' 01.7" LS | XL | Sinyal Kuat |
| 70 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | SANTAI BAMBURE | - | - | Telkomsel | Sinyal Kuat |
| 71 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN UTARA | PAMPA MEA | 1.35138 | 115.12941 | Indosat | Sinyal Kuat |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 72 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DULIN UTARA | BARU PANTAU | 3.421446 | 114.913281 | RI | Sangat Lemah |
| 73 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DULIN UTARA | TAMPARAI LARUNG | 125.085947 | 01.2259167 | Teknologi | Sangat Lemah |
| 74 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DULIN UTARA | TAMPARAI LARUNG | 3.4547 | 115.18892 | Indosat | Sangat Lemah |
| 75 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | BANGSIANG | 128.513247 | 02.005927 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 76 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | BANGSIANG | 134°53'36.0"BT | 02°00'24.4"LS | Indosat | Sangat Kuat |
| 77 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | BANGSIANG | 134°53'30.4"BT | 02°00'28.1"LS | RI | Sangat Kuat |
| 78 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | TELUK BETUNG | - | - | Teknologi | Sangat Kuat |
| 79 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | NOBU | 134°51'08.6"BT | 01°54'30.5"LS | Indosat | Sangat Kuat |
| 80 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | NOBU | 134°51'11.8"BT | 01°54'41.4"LS | RI | Sangat Lemah |
| 81 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | MUSU | 3.416807 | 114.889362 | RI | Sangat Lemah |
| 82 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | MALITIN | 3.406229 | 114.882823 | RI | Sangat Lemah |
| 83 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | MUMBAHIN | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 84 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | TALJO | 3.446828 | 114.834037 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 85 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | TALJO | 1.6477943 | 114.832058 | RI | Sangat Lemah |
| 86 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | TAMPARAI | 3.451308 | 114.8051474 | RI | Sangat Lemah |
| 87 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | BUNANG HULUNG | 3.449985 | 114.7399827 | RI | Sangat Lemah |
| 88 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | TELUK SAMPIUDAI | 3.438148 | 114.734851 | RI | Sangat Kuat |
| 89 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | KARAU KUALA | DUSUN DAMPAI HEKAMP | - | - | RI | Sangat Lemah |
| 90 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIP | 134.505517 | 02.125187 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 91 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIP | 134.5125.97 | 02.12.82.87 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 92 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIP | 134°50'55.3"BT | 02°12'56.0"LS | Indosat | Sangat Lemah |
| 93 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIP | 134°51'00.5"BT | 02°13'31.0"LS | RI | Sangat Lemah |
| 94 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | BUNANG MUKA | - | - | Blankspot | - |
| 95 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MAHA MUKA | 3.371813 | 114.839226 | RI | Sangat Lemah |
| 96 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | KALAWI | - | - | Blankspot | - |
| 97 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | LEHAI | - | - | Indosat | Sangat Lemah |
| 98 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | SAMPARAN | 134.5136.17 | 02.08.81.87 | Teknologi | Sangat Lemah |
| 99 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | TELUK TIBISAU | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 100 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | SATELAP | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 101 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | NATAMPANG | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 102 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | DUSUN HILIR | MANGKATIP | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 103 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | BARITAU KULANG | 133.5436.17 | 02.18.45.27 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 104 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | BARITAU KULANG | 134°54'46.8"BT | 02°20'56.0"LS | Indosat | Sangat Kuat |
| 105 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | TAMPULANG | 2.452408 | 114.880351 | RI | Sangat Lemah |
| 106 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | BARITAU BAHUANG | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 107 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | JENAMAS | PANDEGA ILUNG | 134.5131.87 | 02.19.21.87 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 108 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | TAGUK KABLAR | 115.0231.87 | 01.3238.97 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 109 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | TAGUK KABLAR | 115°02'41.8"BT | 01°32'31.2"LS | Indosat | Sangat Kuat |
| 110 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | BARJANG | 1.548032 | 114.075243 | Indosat | Sangat Kuat |
| 111 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | KAYUMBAN | - | - | - | Blankspot |
| 112 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | SARIMBLAH | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 113 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | SAGUTUR | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 114 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | MUKA HAI | - | - | Indosat | Sangat Lemah |
| 115 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | SPE | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 116 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | MUJABA MENDAN | 3.407887 | 115.25303 | Indosat | Sangat Lemah |
| 117 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PATAS I | 115.0231.47 | 01.3126.47 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 118 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PATAS I | 115°02'37.7"BT | 01°32'01.7"LS | Indosat | Sangat Kuat |
| 119 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PATAS I | 115°02'39.0"BT | 01°32'32.8"LS | RI | Sangat Lemah |
| 120 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PATAS I | - | - | Indosat | Sangat Kuat |
| 121 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | BINTANG ARA | - | - | Indosat | Sangat Lemah |
| 122 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | LEGANG SARU | 115.0208.57 | 01.3834.87 | Teknologi | Sangat Kuat |
| 123 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | LEGANG SARU | 115°02'30.7"BT | 01°38'01.5"LS | Indosat | Sangat Lemah |
| 124 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | LEGANG SARU | 115°02'30.7"BT | 01°38'01.5"LS | RI | Sangat Lemah |
| 125 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | LEGANG SARU | 115°02'30.7"BT | 01°38'01.5"LS | Indosat | Sangat Lemah |
| 126 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | NOJIB | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 127 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PUNGGUR BARU | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 128 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | BRUK SRI | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 129 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | MAL (MARI) PATE | 3.439887 | 115.255031 | Indosat | Sangat Kuat |
| 130 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | SELPATRY | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 131 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | PALUPED | - | - | Teknologi, RI, dan Indosat | Sangat Kuat |
| 132 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | RAYIBU | - | - | Teknologi | Sangat Lemah |
| 133 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | MARDA JAYA | - | - | - | Blankspot |
| 134 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | BUNING NYA | - | - | Teknologi | Blankspot |
| 135 | KALIMANTAN TENGAH | BARITO SELATAN | GUNUNG BINTANG IMAI | DULIN BUKI | - | - | - | Blankspot |

KETERANGAN:

1. TITIK BLANKSPOT : 11 DESA
2. TITIK SINYAL LEMAH : 63 DESA
3. TITIK SINYAL KUAT : 43 DESA

Sasaran strategis selanjutnya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Indikator Kinerja indeks SPBE dengan target indeks 2,8 / Baik.

Hasil capaian evaluasi indeks SPBE dengan pencapaian 3,67. Capaian Indikator Kinerja Utama hasil evaluasi indeks SPBE dengan menggunakan interval nilai dalam skala pengukuran dengan kriteria penilaiannya tinggi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{3,67}{2,8} \times 100\% = 131,07\%$$

Dari Penilaian capaian kinerja menurut pengukuran ordinal berdasarkan skala interval kategori sangat tinggi

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025



PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

Produk

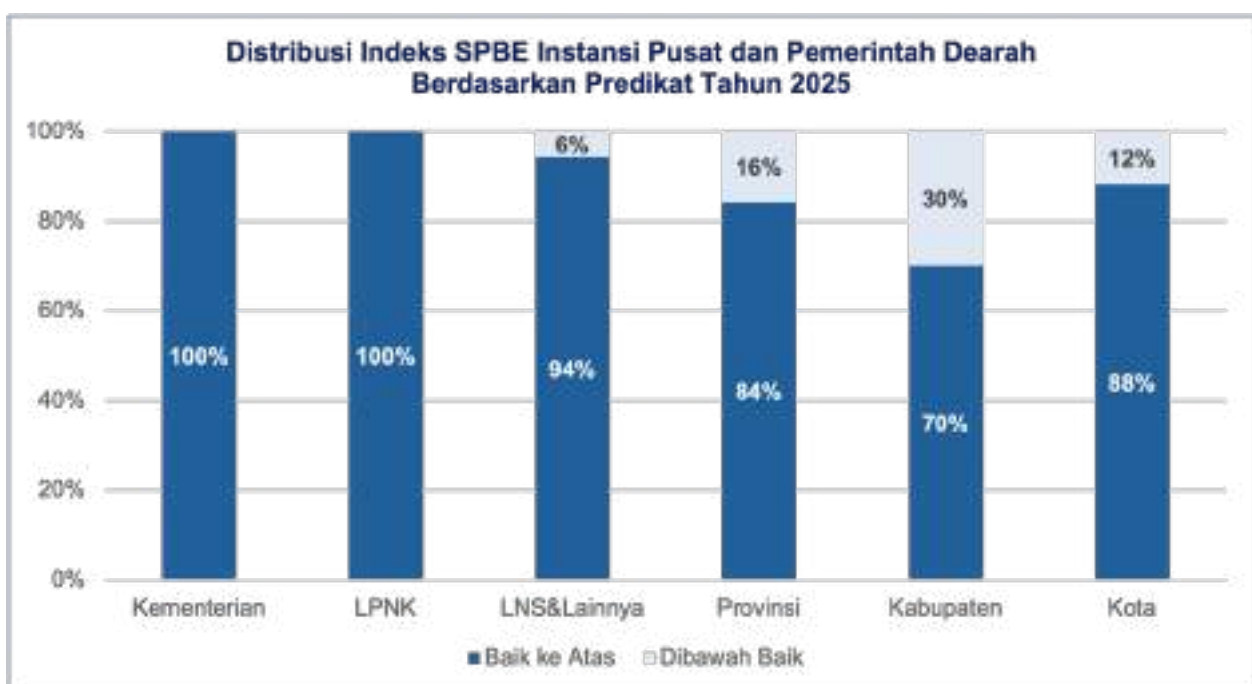


PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

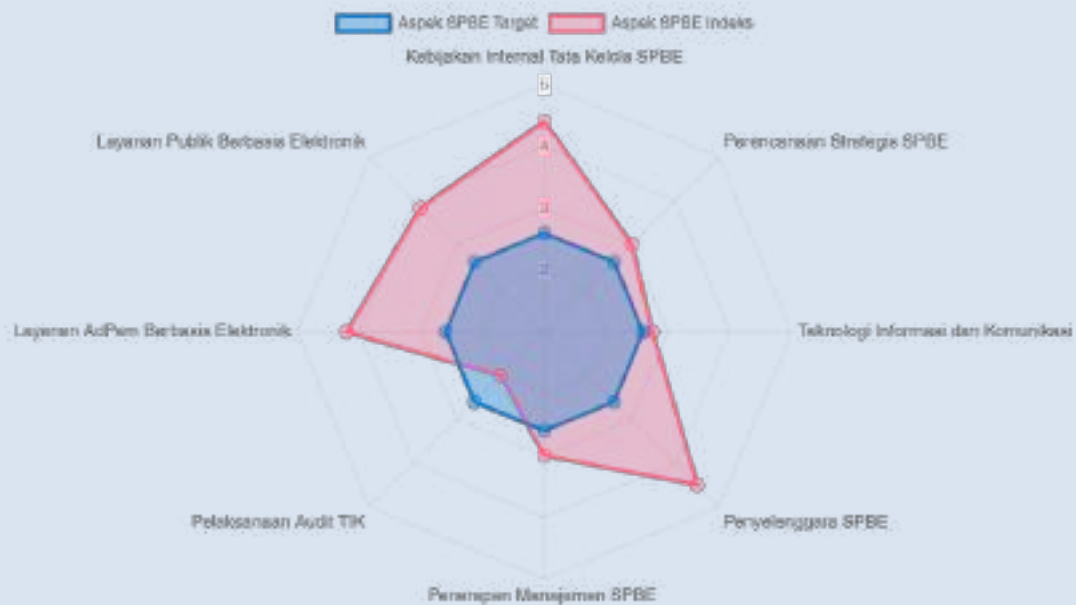
| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot | Predikat Indeks SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------|--------------|----------|---|-----------|-----------|---|-------------|-------------|---|-------------|---------|---|-------------|-------|---|-------|--------|--|--|
| Domain 1 - Kebijakan SPBE | 13% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> | NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT | 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan | 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik | 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik *) | 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup | 5 | < 1,8 | Kurang | | |
| NO | NILAI INDEKS | | PREDIKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4,2 – 5,0 | | Memuaskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | | Sangat Baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | | Baik *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | < 1,8 | Kurang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 3 - Manajemen SPBE | 16,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 6 - Audit TIK | 4,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domain 4 - Layanan SPBE | 45,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek 8 - Layanan Publik | 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

| Indeks | Nasional | Kementerian | LPNK | LNS dan Lainnya | Provinsi | Kabupaten | Kota |
|------------------------------|----------|-------------|------|-----------------|----------|-----------|------|
| SPBE | 3.23 | 4.09 | 3.95 | 3.34 | 3.55 | 2.99 | 3.52 |
| Kebijakan Tata Kelola | 3.48 | 4.37 | 4.24 | 3.54 | 3.82 | 3.24 | 3.73 |
| Kebijakan Tata Kelola | 3.48 | 4.37 | 4.24 | 3.54 | 3.82 | 3.24 | 3.73 |
| Tata Kelola | 2.76 | 3.96 | 3.83 | 3.08 | 3.24 | 2.39 | 3.13 |
| Perencanaan | 2.56 | 3.84 | 3.88 | 2.96 | 3.11 | 2.20 | 2.83 |
| TIK | 2.87 | 4.02 | 3.85 | 3.10 | 3.33 | 2.51 | 3.30 |
| Penyelenggara | 2.92 | 4.07 | 3.70 | 3.31 | 3.36 | 2.55 | 3.41 |
| Manajemen | 2.00 | 2.91 | 2.85 | 2.28 | 2.38 | 1.73 | 2.24 |
| Manajemen | 2.06 | 2.99 | 2.91 | 2.37 | 2.43 | 1.78 | 2.32 |
| Audit | 1.84 | 2.70 | 2.68 | 2.05 | 2.22 | 1.60 | 2.04 |
| Layanan SPBE | 3.87 | 4.50 | 4.34 | 3.81 | 4.07 | 3.70 | 4.13 |
| Layanan Adm. Pemerintahan | 3.85 | 4.42 | 4.29 | 3.87 | 4.02 | 3.70 | 4.07 |
| Layanan Publik | 3.90 | 4.83 | 4.43 | 3.71 | 4.16 | 3.69 | 4.23 |



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



| Nama Indeks | Nilai 2025 |
|--|-------------|
| SPBE | 3,67 |
| Domain Kebijakan SPBE | 4,40 |
| <i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i> | 4,40 |
| Domain Tata Kelola SPBE | 3,20 |
| <i>Perencanaan Strategis SPBE</i> | 3,00 |
| <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i> | 2,75 |
| <i>Penyelenggara SPBE</i> | 4,50 |
| Domain Manajemen SPBE | 2,73 |
| <i>Penerapan Manajemen SPBE</i> | 3,00 |
| <i>Audit TIK</i> | 2,00 |
| Domain Layanan SPBE | 4,05 |
| <i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | 4,20 |
| <i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i> | 3,83 |

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

| No | Indikator | Nilai Tingkat Kematangan 2025 |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 5 |
| 2 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 |
| 3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data | 4 |
| 4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE | 5 |
| 5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data | 5 |
| 6 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 |
| 7 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 |
| 8 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi | 5 |
| 9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK | 4 |
| 10 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 |
| 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 3 |
| 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 4 |
| 13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE | 3 |
| 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | 2 |
| 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 3 |
| 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | 4 |

| | | |
|----|--|---|
| 17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 2 |
| 18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 2 |
| 19 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 5 |
| 20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | 4 |
| 21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | 3 |
| 22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 3 |
| 23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | 4 |
| 24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | 3 |
| 25 | Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE | 2 |
| 26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan | 3 |
| 27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan | 2 |
| 28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | 4 |
| 29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE | 1 |
| 30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE | 3 |
| 31 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE | 2 |
| 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan | 5 |
| 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran | 5 |
| 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan | 5 |
| 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 5 |

| | | |
|----|--|---|
| 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian | 4 |
| 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis | 5 |

| | | |
|----|--|---|
| 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah | 3 |
| 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah | 3 |
| 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 4 |
| 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai | 3 |
| 42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 |
| 43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | 4 |
| 44 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | 4 |
| 45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 | 3 |
| 46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 | 4 |
| 47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 | 4 |

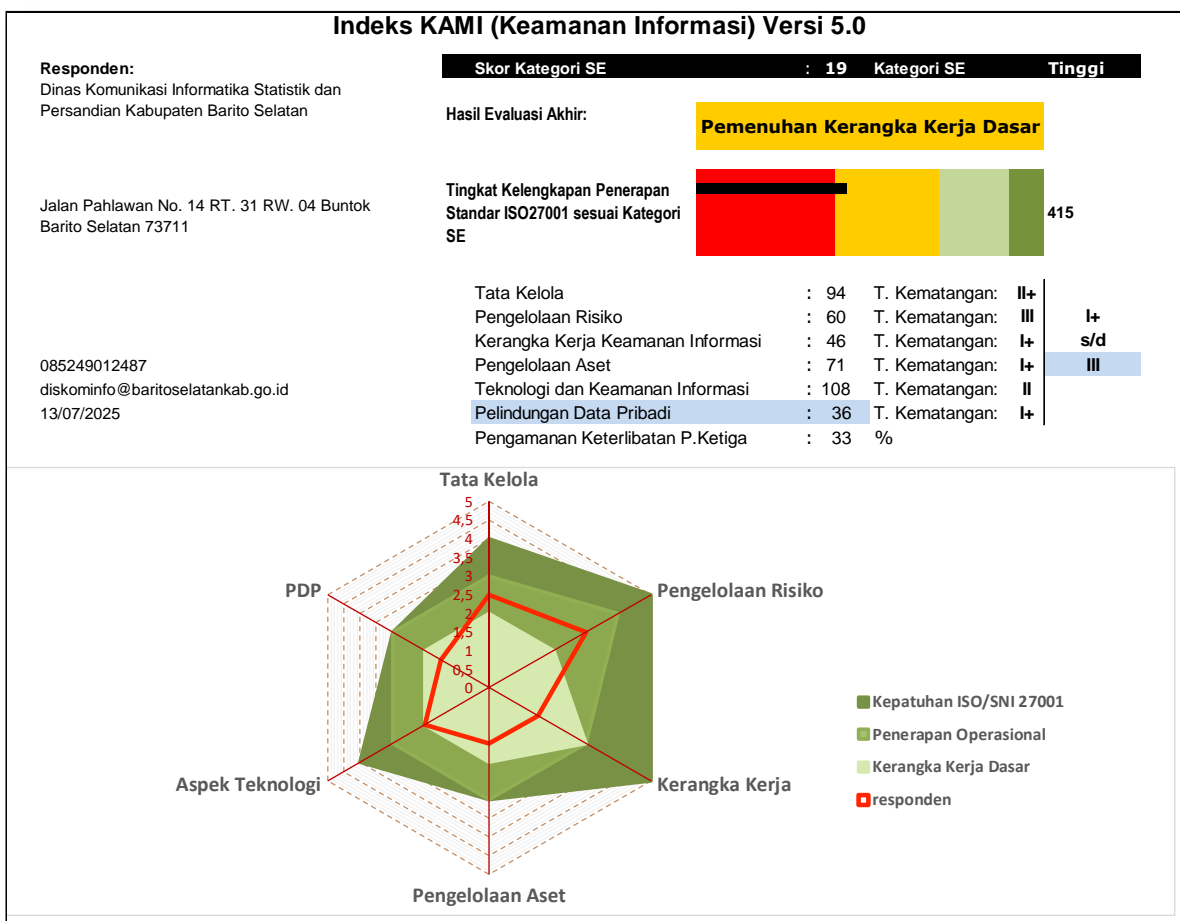


Sasaran strategis selanjutnya Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, Indikator Kinerja indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 2,90.

Hasil capaian evaluasi Kinerja indeks Pembangunan Statistik Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan, sehingga tidak terdapat capaian nilai yang dapat dilaporkan.

Sasaran strategis terakhir adalah Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja nilai Tingkat kematangan keamanan Informasi dengan target indeks Tingkat I.




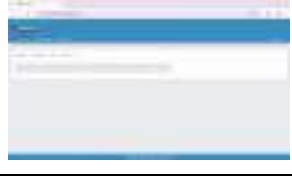


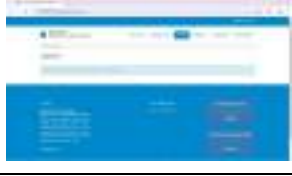

Hasil capaian evaluasi Tingkat kematangan keamanan Informasi dengan pencapaian Tingkat I+.



3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

- a. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi yaitu sebagai berikut:

Jumlah Layanan Publik Secara Online Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

| No | Perangkat Daerah | Layanan Publik secara online | Keterangan |
|----|---|---|---|
| 1. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Layanan Kearsipan SRIKANDI |  |
| 2. | Sekretariat Daerah | Layanan Informasi Hukum Daerah JDIH |  |
| 3. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Layanan Informasi Kepegawaian SIMPEG |  |
| 4. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Layanan Kinerja Pegawai eKinerja |  |
| 5. | Sekretariat Daerah | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPSE |  |
| 6. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Pengaduan Publik LAPOR SP4N |  |
| 7. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Administrasi Desa Website Desa |  |
| 8. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Posyandu ePOSYANDU | https://eposyandu.layanan.go.id |
| 9. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Layanan Perijinan Terpadu SICANTIK |  |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 10. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Informasi Publik PPID |  |
| 11. | DINAS DUKCAPIL | Layanan Kependudukan siduta.dukcapil | https://siduta.dukcapil.baritoselatankab.go.id |
| 12. | BAPPEDA | Layanan Publik SIGERA | |
| 13. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian x Dinas Terkait | Layanan Publikasi Dinas Terkait Website Profil Dinas | |
| 14. | Bappeda dan BPKAD | Layanan Publik SIPD | |
| 15. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Kepegawaian Aplikasi Presensi | |
| 16. | BPKAD | Layanan Kepegawaian Simb@da 2020 | |
| 17. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Layanan Publik SIMDATIK SEKTORAL | |
| 18. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Layanan Kepegawaian ALAP | |
| 19. | Bappeda | Layanan Publik Geoportal | |
| 20. | Dinas Kesehatan | Layanan Publik KESLING | |

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



MAREANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

- b. Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut:

Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

| IKK OUTCOME | IKK | Rumus/ Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|---|-------|--|---------|----------------------|
| Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh KominfoSP | 2.o.1 | $\frac{\text{Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$ $\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$ | 100 % | Bidang Kominfosantik |

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PESANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Berupa

| NO. | ID FINGERSPOT | KODE OPD | IP VPN SERVER | IP VPN CLIENT | IP ADDRESS FINGERSPOT | NAMA OPD | LAYANAN INTERNET (Astinet/Lite/Indi/Wifi.id) |
|-----|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|--|--|
| | 1 | | | | 192.168.110.1 | MAIN GATEWAY/ROUTER | |
| 1 | 2 | 4.5.07.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.2 | 192.168.110.2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Lite |
| 2 | 3 | 1.5.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.4 | 192.168.110.2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Wifi.id |
| 3 | 4 | 1.6.01.01 | 192.168.111.5 | 192.168.111.6 | 192.168.110.4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Indihome |
| 4 | 5 | 4.4.05.01 | 192.168.111.7 | 192,168,100,2 | 192.168.110.5 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Lite |
| 5 | 6 | 4.3.01.01 | 192.168.111.9 | 192.168.111.1 | 192.168.110.6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Wifi.id |
| 6 | 7 | 2.6.01.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.1 | 192.168.110.7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Lite |
| 7 | 8 | 1.2.01.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.1 | 192.168.110.4 | DINAS KESEHATAN | Lite |
| 8 | 9 | 2.3.01.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.1 | 192.168.110.9 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (Unit 1) | Lite |
| 9 | 10 | 2.3.01.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.1 | 192.168.110.1 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (Unit 2) | Lite |
| 10 | 11 | 2.10.01.01 | 192.168.111.1 | 192.168.111.2 | 192.168.110.2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Astinet |
| 11 | 12 | 2.5.01.01 | 192.168.111.2 | 192.168.111.2 | 192.168.110.1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Lite |
| 12 | 13 | 1.3.01.01 | 192.168.111.2 | 192.168.111.2 | 192.168.110.1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Lite |
| 13 | 14 | 2.16.01.01 | 192.168.111.2 | 192.168.111.2 | 192.168.110.1 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | Lite |
| 14 | 15 | 2.12.01.01 | 192.168.111.2 | 192.168.111.2 | 192.168.110.1 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Lite |
| 15 | 16 | 1.1.01.01 | 192.168.111.2 | 192.168.111.3 | 192.168.110.1 | DINAS PENDIDIKAN | Lite |
| 16 | 17 | 2.8.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.3 | 192.168.110.1 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | Speedy Gold |
| 17 | 18 | 2.11.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.3 | 192.168.110.3 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | Speedy Reg |
| 18 | 19 | 2.9.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.3 | 192.168.110.1 | DINAS PERHUBUNGAN | Lite |
| 19 | 20 | 2.17.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.3 | 192.168.110.2 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Lite |
| 20 | 21 | 1.4.01.01 | 192.168.111.3 | 192.168.111.4 | 192.168.110.2 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | Indihome |
| 21 | 22 | 2.7.01.01 | 192.168.111.4 | 192.168.111.4 | 192.168.110.2 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Wifi.id |
| 22 | 23 | 2.1.01.01 | 192.168.111.4 | 192.168.111.4 | 192.168.110.1 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Wifi.id |
| 23 | 24 | 4.2.01.01 | 192.168.111.4 | 192.168.111.4 | 192.168.110.1 | INSPEKTORAT | Wifi.id |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------|
| 24 | 25 | 4.1.11.01 | 192.168.111.4 7 | 192.168.111.4 8 | 192.168.110.2 5 | KECAMATAN DUSUN HILIR | 4G |
| 25 | 26 | 4.1.10.01 | 192.168.111.4 9 | 192.168.111.5 0 | 192.168.110.2 4 | KECAMATAN DUSUN SELATAN | Indihome |
| 26 | 27 | 4.1.12.01 | 192.168.111.5 1 | 192.168.111.5 2 | 192.168.110.2 7 | KECAMATAN DUSUN UTARA | 4G |
| 27 | 28 | 4.1.13.01 | 192.168.111.5 3 | 192.168.111.5 4 | 192.168.110.2 8 | KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI | 4G |
| 29 | 29 | 4.1.15.01 | 192.168.111.5 5 | 192.168.111.5 6 | 192.168.110.2 9 | KECAMATAN JENAMAS | - |
| 30 | 30 | 4.1.14.01 | 192.168.111.5 7 | 192.168.111.5 8 | 192.168.110.3 0 | KECAMATAN KARAU KUALA | 4G |
| 31 | 38 | 1.5.02.01 | 192.168.111.7 3 | 192.168.111.7 4 | 192.168.110.3 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Wifi.id |
| 32 | 39 | 1.5.02.01 | 192.168.111.7 5 | 192.168.111.7 6 | 192.168.110.3 9 | PEMADAM KEBAKARAN | Wifi.id |
| 33 | 40 | 4.1.03.01 | 192.168.111.7 7 | 192.168.111.7 0 | 192.168.110.3 6 | SEKRETARIAT DAERAH | Astinet |
| 34 | 41 | 4.1.04.01 | 192.168.111.7 9 | 192.168.111.8 0 | 192.168.110.8 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Wifi.id |
| | | | | | | JUMLAH | |

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PESANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

- c. Persentase Masalah menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Persentase Masyarakat Menjadi Sasaran Informasi Publik

| IKK OUTCOME | IKK | Rumus/ Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|--|-------|---|---------|----------------|
| Persentase Masyarakat Menjadi Sasaran Informasi Publik | 2.o.3 | $\frac{\text{Masyarakat Menjadi Sasaran Informasi Publik}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$ $\frac{99.011}{99.011} \times 100 = 100 \%$ | 100 % | Bidang Kominfo |

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

**Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan Usia 15
Sampai Dengan 64 Tahun**

| NO | STRUKTUR UKUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 15-19 | 6.679 | 6.161 | 12.840 |
| 2 | 20-24 | 7.103 | 6.479 | 13.582 |
| 3 | 25-29 | 5.475 | 4.692 | 10.167 |
| 4 | 30-34 | 4.950 | 4.806 | 9.756 |
| 5 | 35-39 | 5.143 | 5.170 | 10.313 |
| 6 | 40-44 | 5.709 | 5.647 | 11.356 |
| 7 | 45-49 | 5.254 | 4.926 | 10.180 |
| 8 | 50-54 | 4.517 | 4.246 | 8.763 |
| 9 | 55-59 | 3.582 | 3.375 | 6.957 |
| 10 | 60-64 | 2.577 | 2.520 | 5.097 |
| JUMLAH | | 50.989 | 48.022 | 99.011 |

Sumber : Dukcatpil Jumlah Penduduk Berdasarkan struktur Umur Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

- d. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan Pembangunan daerah sebagai berikut:

Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan

| IKK OUTCOME | IKK | Rumus/ Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|--|-------|---|---------|---------------------------------------|
| Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan | 2.s.1 | $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam Perencanaan}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100 = 100 \%$ | 100 % | Bidang Informasi Publik dan Statistik |

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan
Pembangunan Daerah

| No. | PERANGKAT DAERAH | JENIS DATA STATISTIK SEKTORAL |
|------------|-------------------------|--|
| 01. | Sekretariat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Belanja TIK, Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian-Bagian Pada Sekretariat Daerah 3. Jumlah Peralatan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah 4. Jumlah Peralatan Elektronik Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 02. | Sekretariat DPRD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan 2. Banyaknya Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Menurut Jenis Kegiatan 3. Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik, Jenis Kelamin Dan Pendidikan 4. Daftar Data Pimpinan Dan Anggota DPRD 5. Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi Dan Jenis Kelamin 6. Anggaran TIK, Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan |
| 03. | Inspektorat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Program/ Kegiatan Di Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Dan Jenis Kelamin Di Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 3. Aspek/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 4. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi |
| 04. | Dinas Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2. Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan 3. Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan |

| | | |
|--|-----|---|
| | | Dan Kebudayaan |
| | 4. | Jumlah Sekolah Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | 5. | Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan |
| | 6. | Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | 7. | Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | 8. | Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan |
| | 9. | Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | 10. | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan Dan Tingkat Pendidikan |
| | 11. | Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| | 12. | Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Perguruan Tinggi |
| | 13. | Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur |
| | 14. | Angka Partisipasi Sekolah |
| | 15. | Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan |
| | 16. | Pendidikan Anak Usia Dini |
| | 17. | Jumlah Fasilitas Sekolah Sd Negeri |
| | 18. | Jumlah Fasilitas Sekolah Sd Swasta |
| | 19. | Jumlah Fasilitas Sekolah Smp Negeri |
| | 20. | Jumlah Fasilitas Sekolah Smp Swasta |
| | 21. | Jumlah Murid Putus Sekolah |
| | 22. | Pendidikan Kesetaraan |
| | 23. | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | | <p>24. Angka Melek Huruf (AMH) Pada Usia 15 S/D 59 Tahun</p> <p>25. Angka Rata-Rata Lama Sekolah</p> <p>26. Harapan Lama Sekolah</p> <p>27. Jumlah Grup Dan Gedung Kesenian</p> <p>28. Angka Partisipasi Sekolah</p> <p>29. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, Dan Partisipasi Sekolah</p> <p>30. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan</p> <p>31. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>32. Data Sekolah Paud Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Data Sekolah Tk Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Data Sekolah Sekolah Dasar Kabupaten Barito Selatan</p> <p>35. Data Sekolah Smp Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 05. | Dinas Kesehatan | <p>1. Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Menurut Kecamatan</p> <p>2. Jumlah Poskesdes Menurut Kecamatan</p> <p>3. Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan Dan Jenis Imunisasi</p> <p>4. Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (KESPRO), HIV/AIDS, Dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan</p> <p>5. Jumlah Penyuluhan Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS Dan Keluarga Berencana</p> <p>6. Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan</p> <p>7. Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan</p> <p>8. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>9. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, Dan Malaria Menurut Kecamatan</p> <p>10. Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan</p> <p>11. Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan</p> <p>12. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk</p> <p>13. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Penolong Proses Kelahiran</p> <p>14. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Dan Sarana Pelayanan Kesehatan</p> <p>15. Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dan Dokter Gigi Di Sarana Pelayanan Kesehatan</p> <p>16. Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran Berdasarkan Kecamatan</p> <p>17. Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Dan Angka Harapan Hidup (AHH)</p> <p>18. Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut</p> <p>19. Pelayanan Balita</p> <p>20. Jumlah Kunjungan Puskesmas</p> <p>21. Kasus Kesehatan Menurut Jenis Penyakit</p> <p>22. Jumlah Penderita Penyakit Menular</p> <p>23. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular</p> <p>24. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Gizi Buruk Dan Penyakit Lainnya</p> <p>25. Jumlah Penderita Gizi Buruk, Sakit Jiwa Dan Penyakit Lainnya</p> <p>26. Jumlah Pelayanan Dan Perawatan Bayi</p> <p>27. Banyaknya Persalinan Menurut Tempat Persalinan</p> <p>28. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi</p> |
|--|---|

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>Komunikasi</p> <p>29. Ketersediaan Obat</p> <p>30. Jumlah Angka Kematian Ibu Dan Anak</p> <p>31. Jumlah Ketenagaan Kesehatan Desa</p> <p>32. Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan</p> |
| 06. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | <p>1. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Bersih</p> <p>2. Jumlah Saluran Aliran Drainase</p> <p>3. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Sanitasi</p> <p>4. Banyaknya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>5. Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Menurut Kecamatan</p> <p>6. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang</p> <p>7. Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota</p> <p>8. Jarak Antar Kecamatan</p> <p>9. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi</p> <p>10. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan</p> <p>11. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan</p> <p>12. Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan</p> <p>13. Existing Jalan</p> <p>14. Perkembangan Areal Sawah Fungsional</p> <p>15. Perkembangan Data-Data Teknis Inventarisasi Aset Dinas Pengairan</p> <p>16. Jumlah Bendungan, Sungai Besar/Kecil, Embung</p> <p>17. Panjang Irigasi/Pengairan Menurut Kondisi</p> <p>18. Ketersediaan Debit Air</p> <p>19. Luas Baku Sawah Menurut Jenis Irigasi Per D.I.R</p> <p>20. Fasilitas Jaringan Irigasi Per D.I.R</p> <p>21. Fasilitas Irigasi Panjang Saluran Pembawa Air</p> <p>22. Fasilitas Jaringan Bangunan Air</p> <p>23. Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Rawan Sumber Air Baku</p> <p>24. Sempadan Sumber Air</p> <p>25. Jumlah Pemohon Slf Dan Jumlah Slf</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Yang Dikeluarkan Berdasarkan Fungsi Bangunan</p> <p>26. Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Dan Pagar</p> <p>27. Perizinan Perusahaan Jasa Konstruksi</p> <p>28. Jumlah Kecelakaan Kerja</p> <p>29. Jumlah Tenaga Ahli Dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)</p> <p>30. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang</p> <p>31. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</p> <p>32. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>33. Jumlah Permohonan Pbg Dan Jumlah Pbg Yang Dikeluarkan Berdasarkan Fungsi Bangunan</p> <p>34. Ruang Terbuka Hijau</p> <p>35. Daftar Satuan Harga Upah Harian Tenaga Kerja</p> <p>36. Daftar Satuan Harga Bahan/Material</p> <p>37. Standar Harga Satuan Bahan/Material Perpipaan</p> |
| 07. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | <p>1. Jumlah Sertrifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah</p> <p>2. Jumlah Dan Luas Ruang Terbuka Hijau</p> <p>3. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Tiap Kecamatan</p> <p>4. Status Kepemilikan Rumah Menurut Kecamatan</p> <p>5. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan</p> <p>6. Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>7. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>8. Luas Tanah Berdasarkan Hak</p> <p>9. Banyaknya Kasus Sengketa Tanah</p> <p>10. Banyaknya Jenis Hak Atas Tanah</p> <p>11. Jumlah Ruang Terbuka Hijau / Publik Yang Di Bangun / Ditingkatkan</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 12. Jumlah Dan Luas Tempat Pemakaman Umum |
| 08. | Satuan Palisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Berdasarkan Status Kepegawaian 2. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Terdata 3. Jumlah Penanganan Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Berdasarkan Kecamatan 4. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Mako Satpol PP Berdasarkan Kecamatan 5. Jumlah Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) Dan Peraturan Daerah (PERDA) 6. Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Oleh Polisi Pamong Praja 7. Jumlah Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 8. Jumlah Pengaduan Yang Telah Di Tindaklanjuti Oleh Polisi Pamong Praja 9. Jumlah Perlengkapan Perorangan Satuan Polisi Pamong Praja 10. Jumlah Pembinaan Operasional Teknis Satuan Polisi Pamong Praja 11. Jumlah Linmas (Perlindungan Masyarakat) Menurut Kecamatan |
| 09. | Dinas Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan 2. Banyaknya Yayasan 3. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4. Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa, Gelandangan Dan Pengemis 5. Jumlah Korban Bencana 6. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi 7. Banyaknya Panti Asuhan 8. Jumlah Karang Taruna Menurut |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Kecamatan</p> <p>9. Banyaknya Penduduk Miskin</p> |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | <p>1. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Per Kecamatan</p> <p>2. Jumlah Desa/Kelurahan Adat</p> <p>3. Administrasi Pemerintah Desa</p> <p>4. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah</p> <p>5. Jumlah Bumdes Perkecamatan</p> <p>6. Jumlah Rt Dan Rw Perkecamatan</p> |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | <p>1. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> <p>2. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin</p> <p>3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> <p>4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya Dan Jenis Kelamin</p> <p>5. Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan</p> <p>6. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan</p> <p>7. Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin</p> <p>8. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin</p> <p>9. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin</p> <p>10. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | <p>1. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta Kb Aktif Menurut Kecamatan</p> <p>2. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan</p> <p>3. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta Akseptor Kb Aktif Menurut Kecamatan Dan Alat Kontrasepsi</p> <p>4. Banyaknya Sarana Prasarana, Unit Pelayanan Kb Dan Jumlah Tenaga Klinik Kb</p> <p>5. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan</p> <p>6. Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak</p> <p>7. Tenaga Terlatih Layanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>8. Struktur Penduduk Perempuan Dalam Keluarga Berdasarkan Pendidikan</p> <p>9. Struktur Penduduk Anak Berdasarkan Pendidikan (Lebih Dari 18 Tahun)</p> <p>10. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |

| | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| | | 11. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta Akseptor Kb Aktif Menurut Kecamatan |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau/Publik Yang Dibangun/Ditingkatkan 2. Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah 3. Pengaduan Dan Pelaporan Lingkungan 4. Indeks Kualitas Air Dan Udara Data Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup 5. Jumlah TPS LB3 Pada Perusahaan Industri 6. Banyaknya Tingkat Pencemaran Lingkungan 7. Banyaknya Pasukan Kuning Dan DEPO/PLS Menurut Kecamatan 8. Tempat Pengolahan Sampah Yang Tersedia 9. Alat Angkut Sampah Yang Tersedia 10. Distribusi Bibit Tanaman Penghijauan Dan Bibit Untuk Kegiatan Menurut Jenisnya 11. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi 12. Jumlah Program Kampung Iklim |
| 14. | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan 4. Jumlah Penduduk Wajib KTP PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan 5. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin PerDesa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | <p>6. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>15. Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>16. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>17. Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 15. | Dinas Perhubungan | <p>1. Lokasi, Kategori dan Luas Terminal Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Banyaknya Kendaraan Lulus Uji Menurut Jenis dan Statusnya Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Data Jumlah Trayek Angkutan Umum di Sungai/air Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Data Jumlah Trayek Angkutan Umum di Darat Kabupaten Barito Selatan 5. JumlahPerusahaan Angkutan Umum di Sungai/air Kabupaten Barito Selatan 6. JumlahPerusahaan Angkutan Umum di Darat Kabupaten Barito Selatan 7. Jumlah Moda Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan 8. Banyaknya Perusahaan Angkutan Umum Menurut Kecamatan Sungai dan Darat Kabupaten Barito Selatan 9. Jumlah Terminal dan Penumpang Masuk dan Keluar Kabupaten Barito Selatan 10. Banyaknya Moda Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kabupaten Barito Selatan 11. Banyaknya Moda Angkutan Barang/Orang dan Perusahaan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kabupaten Barito Selatan 12. Ijin Trayek Kabupaten Barito Selatan 13. Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan 14. Banyaknya Moda Angkutan Barang Kabupaten Barito Selatan 15. Banyaknya Moda Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan 16. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi 17. |
| 16. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Jumlah Surat/ Berita Yang Masuk Email Persandian Setiap Bulan 2. Jumlah Base Transceiver Station (BTS) Setiap Kecamatan 3. Jumlah Daerah Yang Belum Ada |

| | |
|--|--|
| | <p>Jaringan Telekomunikasi Perkecamatan</p> <p>4. Jumlah Daerah Yang Sudah Ada Jaringan Telekomunikasi Perkecamatan</p> <p>5. Data Lokasi Wifi Gratis</p> <p>6. Kerjasama Peliputan Media Cetak, Elektronik Dan Online, Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</p> <p>7. Jumlah Pemberitaan Kerjasama Peliputan Media Massa Cetak</p> <p>8. Jumlah Pemberitaan Kerjasama Peliputan Media Massa Elektronik</p> <p>9. Jumlah Pemberitaan Kerjasama Peliputan Media Massa Online</p> <p>10. Jumlah Pengguna Internet Fiber Optik</p> <p>11. Anggaran Tik, Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>12. Jumlah Pengguna Webmail Baritoselatankab.Go.Id</p> <p>13. Jumlah Aplikasi Yang Digunakan Perangkat Daerah</p> <p>14. Jumlah Pendengar Radio Pemerintah Daerah</p> <p>15. Jumlah Penyiaran Berita Melalui Radio Pemerintah</p> <p>16. Jumlah Daerah Yang Masuk Dalam Jangkauan Pemancar Radio Perkecamatan</p> <p>17. Jumlah Daerah Yang Belum Masuk Dalam Jangkauan Pemancar Radio Perkecamatan</p> <p>18. Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Jumlah Pelaporan Di Sp4n Laporan! Menurut Klasifikasi Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Jumlah Pelaporan Di Sp4n Laporan! Menurut Kategori Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Jumlah Pengelolaan Laporan Masuk Sp4n Laporan! Menurut</p> |
|--|--|

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. Jumlah Sumber Laporan Di Sp4n Laporan! Menurut Sumber Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. Jumlah Pelapor Di Sp4n Laporan! Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Rekapitulasi Kinerja Unit Kerja Pada Sp4n Laporan!</p> <p>25. Jumlah Daftar Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik</p> <p>26. Daftar Kegiatan Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Statistik Dari Bps Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Jumlah Aduan Pada Csirt Menurut Bulan Di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Jumlah Sertifikat Elektronik Aktif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Jumlah Pelaporan Insiden Siber Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 17. | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <p>1. Jumlah Unit Usaha Tersier Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Jumlah Nilai Investasi Tersier Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 18. | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | <p>1. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi</p> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | <p>Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah Koleksi Buku Menurut Tajuk Buku Kabupaten Barito Selatan 3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan Jenis Kelamin Per Bulan Kabupaten Barito Selatan 4. Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan Kabupaten Barito Selatan 5. Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan Status Pekerjaan Per Bulan Kabupaten Barito Selatan 6. Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 7. Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis Kabupaten Barito Selatan 8. Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis Kabupaten Barito Selatan 9. Lembaga Kearsipan Terakreditasi Kabupaten Barito Selatan 10. Arsip Vital dan Arsip Statis Kabupaten Barito Selatan 11. Pemanfaatan Arsip Kabupaten Barito Selatan 12. Simpul Jaringan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan 13. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan 14. Jenis Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan 15. Supervisi Pengelolaan Arsip Statis |
| 19. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Barito Selatan 2. Populasi Unggas Menurut |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Kecamatan dan Jenis Unggas Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Ternak Yang diPotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Produksi Daging dan Susu Menurut Kecamatan dan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Produksi Telur Menurut Kecamatan dan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Rekapitulasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Banyaknya Vaksinasi Rabies Menurut Jenis Hewan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Jumlah dan Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Ton) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil (Ton) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Jumlah dan Nilai Produksi Telur Hewan Ternak (Kg/Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Produksi Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>16. Luas Panen, Produksi dan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Produktivitas Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>17. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar dan Ubi Kayu Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>18. Luas Lahan (Ha) sawah dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Daftar Lumbung Pangan</p> <p>20. Produksi Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Luas Lahan (Ha) Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. Produksi buah-Buahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. Banyaknya Produksi Komoditas Pangan Nabati Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Luas Areal (Ha) Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Jumlah Produksi (Ton) Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Luas Panen (Pohon/Rumpun) Buah-buahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Luas Panen Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Barito Selatan</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | | <p>30. Jumlah Produksi (Ton) Pertani Tanaman Pangan</p> <p>31. Luas Areal Perkebunan Tanaman Tahunan Dan Tanaman Semusim (Ha)</p> <p>32. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan (Ton)</p> <p>33. Jumlah Ketersediaan Pupuk, Pakan Ternak, Obat Anti Hama, Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah dan Kacang Hijau Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>35. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>36. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 20. | Dinas Perikanan | <p>1. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan Dan Jenis Kapal</p> <p>2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor (ton)</p> <p>5. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>6. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor (ton)</p> <p>7. Produksi Perikanan (ton)</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>8. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>10. Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenisnya</p> <p>11. Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>12. Luas Lahan Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>13. Kasus Pencurian, Tampak Pelelangan, Cold Storage, dan Dermaga</p> <p>14. Penangkapan Ikan Perairan Umum</p> <p>15. Balai Benih Ikan</p> <p>16. Pembenihan Ikan Rakyat</p> |
| 21. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | <p>1. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Banyaknya Koperasi Primer, aktif, Tidak Aktif dan Anggota Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Jumlah Industri Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Perbandingan dan Perkembangan Realisasi Ekspor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Banyaknya Koperasi Primer, aktif, Tidak Aktif dan Anggota Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Banyaknya Koperasi Primer, Modal, Volume Usaha dan SHU Menurut</p> |

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| | | Kecamatan Kabupaten Barito Selatan |
| 8. | Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kabupaten Barito Selatan | |
| 9. | Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 10. | Banyaknya Koperasi Primer dan Sekunder Serta Jumlah Anggotanya Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 11. | Modal, Asset dan SHU Koperasi dan Sekunder Perkecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 12. | Jumlah KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 13. | Jumlah Pasar Modern Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan | |
| 14. | Jumlah Pasar Tradisional Berdasarkan Pengelola dan Jenis Bangunan Kabupaten Barito Selatan | |
| 15. | Data Pasar Kabupaten Barito Selatan | |
| 16. | Jumlah Industri Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 17. | Jenis Industri Sedang Kabupaten Barito Selatan | |
| 18. | Jenis Industri Kecil Kabupaten Barito Selatan | |
| 19. | Jenis Industri Besar Kabupaten Barito Selatan | |
| 20. | Jenis Industri Rumah Tangga Kabupaten Barito Selatan | |
| 21. | Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan | |
| 22. | Banyaknya UMKM Bidang Kuliner, Fashion dan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan | |
| 23. | Banyaknya UMKM Bidang Otomotif, Agrobisnis dan Teknologi Internet Kabupaten Barito Selatan | |
| 24. | Jumlah Tenaga Kerja Perindustrian Menurut Jenis Industri Kabupaten Barito Selatan | |
| 25. | Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah | |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Tenaga Kerja dan Klasifikasi industri Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Jumlah Tenaga Kerja Perindustrian Menurut Jenis Industri Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 22. | <p>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata</p> | <p>1. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi informasi Komunikasi</p> <p>2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Datang Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Menginap diHotel Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Banyaknya Pengunjung Objek Wisata Menurut jenis Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Wisata Alam (AGRO) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Data Pokdarwis dan Desa Wisata Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Pencatatan Cagar Budaya, Museum dan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Cagar Budaya Menurut Jenis Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Jumlah Pagelaran Seni Budaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Jumlah Pameran Seni Budaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Jumlah Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | |
|--|---|
| | 16. Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan |
| | 17. Jumlah Hotel Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan |
| | 18. Jumlah Hiburan Kabupaten Barito Selatan |
| | 19. Jumlah Jasa Makanan dan Minuman Kabupaten Barito Selatan |
| | 20. Jumlah Lapangan/gedung Olahraga Kabupaten Barito Selatan |
| | 21. Jumlah Atlet dan pelatih yang Berprestasi dan diBina Menurut Cabang Olahraga Kabupaten Barito Selatan |
| | 22. Jumlah Lapangan Olahraga Menurut jenis Lapangan Per Kecamatan Kabupaten Barito Selatan |
| | 23. Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya Kabupaten Barito Selatan |
| | 24. Jumlah Kondisi Baik Prasarana Olahraga Kabupaten Barito Selatan |
| | 25. Jumlah Kondisi Kurang Baik Prasarana Olahraga Kabupaten Barito Selatan |
| | 26. Banyaknya Prasarana Olahraga Kabupaten Barito Selatan |
| | 27. Jumlah Sarana Pelabuhan/Bandara Kabupaten Barito Selatan |
| | 28. Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun Kabupaten Barito Selatan |
| | 29. Banyaknya Struktur Pemuda berdasarkan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan |
| | 30. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan kabupaten Barito Selatan |
| | 31. Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Barito Selatan |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>32. Seniman/Budayawan yang diBina Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Jumlah Kelompok dan Anggota Seni Musik Tradisional Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Seni Rupa Kabupaten Barito Selatan</p> <p>35. Jumlah Kelompok Seni Tari/Gerak Kabupaten Barito Selatan</p> <p>36. Jumlah Anggota Seni Tari/Gerak Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 23. | Badan Kepagawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | <p>1. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi informasi Komunikasi</p> <p>2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Golongan Kepangkatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Banyaknya ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>10. Jumlah ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Jumlah ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Banyaknya ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Kelompok Jabatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. Banyaknya ASN Dinas/Instansi dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>16. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>17. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>18. Banyaknya ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin</p> <p>19. Banyaknya ASN Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Menurut Eselon dan Jenis Kelamin</p> <p>20. Banyaknya ASN Menurut Agama dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Banyaknya ASN Menurut Kelompok Profesi dan Jenis</p> |
|--|--|

| | | |
|-----|---|---|
| | | Kelamin Kabupaten Barito Selatan |
| 24. | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 3. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan 6. Komposisi Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan 7. Perincian Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 8. Perincian Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 9. Perincian Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10. Perincian Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah |
| 25. | Badan Pendapatan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran TIK, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Data Aset Daerah Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah |
| 26. | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Pembangunan Daerah (Program Prioritas) Di Kabupaten Barito Selatan 2. Realisasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Barito Selatan 3. Realisasi Pembangunan Daerah (Program/Kegiatan Prioritas) Kabupaten Barito Selatan 4. Jumlah Program APBD Menurut Perangkat Daerah |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| | | 5. Jumlah Program RKPD Menurut Perangkat Daerah |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan 2. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan 4. Daftar Lengkap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan 5. Keputusan DPRD Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan 6. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Barito Selatan 7. Jumlah Penduduk Yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Barito Selatan 8. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi |
| 28. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi 2. Banyaknya Bencana Alam Menurut Jumlah Korban dan Kerugian Kabupaten Barito Selatan 3. Banyaknya Bencana Alam Menurut Jumlah Korban dan |

| | |
|-----|--|
| | Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan |
| 4. | Banyaknya Penanganan Darurat Yang Sudah Tertangani Kabupaten Barito Selatan |
| 5. | Banyaknya Peralatan Komunikasi, Kesehatan, air Bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) Mobile, Alat Berat dan Hunian Sementara Kabupaten Barito Selatan |
| 6. | Jumlah Desa Tangguh Bencana Alam Kabupaten Barito Selatan |
| 7. | Banyaknya Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Tanggap Kebencanaan Kabupaten Barito Selatan |
| 8. | Jumlah Organisasi, Lembaga Yang Terlibat Dalam Kebencanaan Kabupaten Barito Selatan |
| 9. | Banyaknya Kegiatan Monev Kebencanaan dan Kedaduratan Kabupaten Barito Selatan |
| 10. | Banyaknya Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Barito Selatan |
| 11. | Banyaknya Peralatan Pendukung angkutan Darat, Laut dan Udara Kabupaten Barito Selatan |
| 12. | Banyaknya Pengungsi Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan |
| 13. | Banyaknya Kerugian Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan |
| 14. | Banyaknya Sistem Peringatan Dini Bencana Kabupaten Barito Selatan |
| 15. | Prasarana dan Sarana Tanggap Darurat Kabupaten Barito Selatan |
| 16. | Rekapitulasi Data Hotspot |

| | | |
|-----|---|--|
| 29. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Berdasarkan Kecamatan 2. Jumlah Pemadaman Kebakaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kebakaran 3. Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran Berdasarkan Jenis 4. Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Kebakaran 5. Jumlah Kawasan Rawan Terhadap Bencana Kebakaran 6. Jumlah Personil Pemadam Kebakaran Berdasarkan Kelas-kelas Petugas Pemadaman Kebakaran 7. Jumlah Personil Pemadam Kebakaran Berdasarkan Status Kepegawaian 8. Jumlah Alat Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran 9. Jumlah Kejadian Kebakaran Dan Penyebab Kebakaran 10. Rekapitulasi Data Kebakaran Berdasarkan Kecamatan 11. Pencegahan Terjadinya Kebakaran Kepada Masyarakat 12. Jumlah Pertolongan Darurat Non Kebakaran RESCUE 13. Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 14. SAR Search And Rescue Terbatas 15. Pelatihan Dan Pembinaan Masyarakat 16. Jumlah Relawan Dan Satgas Kebakaran 17. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api MPA |
| 30. | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Fisik Dan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan 3. Realisasi Pembangunan |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | | <p>DiDaerah Yang Bersumber Dari DAK Yang DiKelola Oleh Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rekapitulasi Pembangunan Di Daerah Yang Bersumber Dari APBN (Tugas Pembantuan, Urusan Bersama Dan Dekonsentrasi) 5. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Paket Non Strategis (>Rp50 Juta S.D Rp.200 Juta) 6. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Paket Strategis (>Rp2,5 Miliar S.D Rp.50 Miliar) 7. Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah (PSD) Atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) |
| 31. | Bagian Umum Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian-Bagian Pada Sekretariat Daerah 2. Jumlah Kendaraan Dinas Berdasarkan Jenis Kendaraan 3. Jumlah Peralatan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah 4. Jumlah Peralatan Elektronik Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 32. | Bagian Pemerintahan Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan 3. Daftar Bupati dan Wakil Bupati dari masa ke masa Kabupaten Barito Selatan 4. Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan 5. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan 6. Banyaknya Kelurahan/Desa |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | <p>Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 33. | Bagian Organisasi Sekretariat | <p>1. Jumlah Standar Pelayanan Yang Disusun Unit Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>2. Jumlah Standar Operasional Prosedur Yang Disusun Unit Kerja</p> <p>3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>4. Nilai Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</p> <p>6. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</p> <p>7. Indeks Repormasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>8. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah</p> <p>9. Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>10. Indeks Implementasi Berakhlak Pemerintah Daerah</p> |
| 34. | Bagian Hukum Sekretariat | <p>1. Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Daerah</p> <p>2. Statistik Status Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Statistik Status Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Penanganan Kasus yang diFasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 35. | Bagian Perekonomian dan SDA | <p>1. Sambungan Listrik Per</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>Desa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 36. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | <p>1. Banyaknya Proyek Pembangunan yang telah diRealisasikan menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Data Jumlah dan Nilai Tender Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 37. | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat | <p>1. Jumlah Materi Pelayanan Informasi Melalui Media Daring</p> <p>2. Jumlah Kegiatan Yang Dihadiri Pimpinan Daerah Perbulan</p> <p>3. Jumlah Pegawai Protokol Berdasarkan Keahlian (Jabatan)</p> <p>4. Jumlah Kegiatan Kenegaraan</p> <p>5. Jumlah Kegiatan Kedinasan</p> <p>6. Jumlah Kunjungan Pejabat Pusat/Provinsi Yang DiFasilitasi</p> <p>7. Jumlah Pendampingan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati</p> <p>8. Jumlah Penyusunan Naskah Acara/Protokol Daerah</p> <p>9. Jumlah Naskah Pelayanan Informasi Dan Kehumasan Dalam Bentuk Pidato Perbulan</p> <p>10. Jumlah Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah</p> |
| 38. | Bagian Kesejahteraan Sekretariat | <p>1. Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Barito Selatan</p> <p>2. Bantuan Hibah Pembangunan/Renovasi Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Kabupaten Barito Selatan</p> <p>3. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 39. | Kecamatan Dusun Selatan | <p>1. Jumlah Perlindungan</p> |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| | | <p>Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Dusun Selatan Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>3. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>4. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>7. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>10. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Selatan Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Selatan</p> |
| 40. | Kecamatan Dusun Utara | <p>1. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Dusun Selatan Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa 5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa 6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan 7. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian 8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Pelayanan 9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Selatan 10. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Selatan Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Selatan 12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Selatan |
| 41. | Kecamatan Karau Kuala | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Karau Kuala Menurut Kelurahan/Desa 2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Karau Kuala Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Karau Kuala Menurut |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| | | <p>Kelurahan/Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa 5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Karau Kuala Menurut Kelurahan/Desa 6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Karau Kuala 7. Jumlah Pegawai Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Status Kepegawaian 8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Jenis Pelayanan 9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karau Kuala 10. Jumlah Konflik Kecamatan Karau Kuala Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Karau Kuala 12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Karau Kuala |
| 42. | Kecamatan Dusun Hilir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa 2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Dusun Hilir Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa 6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Hilir 7. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Status Kepegawaian 8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Jenis Pelayanan 9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Hilir 10. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Hilir Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Hilir 12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Hilir |
| 43. | Kecamatan Jenamas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa 2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa 5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunung Bintang Awai 7. Jumlah Pegawai Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Status Kepegawaian 8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Pelayanan 9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai 10. Jumlah Konflik Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai 12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Gunung Bintang Awai |
| 44. | Kecamatan Gunung Bintang Awai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa 2. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa 5. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa 6. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunung Bintang Awai 7. Jumlah Pegawai Kecamatan Gunung Bintang Awai |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>8. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>9. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>10. Jumlah Konflik Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>11. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>12. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> |
|--|--|---|

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



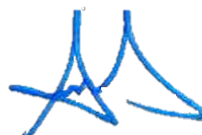
MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

- e. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah sebagai berikut:

Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan

| IKK OUTCOME | IKK | Rumus/ Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|--|-------|---|---------|---------------------------------------|
| Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Dalam Penyusunan Perencanaan | 2.s.1 | $\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam Perencanaan}}{\text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$ $\frac{44}{44} \times 100 = 100 \%$ | 100 % | Bidang Informasi Publik dan Statistik |

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

| No. | PERANGKAT DAERAH | JENIS DATA STATISTIK SEKTORAL |
|-----|--------------------|---|
| 01. | Sekretariat Daerah | 5. Anggaran Belanja TIK, Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian-Bagian Pada Sekretariat Daerah 7. Jumlah Peralatan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah 8. Jumlah Peralatan Elektronik Bagian Umum Sekretariat Daerah |
| 02. | Sekretariat DPRD | 7. Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan 8. Banyaknya Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Menurut Jenis Kegiatan 9. Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik, Jenis Kelamin Dan Pendidikan 10. Daftar Data Pimpinan Dan Anggota DPRD 11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi Dan Jenis Kelamin 12. Anggaran TIK, Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan |
| 03. | Inspektorat | 5. Jumlah Program/ Kegiatan Di Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Dan Jenis Kelamin Di Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 7. Aspek/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 8. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi |
| 04. | Dinas Pendidikan | 36. Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 37. Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan |

| | | |
|--|--|---|
| | | 38. Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 39. Jumlah Sekolah Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 40. Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan |
| | | 41. Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 42. Jumlah Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 43. Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kecamatan |
| | | 44. Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | 45. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan Dan Tingkat Pendidikan |
| | | 46. Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| | | 47. Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Perguruan Tinggi |
| | | 48. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur |
| | | 49. Angka Partisipasi Sekolah |
| | | 50. Angka Partisipasi Murni (APM) Dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan |
| | | 51. Pendidikan Anak Usia Dini |
| | | 52. Jumlah Fasilitas Sekolah Sd Negeri |
| | | 53. Jumlah Fasilitas Sekolah Sd Swasta |
| | | 54. Jumlah Fasilitas Sekolah Smp Negeri |

| | | |
|-----|-----------------|---|
| | | <p>55. Jumlah Fasilitas Sekolah Smp Swasta</p> <p>56. Jumlah Murid Putus Sekolah</p> <p>57. Pendidikan Kesetaraan</p> <p>58. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</p> <p>59. Angka Melek Huruf (AMH) Pada Usia 15 S/D 59 Tahun</p> <p>60. Angka Rata-Rata Lama Sekolah</p> <p>61. Harapan Lama Sekolah</p> <p>62. Jumlah Grup Dan Gedung Kesenian</p> <p>63. Angka Partisipasi Sekolah</p> <p>64. Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, Dan Partisipasi Sekolah</p> <p>65. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pendidikan</p> <p>66. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>67. Data Sekolah Paud Kabupaten Barito Selatan</p> <p>68. Data Sekolah Tk Kabupaten Barito Selatan</p> <p>69. Data Sekolah Sekolah Dasar Kabupaten Barito Selatan</p> <p>70. Data Sekolah Smp Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 05. | Dinas Kesehatan | <p>33. Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Menurut Kecamatan</p> <p>34. Jumlah Poskesdes Menurut Kecamatan</p> <p>35. Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan Dan Jenis Imunisasi</p> <p>36. Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (KESPRO), HIV/AIDS, Dan Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan</p> <p>37. Jumlah Penyuluhan Kesehatan</p> |

| | | |
|--|-----|--|
| | | Reproduksi, HIV/AIDS Dan Keluarga Berencana |
| | 38. | Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan |
| | 39. | Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan |
| | 40. | Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan |
| | 41. | Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB, Dan Malaria Menurut Kecamatan |
| | 42. | Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan |
| | 43. | Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan |
| | 44. | Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk |
| | 45. | Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Penolong Proses Kelahiran |
| | 46. | Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Dan Sarana Pelayanan Kesehatan |
| | 47. | Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dan Dokter Gigi Di Sarana Pelayanan Kesehatan |
| | 48. | Banyaknya Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran Berdasarkan Kecamatan |
| | 49. | Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Dan Angka Harapan Hidup (AHH) |
| | 50. | Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut |
| | 51. | Pelayanan Balita |
| | 52. | Jumlah Kunjungan Puskesmas |
| | 53. | Kasus Kesehatan Menurut Jenis Penyakit |
| | 54. | Jumlah Penderita Penyakit Menular |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>55. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular</p> <p>56. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Gizi Buruk Dan Penyakit Lainnya</p> <p>57. Jumlah Penderita Gizi Buruk, Sakit Jiwa Dan Penyakit Lainnya</p> <p>58. Jumlah Pelayanan Dan Perawatan Bayi</p> <p>59. Banyaknya Persalinan Menurut Tempat Persalinan</p> <p>60. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>61. Ketersediaan Obat</p> <p>62. Jumlah Angka Kematian Ibu Dan Anak</p> <p>63. Jumlah Ketenagaan Kesehatan Desa</p> <p>64. Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan</p> |
| 06. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | <p>38. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Bersih</p> <p>39. Jumlah Saluran Aliran Drainase</p> <p>40. Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Sanitasi</p> <p>41. Banyaknya Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>42. Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Menurut Kecamatan</p> <p>43. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang</p> <p>44. Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota</p> <p>45. Jarak Antar Kecamatan</p> <p>46. Jumlah Jembatan Menurut Kondisi</p> <p>47. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan</p> <p>48. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan</p> <p>49. Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan</p> <p>50. Existing Jalan</p> <p>51. Perkembangan Areal Sawah Fungsional</p> <p>52. Perkembangan Data-Data Teknis Inventarisasi Aset Dinas Pengairan</p> <p>53. Jumlah Bendungan, Sungai</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Besar/Kecil, Embung</p> <p>54. Panjang Irigasi/Pengairan Menurut Kondisi</p> <p>55. Ketersediaan Debit Air</p> <p>56. Luas Baku Sawah Menurut Jenis Irigasi Per D.I.R</p> <p>57. Fasilitas Jaringan Irigasi Per D.I.R</p> <p>58. Fasilitas Irigasi Panjang Saluran Pembawa Air</p> <p>59. Fasilitas Jaringan Bangunan Air</p> <p>60. Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Rawan Sumber Air Baku</p> <p>61. Sempadan Sumber Air</p> <p>62. Jumlah Pemohon Slf Dan Jumlah Slf Yang Dikeluarkan Berdasarkan Fungsi Bangunan</p> <p>63. Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Dan Pagar</p> <p>64. Perizinan Perusahaan Jasa Konstruksi</p> <p>65. Jumlah Kecelakaan Kerja</p> <p>66. Jumlah Tenaga Ahli Dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)</p> <p>67. Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang</p> <p>68. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</p> <p>69. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>70. Jumlah Permohonan Pbg Dan Jumlah Pbg Yang Dikeluarkan Berdasarkan Fungsi Bangunan</p> <p>71. Ruang Terbuka Hijau</p> <p>72. Daftar Satuan Harga Upah Harian Tenaga Kerja</p> <p>73. Daftar Satuan Harga Bahan/Material</p> <p>74. Standar Harga Satuan Bahan/Material Perpipaan</p> |
| 07. | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | 13. Jumlah Sertrifikat Tanah Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>14. Jumlah Dan Luas Ruang Terbuka Hijau</p> <p>15. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Tiap Kecamatan</p> <p>16. Status Kepemilikan Rumah Menurut Kecamatan</p> <p>17. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan</p> <p>18. Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>19. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>20. Luas Tanah Berdasarkan Hak</p> <p>21. Banyaknya Kasus Sengketa Tanah</p> <p>22. Banyaknya Jenis Hak Atas Tanah</p> <p>23. Jumlah Ruang Terbuka Hijau / Publik Yang Di Bangun / Ditingkatkan</p> <p>24. Jumlah Dan Luas Tempat Pemakaman Umum</p> |
| 08. | Satuan Palisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | <p>12. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>13. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Terdata</p> <p>14. Jumlah Penanganan Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa Berdasarkan Kecamatan</p> <p>15. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Mako Satpol PP Berdasarkan Kecamatan</p> <p>16. Jumlah Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) Dan Peraturan Daerah (PERDA)</p> <p>17. Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Oleh Polisi Pamong Praja</p> <p>18. Jumlah Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>19. Jumlah Pengaduan Yang Telah Di Tindaklanjuti Oleh Polisi Pamong Praja</p> <p>20. Jumlah Perlengkapan</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Perorangan Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>21. Jumlah Pembinaan Operasional Teknis Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>22. Jumlah Linmas (Perlindungan Masyarakat) Menurut Kecamatan</p> |
| 09. | Dinas Sosial | <p>10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan</p> <p>11. Banyaknya Yayasan</p> <p>12. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p> <p>13. Jumlah Orang Dalam Gangguan Jiwa, Gelandangan Dan Pengemis</p> <p>14. Jumlah Korban Bencana</p> <p>15. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>16. Banyaknya Panti Asuhan</p> <p>17. Jumlah Karang Taruna Menurut Kecamatan</p> <p>18. Banyaknya Penduduk Miskin</p> |
| 10. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | <p>7. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Per Kecamatan</p> <p>8. Jumlah Desa/Kelurahan Adat</p> <p>9. Administrasi Pemerintah Desa</p> <p>10. Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Daerah</p> <p>11. Jumlah Bumdes Perkecamatan</p> <p>12. Jumlah Rt Dan Rw Perkecamatan</p> |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | <p>12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> <p>13. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>14. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> <p>15. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Jam Kerja Seluruhnya Dan Jenis Kelamin</p> <p>16. Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan</p> <p>17. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan</p> <p>18. Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin</p> <p>19. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin</p> <p>20. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin</p> <p>21. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>22. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin</p> |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | <p>12. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta Kb Aktif Menurut Kecamatan</p> <p>13. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan</p> <p>14. Jumlah Pasangan Usia Subur</p> |

| | | |
|-----|------------------------|---|
| | | <p>Dan Peserta Akseptor Kb Aktif Menurut Kecamatan Dan Alat Kontrasepsi</p> <p>15. Banyaknya Sarana Prasarana, Unit Pelayanan Kb Dan Jumlah Tenaga Klinik Kb</p> <p>16. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan</p> <p>17. Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak</p> <p>18. Tenaga Terlatih Layanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>19. Struktur Penduduk Perempuan Dalam Keluarga Berdasarkan Pendidikan</p> <p>20. Struktur Penduduk Anak Berdasarkan Pendidikan (Lebih Dari 18 Tahun)</p> <p>21. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>22. Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta Akseptor Kb Aktif Menurut Kecamatan</p> |
| 13. | Dinas Lingkungan Hidup | <p>13. Jumlah Ruang Terbuka Hijau/Publik Yang Dibangun/Ditingkatkan</p> <p>14. Pengangkutan Dan Pengelolaan Sampah</p> <p>15. Pengaduan Dan Pelaporan Lingkungan</p> <p>16. Indeks Kualitas Air Dan Udara Data Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup</p> <p>17. Jumlah TPS LB3 Pada Perusahaan Industri</p> <p>18. Banyaknya Tingkat Pencemaran Lingkungan</p> |

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| | | <p>19. Banyaknya Pasukan Kuning Dan DEPO/PLS Menurut Kecamatan</p> <p>20. Tempat Pengolahan Sampah Yang Tersedia</p> <p>21. Alat Angkut Sampah Yang Tersedia</p> <p>22. Distribusi Bibit Tanaman Penghijauan Dan Bibit Untuk Kegiatan Menurut Jenisnya</p> <p>23. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>24. Jumlah Program Kampung Iklim</p> |
| 14. | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | <p>18.</p> <p>19. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Perdesa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Jumlah Penduduk Wajib KTP PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin PerDesa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama PerKecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | <p>28. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>31. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>32. Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 15. | Dinas Perhubungan | <p>18. Lokasi, Kategori dan Luas Terminal Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Banyaknya Kendaraan Lulus Uji Menurut Jenis dan Statusnya Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Data Jumlah Trayek Angkutan Umum di Sungai/air Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Data Jumlah Trayek Angkutan Umum di Darat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. JumlahPerusahaan Angkutan Umum di Sungai/air Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. JumlahPerusahaan Angkutan Umum di Darat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Jumlah Moda Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Banyaknya Perusahaan Angkutan Umum Menurut Kecamatan Sungai</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>dan Darat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Jumlah Terminal dan Penumpang Masuk dan Keluar Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Banyaknya Moda Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Banyaknya Moda Angkutan Barang/Orang dan Perusahaan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Ijin Trayek Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan</p> <p>31. Banyaknya Moda Angkutan Barang Kabupaten Barito Selatan</p> <p>32. Banyaknya Moda Angkutan Umum Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>34.</p> |
| 16. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | <p>30. Data Jumlah Surat/ Berita Yang Masuk Email Persandian Setiap Bulan</p> <p>31. Jumlah Base Transceiver Station (BTS) Setiap Kecamatan</p> <p>32. Jumlah Daerah Yang Belum Ada Jaringan Telekomunikasi Perkecamatan</p> <p>33. Jumlah Daerah Yang Sudah Ada Jaringan Telekomunikasi Perkecamatan</p> <p>34. Data Lokasi Wifi Gratis</p> <p>35. Kerjasama Peliputan Media Cetak, Elektronik Dan Online, Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</p> <p>36. Jumlah Pemberitaan Kerjasama</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Peliputan Media Massa Cetak</p> <p>37. Jumlah Pemberitaan Kerjasama Peliputan Media Massa Elektronik</p> <p>38. Jumlah Pemberitaan Kerjasama Peliputan Media Massa Online</p> <p>39. Jumlah Pengguna Internet Fiber Optik</p> <p>40. Anggaran Tik, Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>41. Jumlah Pengguna Webmail Baritoselatankab.Go.Id</p> <p>42. Jumlah Aplikasi Yang Digunakan Perangkat Daerah</p> <p>43. Jumlah Pendengar Radio Pemerintah Daerah</p> <p>44. Jumlah Penyiaran Berita Melalui Radio Pemerintah</p> <p>45. Jumlah Daerah Yang Masuk Dalam Jangkauan Pemancar Radio Perkecamatan</p> <p>46. Jumlah Daerah Yang Belum Masuk Dalam Jangkauan Pemancar Radio Perkecamatan</p> <p>47. Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>48. Jumlah Pelaporan Di Sp4n Laporan! Menurut Klasifikasi Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>49. Jumlah Pelaporan Di Sp4n Laporan! Menurut Kategori Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>50. Jumlah Pengelolaan Laporan Masuk Sp4n Laporan! Menurut Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>51. Jumlah Sumber Laporan Di Sp4n Laporan! Menurut Sumber Laporan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>52. Jumlah Pelapor Di Sp4n Laporan! Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>53. Rekapitulasi Kinerja Unit Kerja Pada Sp4n Laporan!</p> <p>54. Jumlah Daftar Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik</p> <p>55. Daftar Kegiatan Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Statistik Dari Bps Kabupaten Barito Selatan</p> <p>56. Jumlah Aduan Pada Csirt Menurut Bulan Di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>57. Jumlah Sertifikat Elektronik Aktif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>58. Jumlah Pelaporan Insiden Siber Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 17. | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <p>8. Jumlah Unit Usaha Tersier Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Jumlah Nilai Investasi Tersier Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 18. | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | <p>16. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>17. Jumlah Koleksi Buku Menurut Tajuk Buku Kabupaten Barito Selatan</p> <p>18. Jumlah Pengunjung</p> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | <p>Perpustakaan berdasarkan Jenis Kelamin Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan Status Pekerjaan Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. Bimbingan Teknis Kepada Pengelola Arsip Dinamis Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Lembaga Kearsipan Terakreditasi Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Arsip Vital dan Arsip Statis Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Pemanfaatan Arsip Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Simpul Jaringan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Jenis Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Supervisi Pengelolaan Arsip Statis</p> |
| 19. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | <p>37. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Barito Selatan</p> <p>38. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>39. Jumlah Ternak Yang diPotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Barito Selatan</p> <p>40. Produksi Daging dan Susu Menurut Kecamatan dan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>41. Produksi Telur Menurut Kecamatan dan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>42. Rekapitulasi Vaksinasi Rabies Kabupaten Barito Selatan</p> <p>43. Banyaknya Vaksinasi Rabies Menurut Jenis Hewan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>44. Jumlah dan Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Ton) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>45. Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil (Ton) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>46. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>47. Jumlah dan Nilai Produksi Telur Hewan Ternak (Kg/Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>48. Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (Rp) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>49. Produksi Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>50. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>51. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) Kabupaten Barito Selatan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>52. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung dan Kedelai Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>53. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar dan Ubi Kayu Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>54. Luas Lahan (Ha) sawah dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>55. Daftar Lumbung Pangan</p> <p>56. Produksi Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>57. Luas Lahan (Ha) Sayur-sayuran Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>58. Produksi buah-Buahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>59. Banyaknya Produksi Komoditas Pangan Nabati Kabupaten Barito Selatan</p> <p>60. Luas Areal (Ha) Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>61. Jumlah Produksi (Ton) Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>62. Luas Panen (Pohon/Rumpun) Buah-buahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>63. Luas Panen Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Kabupaten Barito Selatan</p> <p>64. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|-----------------|--|
| | | <p>Tanaman Kabupaten Barito Selatan</p> <p>65. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Barito Selatan</p> <p>66. Jumlah Produksi (Ton) Pertanian Tanaman Pangan</p> <p>67. Luas Areal Perkebunan Tanaman Tahunan Dan Tanaman Semusim (Ha)</p> <p>68. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan (Ton)</p> <p>69. Jumlah Ketersediaan Pupuk, Pakan Ternak, Obat Anti Hama, Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Barito Selatan</p> <p>70. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah dan Kacang Hijau Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>71. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Menurut Kecamatan Kabupate Barito Selatan</p> <p>72. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 20. | Dinas Perikanan | <p>17. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan Dan Jenis Kapal</p> <p>18. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor (ton)</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>21. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>22. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor (ton)</p> <p>23. Produksi Perikanan (ton) Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>24. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Dan Subsektor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Jumlah Rumah Tangga Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>26. Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Air Tawar Menurut Jenisnya</p> <p>27. Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>28. Luas Lahan Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan Dan Subsektor</p> <p>29. Kasus Pencurian, Tampak Pelelangan, Cold Storage, dan Dermaga</p> <p>30. Penangkapan Ikan Perairan Umum</p> <p>31. Balai Benih Ikan</p> <p>32. Pembenihan Ikan Rakyat</p> |
| 21. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | <p>28. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Banyaknya Koperasi Primer, aktif, Tidak Aktif dan Anggota Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>31. Jumlah Industri Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>32. Perbandingan dan Perkembangan Realisasi Ekspor Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Banyaknya Koperasi Primer, aktif, Tidak Aktif dan Anggota Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Banyaknya Koperasi Primer, Modal, Volume Usaha dan SHU Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>35. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Kabupaten Barito Selatan</p> <p>36. Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>37. Banyaknya Koperasi Primer dan Sekunder Serta Jumlah Anggotanya Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>38. Modal, Asset dan SHU Koperasi dan Sekunder Perkecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>39. Jumlah KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>40. Jumlah Pasar Modern Berdasarkan Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>41. Jumlah Pasar Tradisional Berdasarkan Pengelola dan Jenis Bangunan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>42. Data Pasar Kabupaten Barito Selatan</p> <p>43. Jumlah Industri Menurut Jenis dan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>44. Jenis Industri Sedang Kabupaten Barito Selatan</p> <p>45. Jenis Industri Kecil Kabupaten Barito Selatan</p> <p>46. Jenis Industri Besar Kabupaten Barito Selatan</p> <p>47. Jenis Industri Rumah Tangga Kabupaten Barito Selatan</p> |
|--|---|

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>48. Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>49. Banyaknya UMKM Bidang Kuliner, Fashion dan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>50. Banyaknya UMKM Bidang Otomotif, Agrobisnis dan Teknologi Internet Kabupaten Barito Selatan</p> <p>51. Jumlah Tenaga Kerja Perindustrian Menurut Jenis Industri Kabupaten Barito Selatan</p> <p>52. Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja dan Klasifikasi industri Kabupaten Barito Selatan</p> <p>53. Jumlah Tenaga Kerja Perindustrian Menurut Jenis Industri Kabupaten Barito Selatan</p> <p>54. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 22. | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata | <p>37. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi informasi Komunikasi</p> <p>38. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Barito Selatan</p> <p>39. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Datang Kabupaten Barito Selatan</p> <p>40. Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Menginap diHotel Kabupaten Barito Selatan</p> <p>41. Banyaknya Pengunjung Objek Wisata Menurut jenis Per Bulan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>42. Wisata Alam (AGRO) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>43. Data Pokdarwis dan Desa Wisata Kabupaten Barito Selatan</p> <p>44. Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata</p> |

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| | | Kabupaten Barito Selatan |
| 45. | Jumlah Pencatatan Cagar Budaya, Museum dan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Barito Selatan | |
| 46. | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 47. | Cagar Budaya Menurut Jenis Kabupaten Barito Selatan | |
| 48. | Jumlah Pagelaran Seni Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 49. | Jumlah Pameran Seni Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 50. | Jumlah Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 51. | Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 52. | Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 53. | Jumlah Hotel Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 54. | Jumlah Hiburan Kabupaten Barito Selatan | |
| 55. | Jumlah Jasa Makanan dan Minuman Kabupaten Barito Selatan | |
| 56. | Jumlah Lapangan/gedung Olahraga Kabupaten Barito Selatan | |
| 57. | Jumlah Atlet dan pelatih yang Berprestasi dan diBina Menurut Cabang Olahraga Kabupaten Barito Selatan | |
| 58. | Jumlah Lapangan Olahraga Menurut jenis Lapangan Per Kecamatan Kabupaten Barito Selatan | |
| 59. | Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya Kabupaten Barito Selatan | |
| 60. | Jumlah Kondisi Baik Prasarana Olahraga Kabupaten Barito | |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Selatan</p> <p>61. Jumlah Kondisi Kurang Baik Prasarana Olahraga Kabupaten Barito Selatan</p> <p>62. Banyaknya Prasarana Olahraga Kabupaten Barito Selatan</p> <p>63. Jumlah Sarana Pelabuhan/Bandara Kabupaten Barito Selatan</p> <p>64. Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun Kabupaten Barito Selatan</p> <p>65. Banyaknya Struktur Pemuda berdasarkan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>66. Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan kabupaten Barito Selatan</p> <p>67. Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Barito Selatan</p> <p>68. Seniman/Budayawan yang diBina Kabupaten Barito Selatan</p> <p>69. Jumlah Kelompok dan Anggota Seni Musik Tradisional Kabupaten Barito Selatan</p> <p>70. Seni Rupa Kabupaten Barito Selatan</p> <p>71. Jumlah Kelompok Seni Tari/Gerak Kabupaten Barito Selatan</p> <p>72. Jumlah Anggota Seni Tari/Gerak Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 23. | Badan Kepagawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | <p>22. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi informasi Komunikasi</p> <p>23. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>25. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Golongan Kepangkatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Banyaknya ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Golongan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Jumlah ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>31. Jumlah ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>32. Jumlah ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>33. Banyaknya ASN Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>34. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>35. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Kelompok Jabatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>36. Banyaknya ASN Dinas/Instansi</p> |
|--|--|

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>37. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kecamatan dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>38. Banyaknya ASN Menurut Kantor Kelurahan dan Kelompok Jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>39. Banyaknya ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin</p> <p>40. Banyaknya ASN Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Menurut Eselon dan Jenis Kelamin</p> <p>41. Banyaknya ASN Menurut Agama dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>42. Banyaknya ASN Menurut Kelompok Profesi dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 24. | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | <p>11. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>12. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah</p> <p>13. Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>14. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>15. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan</p> <p>16. Komposisi Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>17. Perincian Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah</p> <p>18. Perincian Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah</p> <p>19. Perincian Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</p> <p>20. Perincian Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> |
| 25. | Badan Pendapatan Daerah | <p>4. Anggaran TIK, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>6. Data Aset Daerah Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah</p> |
| 26. | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | <p>6. Realisasi Pembangunan Daerah (Program Prioritas) Di Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Realisasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Realisasi Pembangunan Daerah (Program/Kegiatan Prioritas) Kabupaten Barito Selatan</p> <p>9. Jumlah Program APBD Menurut Perangkat Daerah</p> <p>10. Jumlah Program RKPD Menurut Perangkat Daerah</p> |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | <p>9. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis</p> |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| | | <p>Kelamin Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Daftar Lengkap Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Keputusan DPRD Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. Jumlah Penduduk Yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Barito Selatan</p> <p>16. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 28. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <p>17. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>18. Banyaknya Bencana Alam Menurut Jumlah Korban dan Kerugian Kabupaten Barito Selatan</p> <p>19. Banyaknya Bencana Alam Menurut Jumlah Korban dan Menurut Jenisnya Kabupaten Barito Selatan</p> <p>20. Banyaknya Penanganan Darurat Yang Sudah Tertangani Kabupaten Barito Selatan</p> <p>21. Banyaknya Peralatan Komunikasi, Kesehatan, air Bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) Mobile, Alat Berat dan Hunian Sementara Kabupaten Barito Selatan</p> <p>22. Jumlah Desa Tangguh Bencana</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Alam Kabupaten Barito Selatan</p> <p>23. Banyaknya Sekolah Mendapatkan Sosialisasi Tanggap Kebencanaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>24. Jumlah Organisasi, Lembaga Yang Terlibat Dalam Kebencanaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>25. Banyaknya Kegiatan Monev Kebencanaan dan Kedaduratan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>26. Banyaknya Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Barito Selatan</p> <p>27. Banyaknya Peralatan Pendukung angkutan Darat, Laut dan Udara Kabupaten Barito Selatan</p> <p>28. Banyaknya Pengungsi Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan</p> <p>29. Banyaknya Kerugian Akibat Bencana Kabupaten Barito Selatan</p> <p>30. Banyaknya Sistem Peringatan Dini Bencana Kabupaten Barito Selatan</p> <p>31. Prasarana dan Sarana Tanggap Darurat Kabupaten Barito Selatan</p> <p>32. Rekapitulasi Data Hotspot</p> |
| 29. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | <p>18. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Berdasarkan Kecamatan</p> <p>19. Jumlah Pemadaman Kebakaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kebakaran</p> <p>20. Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran Berdasarkan Jenis</p> <p>21. Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Kebakaran</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 22. Jumlah Kawasan Rawan Terhadap Bencana Kebakaran 23. Jumlah Personil Pemadam Kebakaran Berdasarkan Kelas-kelas Petugas Pemadaman Kebakaran 24. Jumlah Personil Pemadam Kebakaran Berdasarkan Status Kepegawaian 25. Jumlah Alat Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran 26. Jumlah Kejadian Kebakaran Dan Penyebab Kebakaran 27. Rekapitulasi Data Kebakaran Berdasarkan Kecamatan 28. Pencegahan Terjadinya Kebakaran Kepada Masyarakat 29. Jumlah Pertolongan Darurat Non Kebakaran RESCUE 30. Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 31. SAR Search And Rescue Terbatas 32. Pelatihan Dan Pembinaan Masyarakat 33. Jumlah Relawan Dan Satgas Kebakaran 34. Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api MPA |
| 30. | Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat | <ul style="list-style-type: none"> 8. Realisasi Fisik Dan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 9. Realisasi Penerimaan Pendapatan 10. Realisasi Pembangunan DiDaerah Yang Bersumber Dari DAK Yang DiKelola Oleh Perangkat Daerah 11. Rekapitulasi Pembangunan Di Daerah Yang Bersumber Dari APBN (Tugas Pembantuan, Urusan Bersama Dan |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | | <p>Dekonsentrasi)</p> <p>12. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Paket Non Strategis (>Rp50 Juta S.D Rp.200 Juta)</p> <p>13. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Paket Strategis (>Rp2,5 Miliar S.D Rp.50 Miliar)</p> <p>14. Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah (PSD) Atau Proyek Prioritas Daerah (PPD)</p> |
| 31. | Bagian Umum Sekretariat | <p>5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian-Bagian Pada Sekretariat Daerah</p> <p>6. Jumlah Kendaraan Dinas Berdasarkan Jenis Kendaraan</p> <p>7. Jumlah Peralatan Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah</p> <p>8. Jumlah Peralatan Elektronik Bagian Umum Sekretariat Daerah</p> |
| 32. | Bagian Pemerintahan Sekretariat | <p>9. Banyaknya Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>10. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>11. Daftar Bupati dan Wakil Bupati dari masa ke masa Kabupaten Barito Selatan</p> <p>12. Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>13. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>14. Banyaknya Kelurahan/Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>15. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut kecamatan Kabupaten Barito</p> |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| | | <p>Selatan</p> <p>16. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 33. | Bagian Organisasi Sekretariat | <p>11. Jumlah Standar Pelayanan Yang Disusun Unit Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>12. Jumlah Standar Operasional Prosedur Yang Disusun Unit Kerja</p> <p>13. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>14. Nilai Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>15. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</p> <p>16. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah</p> <p>17. Indeks Repormasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>18. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah</p> <p>19. Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Unit Kerja Pemerintah Daerah</p> <p>20. Indeks Implementasi Berakhlak Pemerintah Daerah</p> |
| 34. | Bagian Hukum Sekretariat | <p>5. Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Daerah</p> <p>6. Statistik Status Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>7. Statistik Status Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan</p> <p>8. Penanganan Kasus yang diFasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> |
| 35. | Bagian Perekonomian dan SDA | <p>3. Sambungan Listrik Per Desa/Kelurahan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>4. Anggaran Belanja Untuk</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi |
| 36. | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | <p>4. Banyaknya Proyek Pembangunan yang telah diRealisasikan menurut Kecamatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Data Jumlah dan Nilai Tender Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 37. | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat | <p>11. Jumlah Materi Pelayanan Informasi Melalui Media Daring</p> <p>12. Jumlah Kegiatan Yang Dihadiri Pimpinan Daerah Perbulan</p> <p>13. Jumlah Pegawai Protokol Berdasarkan Keahlian (Jabatan)</p> <p>14. Jumlah Kegiatan Kenegaraan</p> <p>15. Jumlah Kegiatan Kedinasan</p> <p>16. Jumlah Kunjungan Pejabat Pusat/Provinsi Yang DiFasilitasi</p> <p>17. Jumlah Pendampingan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati</p> <p>18. Jumlah Penyusunan Naskah Acara/Protokol Daerah</p> <p>19. Jumlah Naskah Pelayanan Informasi Dan Kehumasan Dalam Bentuk Pidato Perbulan</p> <p>20. Jumlah Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah</p> |
| 38. | Bagian Kesejahteraan Sekretariat | <p>4. Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Barito Selatan</p> <p>5. Bantuan Hibah Pembangunan/Renovasi Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Kabupaten Barito Selatan</p> <p>6. Anggaran Belanja Untuk Program Kegiatan Teknologi Informasi Komunikasi</p> |
| 39. | Kecamatan Dusun Selatan | 13. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| | | <p>Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Dusun Selatan Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>16. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>17. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>18. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>19. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>20. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>21. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>22. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Selatan Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>23. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>24. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Selatan</p> |
| 40. | Kecamatan Dusun Utara | <p>13. Jumlah Perlindungan Masyarakat</p> |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| | | <p>(LINMAS) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Dusun Selatan Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>16. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>17. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Selatan Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>18. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>19. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>20. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Selatan Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>21. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>22. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Selatan Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>23. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Selatan</p> <p>24. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Selatan</p> |
| 41. | Kecamatan Karau Kuala | 13. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Karau Kuala Menurut Kelurahan/Desa |

| | | |
|-----|-----------------------|---|
| | | <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Karau Kuala Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan Karau Kuala Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>16. Jumlah Penduduk Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>17. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Karau Kuala Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>18. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Karau Kuala</p> <p>19. Jumlah Pegawai Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>20. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Karau Kuala Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>21. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karau Kuala</p> <p>22. Jumlah Konflik Kecamatan Karau Kuala Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>23. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Karau Kuala</p> <p>24. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Karau Kuala</p> |
| 42. | Kecamatan Dusun Hilir | <p>13. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan</p> |

| | | |
|-----|-------------------|--|
| | | <p>Dusun Hilir Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>16. Jumlah Penduduk Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>17. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Dusun Hilir Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>18. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dusun Hilir</p> <p>19. Jumlah Pegawai Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>20. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Dusun Hilir Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>21. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dusun Hilir</p> <p>22. Jumlah Konflik Kecamatan Dusun Hilir Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>23. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Dusun Hilir</p> <p>24. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Dusun Hilir</p> |
| 43. | Kecamatan Jenamas | <p>13. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Telah</p> |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | <p>Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>16. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>17. Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>18. Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>19. Jumlah Pegawai Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Status Kepegawaian</p> <p>20. Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Pelayanan</p> <p>21. Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>22. Jumlah Konflik Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>23. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> <p>24. Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Gunung Bintang Awai</p> |
| 44. | Kecamatan Gunung Bintang Awai | <p>13. Jumlah Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa</p> <p>14. Jumlah Pos Kamling Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Telah Terbentuk Berdasarkan Kondisi</p> <p>15. Jumlah Penduduk Kecamatan</p> |

| | | |
|--|-----|---|
| | | Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa |
| | 16. | Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelurahan/Desa |
| | 17. | Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kecamatan Gunung Bintang Awai Menurut Kelurahan/Desa |
| | 18. | Jumlah Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Gunung Bintang Awai |
| | 19. | Jumlah Pegawai Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Status Kepegawaian |
| | 20. | Jumlah Pelayanan Publik Kecamatan Gunung Bintang Awai Berdasarkan Jenis Pelayanan |
| | 21. | Jumlah Kegiatan Aktif Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai |
| | 22. | Jumlah Konflik Kecamatan Gunung Bintang Awai Yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
| | 23. | Jumlah Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Gunung Bintang Awai |
| | 24. | Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Berdasarkan Periode Jabatan Kecamatan Gunung Bintang Awai |

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

f. Tingkat keamanan informasi pemerintah sebagai berikut:

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

| IKK OUTCOME | IKK | Rumus/ Perhitungan | Capaian | Sumber Data |
|---------------------------------------|-----|---|---------|----------------------|
| Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 2.t | $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100 \%$ $\frac{324}{645} \times 100 = 50 \%$ | 50,23 % | Bidang Kominfosantik |

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN



MARKANI, S.K.M., M.K.M

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671205 199203 1 018

Catatan :

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesiapan keamanan informasi berada pada kategori baik. Hal ini disebabkan karena yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 584 (lima ratus delapan puluh empat) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima)



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan penerapan SNI ISO/IEC 27001, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan penilaian berdasarkan Indeks Keamanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Penilaian Indeks Keamanan Informasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMPI adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko.
4. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
5. Indeks Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di organisasi.
6. Asesor Indeks KAMI adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian Indeks KAMI.
7. Sertifikat Indeks KAMI adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penilaian Indeks KAMI merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kesiapan PSE dalam menerapkan SNI ISO/IEC 27001.
- (2) Penyelenggaraan penilaian Indeks KAMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian mandiri berdasarkan Indeks KAMI;
 - b. pengajuan permohonan verifikasi hasil penilaian mandiri;
 - c. verifikasi hasil penilaian mandiri; dan
 - d. penetapan verifikasi hasil penilaian Indeks KAMI.

Pasal 3

- (1) Penilaian mandiri berdasarkan Indeks KAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PSE sesuai dengan Indeks KAMI versi terkini yang ada di situs web resmi BSSN.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi aspek Indeks KAMI paling sedikit meliputi:
 - a. tata kelola;
 - b. pengelolaan risiko;
 - c. kerangka kerja keamanan informasi;
 - d. pengelolaan aset; dan
 - e. teknologi dan keamanan informasi.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan kebijakan, prosedur, fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengelolaan keamanan informasi.
- (4) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan, prosedur manajemen risiko, risk register, tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko keamanan informasi.
- (5) Kerangka kerja keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan dokumen keamanan informasi maupun efektifitas penerapannya yang meliputi dokumen *business continuity plan*, *disaster recovery plan*, pengelolaan insiden keamanan informasi, pengembangan perangkat lunak yang aman, strategi penerapan

keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan informasi.

- (6) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut serta memeriksa terkait pengamanan fisik.
- (7) Teknologi dan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Pasal 4

- (1) Evaluasi aspek Indeks KAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pemeriksanaan penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur.
- (2) Masing-masing pertanyaan pada setiap aspek Indeks KAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 4 (empat) pilihan jawaban:
 - a. tidak dilakukan;
 - b. dalam perencanaan;
 - c. dalam penerapan atau penerapan sebagian; dan
 - d. diterapkan secara menyeluruh.
- (3) Tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a jika PSE tidak memiliki dokumen kebijakan dan/atau prosedur.
- (4) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b jika PSE telah menyusun dokumen kebijakan dan/atau prosedur tetapi belum ditetapkan.
- (5) Dalam penerapan atau penerapan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c jika PSE telah menetapkan dokumen kebijakan dan/atau prosedur ~~dan telah ditetapkan secara formal akan~~ tetapi belum diterapkan secara menyeluruh oleh PSE.
- (6) Diterapkan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d jika PSE telah menetapkan dokumen

kebijakan dan/atau prosedur ~~dan telah ditetapkan secara formal~~ serta diterapkan secara menyeluruh oleh PSE.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan verifikasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disampaikan oleh PSE secara tertulis kepada Kepala BSSN.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Indeks KAMI yang telah diisi oleh PSE;
 - b. dokumen kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - c. informasi narahubung PSE.

Pasal 6

- (1) Verifikasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. verifikasi kelengkapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. verifikasi penerapan dokumen kebijakan dan/atau prosedur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan skor akhir yang menunjukkan tingkat kesiapan PSE dalam pemenuhan kriteria SNI ISO/IEC 27001.
- (4) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. cukup baik;
 - c. pemenuhan kerangka kerja dasar; dan
 - d. tidak layak.
- (5) Tingkat kesiapan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh jika:
 - a. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori rendah mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada

- rentang 536 (lima ratus tiga puluh enam) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima);
- b. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 584 (lima ratus delapan puluh empat) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima); atau
 - c. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori strategis mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 610 (enam ratus sepuluh) sampai dengan 645 (enam ratus empat puluh lima).
- (6) Tingkat kesiapan cukup baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperoleh jika:
- a. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori rendah mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 313 (tiga ratus tiga belas) sampai dengan 535 (lima ratus tiga puluh lima);
 - b. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 456 (empat ratus lima puluh enam) sampai dengan 583 (lima ratus delapan puluh tiga); atau
 - c. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori strategis mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 536 (lima ratus tiga puluh enam) sampai dengan 609 (enam ratus sembilan).
- (7) Tingkat kesiapan pemenuhan kerangka kerja dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperoleh jika:
- a. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori rendah mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 175 (seratus tujuh puluh lima) sampai dengan 312 (tiga ratus dua belas);
 - b. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampai dengan 455 (empat ratus lima puluh lima); atau
 - c. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori strategis mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sampai dengan 535 (lima ratus tiga puluh lima).

- (8) Tingkat kesiapan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diperoleh jika:
- a. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori rendah mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat);
 - b. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori tinggi mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 272 (dua ratus tujuh puluh dua); atau
 - c. PSE yang memiliki Sistem Elektronik kategori strategis mendapatkan skor akhir penilaian Indeks KAMI pada rentang 0 (nol) sampai dengan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga).

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim Asesor Indeks KAMI BSSN.
- (2) Tim Asesor Indeks KAMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai BSSN; dan/atau
 - b. pihak lain.
- (3) Tim Asesor Indeks KAMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

Asesor Indeks KAMI di tetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 9

- (1) Penetapan verifikasi hasil penilaian Indeks KAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk laporan yang memuat:
 - a. tingkat kesiapan PSE dalam menerapkan SNI ISO/IEC 27001; dan
 - b. deskripsi kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi seluruh aspek Indeks KAMI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BSSN kepada PSE.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Sertifikat Indeks KAMI bagi PSE yang memperoleh tingkat kesiapan baik atau cukup baik.

Pasal 10

Pendanaan kegiatan verifikasi penilaian Indeks KAMI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu (Tahun 2024 dan Tahun 2025)

Hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 berada dalam katagori “**Sangat tinggi**” dengan capaian rata-rata diatas 100 %. Capaian kinerja yang masuk kategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan selaku instansi pengembang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Barito Selatan sedangkan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 tidak jauh beda berada di Kategori **sangat tinggi, dan dari segi nilai kinerja lebih meningkat dibanding tahun 2024**, nilai Indikator kinerja kategori tinggi sesuai dengan pengukuran ordinal interval nilai antara 75,00 – 90,00.

Nilai Evaluasi Kinerja Tahun 2025 lebih meningkat antara lain indikator kinerja Nilai sakiip termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Tahun 2024 yaitu 65,35 (baik) menjadi 66,55 (baik), indikator kinerja nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga tidak terdapat capaian nilai SPIP yang dapat dilaporkan. Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yaitu 2,61 dan pada Tahun 2025 mendapat indeks 4,01, namun indikator kinerja utama (IKU) ini penentuan target keliru pada RPJMD tahun 2025 sebesar 79, pada versi PAN-RB katagori penilaian hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggraan Pelayanan Publik seperti tabel yang disajikan di bawah ini

| INDEKS | KATEGORI |
|-----------|----------|
| 4,51-5,00 | A |
| 4,01-4,50 | A- |
| 3,51-4,00 | B |
| 3,01-3,50 | B- |
| 2,51-3,00 | C |
| 2,00-2,51 | C- |
| 1,51-2,00 | D |
| 1,01-1,50 | E |
| 0,10-1,00 | F |

Sumber : PAN-RB NO 3 Tahun 2026

Indeks Keterbukaan Informasi Publik termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 sebesar 78,38 (cukup informatif) menjadi Informatif dengan indeks 90,19 Pada Tahun 2025. Indikator Kinerja persentase Proporsi Desa/ Kelurahan yang memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 65,59%

Indikator kinerja indeks SPBE termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 sebesar 3,20 Menjadi 3,67 pada tahun 2025

Indikator kinerja indeks Pembangunan Statistik termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 sebesar 2,79 dan pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian.

Indikator kinerja nilai Tingkat kematangan keamanan informasi termasuk merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2024 pencapaian indeks Tingkat I Menjadi indeks Tingkat I+ pada tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Selatan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, selama 5 (Lima) tahun kedepan.

Tahun 2024 dan 2025 Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan sudah mencakup tiga urusan:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Publik
2. Urusan Pemerintahan Bidang Informasi Publik dan Statistik
3. Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Persandian
4. Urusan Pemerintahan Bidang E-Government

Tabel Pencapai Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.1.3.1 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Capaian |
|-----|--|---|----------|---------------|-------------------------|
| 01. | Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel | Nilai Sakip | Kriteria | 62,00/Baik | 65,35/Baik |
| 02. | Meningkatnya Pengembangan E-Government Menuju Smart City | Indeks SPBE | Indeks | 2,8/ Baik | 3,20/Baik |
| 03. | Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik | Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | Kriteria | 90 Informatif | 78,38/ Cukup Informatif |
| 04. | Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks | 2,2/Cukup | 2,9/Baik |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|--------|------------|-----------------------------|
| 05. | Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian | Indeks Keamanan Informasi | Indeks | 1,3/ Cukup | 2 /Baik (Penilaian Mandiri) |
|-----|---|---------------------------|--------|------------|-----------------------------|

Tabel 3.1.3. 2.:

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2025 | Capaian |
|----|---|--|--------|-------------|-------------|
| 01 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DiskominfoSP | Indeks | 66 / Baik | 66,55 |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | Nilai | 3,19 | - |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 2,50 | 4,01 |
| 04 | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 78,50 | 90,19 |
| 05 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | Persen | 40,00 | 65,59 |
| 06 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 2,8 / Baik | 3,67 |
| 07 | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,90 | - |
| 08 | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Nilai | Tingkat I | Tingkat I + |

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Dokumen Review RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2029 telah menetapkan target kinerja selama 5 tahun, dimana target jangka menengah di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tidak tercantum atau tertuang karena Renstra berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 Tahun bukan berdasarkan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Renstra ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.

Dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Realisasi Kinerja untuk Tahun 2025 adalah awal dari tahun pembuatan laporan kinerja Dinas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan di teruskan untuk empat tahun kedepan.

Target Kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 yang tertuang di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 3.1.4.1 indikator Kinerja Utama versi RPJMD

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|------|-------------------------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 0 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 85 |

Tabel 3.1.4.2 indikator Kinerja Utama versi Penilaian Target DiskominfoSP

| No | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | |
|----|-------------------------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 0 | 2,5 | 2,63 | 2,75 | 2,88 | 3 | 3,13 |

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan, antara lain:

1. Belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah hal ini disebabkan karena dinamika pedoman perencanaan dan penganggaran dari Pemerintah Daerah yang selalu berubah.
3. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan
5. Kurangnya Penganggaran untuk Program /Kegiatan sehingga target tidak tercapai.
6. Adanya Penambahan Indikator Dalam Perhitungan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik.
7. Belum ada satu kebijakan yang mengatur Standar Data Statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan

tetap dapat meraih presentase target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
2. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran Pembangunan daerah secara keseluruhan
3. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dengan Perangkat Daerah pengampu Program.
4. Optimalisasi Koordinasi dengan kementerian Pembangunan Jaringan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan
5. Koordinasi yang lebih intensif dengan mitra perangkat daerah dalam hal perencanaan dan Pengendalian.
6. Adanya kontrak kerjasama dengan media massa untuk publikasi Pembangunan Daerah.
7. Dukungan Pemerintah Daerah baik dari segi sport, anggaran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

Alternatif/solusi dalam pencapaian sasaran adalah:

1. Penguatan di bidang yang merupakan sasaran strategis dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.
2. Anggaran yang memadai untuk terlaksana program kegiatan dengan baik.
3. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Profesional.
4. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi
5. Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrumen yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD dan RKPD
6. Sarana dan Prasarana yang mendukung tercapainya kinerja.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (99,95%) dengan penyerapan anggaran yang kecil 67,12 % menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi, namun capaian Kinerja sangat baik. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel : 3.1.6.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Tahun 2025

| No | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-----|---|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | Target | Capaian (Rp) | Realisasi (%) | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) |
| 01. | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Nilai Sakip | 66 / Baik | B (66,55) | 100,75 | 107.057.000,- | 75.331.400,- | 70,36 |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | Nilai | 3,19 | - | 1.391.200.000,- | 933.810.481,- | 67,12 |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 2,50 | 160,4 | 318.902.000,- | 280.253.222,- | 87,88 |
| 04. | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 78,50 | 114,89 | 318.902.000,- | 280.253.222,- | 87,88 |
| 05. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | Persen | 40,00 | 163,97 | 25.204.000,- | 19.663.000,- | 78,01 |
| 06. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 2,8 / Baik | 131,07 | 80.000.000,- | 75.602.419,- | 94,50 |
| 07. | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,90 | - | 58.500.000,- | 58.475.000,- | 99,95 |
| 08 | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Nilai | Tingkat I | Tingkat I+. | 20.484.000,- | 15.328.200,- | 74,83 |

Apabila dicermati secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.6.2 :
Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis | Program | Indikator Kinerja | Pagu | Realisasi | Persen |
|-----|---|---|--|------------------|------------------|--------|
| 01. | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DiskominfoSP | 13.347.392.785,- | 11.614.741.905,- | 87,01 |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | | | |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks Pelayanan Publik | 5.037.854.000,- | 4.846.002.550,- | 96,19 |
| 04. | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | | | |
| 05. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | 1.570.166.000,- | 1.531.116.248,- | 97,51 |
| 06. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | | Indeks SPBE | | | |
| 07. | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Statistik | 127.982.000,- | 122.932.200,- | 96,05 |
| 08 | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | 87.534.000,- | 70.108.112,- | 80,09 |

Analisis penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Efisiensi sebesar Rp. 1.732.650.880 atau 12,99 %.

Dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Efisiensi sebesar Rp 191.851.450 atau 3,81%. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Efisiensi sebesar Rp 39.049.752 atau 2,49 %, dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral efisiensi anggaran sebesar Rp.

5.049.800 atau 3,95 %, Terakhir Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi efisiensi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.425.888 atau 19,91 %.

Analisis efisiensi penyerapan anggaran yang paling kecil di Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Efisiensi sebesar Rp 39.049.752 atau 2,49 % dan analisis penyerapan anggaran yang paling besar Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi efisiensi penyerapan anggaran sebesar Rp 17.425.888 atau 19,91 %.

Tabel :3.1.6.3.

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi |
|-----|---|--|---------------------|-------------------------|-----------|
| 01. | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Nilai Sakip | 100,75 | 87,01 | 86,36 % |
| 02 | Meningkatnya integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | 114,29 | 87,01 | 76,13 |
| 03 | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | 160,4 | 87,88 | 54,78 |
| 04. | Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 114,89 | 87,88 | 76,49 |
| 05. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang memiliki sinyal Internet Telepon Seluler / Handphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | 163,97 | 97,51 | 59,46 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| 06. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | - | 97,51 | - |
| 07. | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | - | 96,05 | - |
| 08. | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | 131,07 | 80,09 | 61,10 |

Dari tabel Analisis Anggaran terhadap capaian kinerja diatas tingkat efisiensi anggaran terbesar di program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 86,36%, disusul Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 76,49%, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 61,10%, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 59,46% dengan capaian kinerja yang sangat tinggi rata-rata diatas 100 % hal ini merupakan prestasi yang sangat baik bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan di tahun Anggaran 2025.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target diantaranya:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terkait dengan sasaran strategis Meningkatkan integritas, transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah, indikator kinerja Nilai Sakip, dengan capaian kinerja kriteria B (baik) dengan skor nilai 66,55.

Pencapaian keberhasilan sangat luar biasa untuk tahun 2024 dan tahun 2025 karena nilai sakip untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan dari beberapa tahun ke tahun meningkat dan sangat efisien dengan dukungan anggaran yang baik dan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja juga lebih baik sehingga mendukung penambahan nilai capaian indikator kinerja.

- b. Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 1. Pengelolaan Pemerintahan yang berbasis elektronik, dilihat dari pekerjaan menjadi efektif dan efisien, Sumber daya Aparatur menjadi smart.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Pemerintah Daerah memudahkan komunikasi antar wilayah di Kabupaten Barito Selatan
 3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi dengan masuknya Investor ke Daerah di dukung dengan fasilitas layanan jaringan komunikasi yang baik.
 4. Aktivitas masyarakat berinteraksi lewat media lebih baik dan lancar didukung dengan mudahnya akses jaringan telekomunikasi.
- c. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
1. Tersebarnya informasi Pembangunan secara merata di seluruh Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 2. Menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengelolaan pelayanan informasi semakin lebih baik.
 3. Menjalankan Perintah Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Bagi Pemerintah bermanfaat antara lain:
1. Sebagai bahan masukan dalam publikasi data dan informasi pembangunan daerah;
 2. Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 3. Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan.
- Bagi Masyarakat bermanfaat antara lain:
1. Sebagai Informasi Kinerja Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa;
 3. Sebagai Bukti Keterbukaan Informasi Pemerintah
- e. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamatan Informasi
Berperan melakukan upaya untuk melindungi keamanan informasi milik pemerintah, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan nasional.

3.1.8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik saat ini dituntut berjalan dengan efektif dan efisien. Masyarakat sangat berharap terhadap tingginya tingkat respon dan layanan yang semakin bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel.

Adapun untuk mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah pada umumnya dan Khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Inovasi yang dilaksanakan antara lain:

1. Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2023 di tunjuk sebagai Kabupaten satu-satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan program smart city dimana di dalam program smart city (kota cerdas) melaksanakan inovasi-inovasi sangat mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
2. Inovasi Simdatik yaitu Inovasi terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang didukung oleh teknologi informasi berupa sistem informasi satu data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menghimpun data sektoral yang ada di Kabupaten Barito Selatan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan pembangunan Kabupaten Barito Selatan.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan telah menerapkan SPBE dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan SPBE.
4. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Barito Selatan adalah Tim yang dibentuk untuk menyediakan layanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber di Kabupaten Barito Selatan yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan serta aktivitas insiden keamanan siber.
5. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan suatu alat untuk menilai pengelolaan keuangan suatu daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab atas transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui publikasi, dokumen keuangan daerah yang tercakup dalam dimensi 3 IPKD.
6. Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 telah melaksanakan inovasi layanan keterbukaan informasi publik melalui pengembangan Website PPID Kabupaten Barito Selatan. Website PPID ini menjadi sarana utama penyediaan dan pelayanan informasi publik yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan Website PPID tersebut mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menunjang kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik

7. Kabupaten Barito Selatan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan juga melaksanakan inovasi pelayanan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi/website SP4N-LAPOR!. SP4N-LAPOR! berfungsi sebagai kanal resmi pengaduan dan aspirasi masyarakat yang terintegrasi secara nasional, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan, saran, dan pengaduan secara cepat, mudah, dan transparan. Inovasi ini mendukung peningkatan partisipasi masyarakat, percepatan tindak lanjut pengaduan, serta peningkatan kinerja dan responsivitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan analisis yang menelaah aspek keuangan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan pada APBD Tahun 2025 sebesar **Rp 20.170.928.785,-** dengan realisasi sebesar **Rp 18.180.223.515,-** dan akumulasi persen (**90,13 %**)

Tabel 3.2.1

Program dan Realisasi Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Uraian Program & Kegiatan | | Rencana Anggaran | Pelaksanaan/ Realisasi | % |
|-----------|--|---|------------------|------------------------|-------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | 01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.057.000,- | 36.295.800,- | 97,95 |
| | 01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.000.000,- | 7.000.000,- | 70,00 |
| | 01.03 | Koordinasi dan Susunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 10.000.000,- | 7.894.000,- | 78,94 |
| | 01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA | 10.000.000,- | 2.860.000,- | 28,60 |
| | 01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA | 10.000.000,- | 2.530.000,- | 25,30 |
| | 01.06 | Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.000.000,- | 18.751.600,- | 62,51 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.013.169.235,- | 3.175.002.829,- | 79,11 |
| | 02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 20.000.000,- | 12.773.000,- | 63,87 |
| | 02.06 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 206.840.000 | 168.136.000,- | 81,29 |
| | 02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 20.000.000,- | 19.295.000,- | 96,48 |
| | 02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10.000.000,- | 5.419.000,- | 54,19 |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | 03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.000.000,- | 12.944.200,- | 86,29 |
| | 03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.000.000,- | 18.940.000,- | 75,76 |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | 05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adributnya | 32.250.000,- | 31.979.100,- | 99,16 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------|
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | 06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34.280.050,- | 20.278.050,- | 58,57 |
| | 06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 103.249.900,- | 79.583.249,- | 77,08 |
| | 06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 33.852.800,- | 5.886.000,- | 17,39 |
| | 06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 53.580.000,- | 16.100.200,- | 30,05 |
| | 06.06 | Penyediaan Bahan Logistik | 214.416.800,- | 142.896.229,- | 66,64 |
| | 06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 124.699.400,- | 98.998.000,- | 79,39 |
| | 06.09 | Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 208.354.000,- | 184.818.025,- | 88,70 |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | | |
| | 07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.600.000,- | 32.318.000,- | 93,40 |
| | 07.05 | Pengadaan Mebel | 202.598.000,- | 200.750.147,- | 99,09 |
| | 07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | 7.217.600.000,- | 6.800.079.997,- | 94,22 |
| | 07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 139.963.600,- | 123.632.429,- | 88,33 |
| | 07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.032.000,- | 54.650.000,- | 94,17 |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | 08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000,- | 7.990.000,- | 99,88 |
| | 08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 155.000.000,- | 105.401.950,- | 68,00 |
| | 08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 212.850.000,- | 147.200.000,- | 69,16 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------|-----------------|-------|
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | 09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan atau kendaraan dinas jabatan | 62.000.000,- | 46.125.200,- | 74,40 |
| | 09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 10.000.000,- | 5.490.000,- | 54,90 |
| 9. | Penataan Organisasi | | | | |
| | 13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 25.000.000,- | 18.246.400,- | 72,99 |
| II | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | | |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 01.14 | Relasi Media | 4.266.822.000,- | 4.156.064.551,- | 97,40 |
| | 01.15 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 50.000.000,- | 43.705.100,- | 87,41 |
| | 01.16 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 7.710.000,- | 5.655.073 | 73,35 |
| | 01.17 | Pelayanan Informasi Publik | 318.902.000,- | 280.253.222,- | 87,88 |
| | 01.19 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | 84.420.000,- | 64.291.200,- | 76,16 |
| | 01.21 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 80.000.000,- | 74.404.405,- | 93,01 |
| | 01.23 | Penyusunan Konten | 200.000.000,- | 191.801.872,- | 95,90 |
| | 01.24 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | 30.000.000,- | 29.827.200,- | 99,42 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| III | Program Aplikasi Informatika | | | | |
| 1. | Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemda Kab/Kota | | | | |
| | 01.04 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 25.204.000,- | 19,663,000,- | 78,02 |
| 2. | Pengelolaan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 02.15 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 80,000,000,- | 78.534.619,- | 98,17 |
| | 02.18 | Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | 25.574.000,- | 23.312.798,- | 91,16 |
| | 02.19 | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | 30.372.000,- | 26.656.765,- | 87,73 |
| | 02.20 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah daerah | 150.000.000,- | 144.018.751,- | 96,01 |
| | 02.21 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 85.808.000,- | 85.736.168,- | 99,92 |
| | 02.23 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | 28.324.000,- | 24.670.400,- | 87,10 |
| | 02.24 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 54.252.000,- | 52.862.597,- | 97,44 |
| | 02.27 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | 820.632.000,- | 809.087.398,- | 98,59 |
| | 02.29 | Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | 30.000.000,- | 27.554.163,- | 91,85 |
| | 02.30 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | 240.000.000,- | 239.029.589,- | 99,60 |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | |
| | 01.08 | Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 39.482.000,- | 35.960.800,- | 91,08 |
| | 01.09 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 58.500.000,- | 58.475.000,- | 99,96 |
| | 01.09 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | 30.000.000,- | 28.496.400,- | 94,99 |
| V | 21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN DAN PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Persandiaan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 16.222.000,- | 13.476.200,- | 83,07 |
| | 01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 20.484.000,- | 15.328.200,- | 74,83 |
| | 01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 20.180.000,- | 16.609.712,- | 82,31 |
| 2. | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | 01.01 | Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 30.648,000,- | 24.694.000,- | 80,57 |
| | Jumlah | | 20.170.928.785,- | 18.180.223.515,- | 90,13 |

Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sebesar Rp **18.180.223.515,-** dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2025

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Belanja Operasi | 12.400.817.185,- | 10.864.021.543,- | 87,60 |
| | 5.1.1 Belanja Pegawai | 4.013.169.235,- | 3.175.002.829,- | 79,11 |
| | 5.1.1 Belanja Barang dan Jasa | 8.387.647.950,- | 7.689.018.714,- | 91,67 |
| 2 | Belanja Modal | 7.770.111.600,- | 7.316.201.972,- | 94,15 |
| | 5.2.2. Belanja Modal Aset Tetap Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.770.111.600,- | 7.316.201.972,- | 94,15 |
| | TOTAL BELANJA | 20.170.928.785,- | 18.180.223.515,- | 90,13 |

Berdasarkan tabel 3.2.2 diatas pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebesar Rp **20.170.928.785,-** dengan realisasi pencapaian anggaran sebesar Rp **18.180.223.515,-** dan akumulasi persen (**93,13%**), untuk belanja operasi pagu anggaran Rp **12.400.817.185,-** realisasi sebesar Rp **10.864.021.543,-** dan akumulasi persen (**87,60%**) belanja modal pagu anggaran Rp **7.770.111.600,-** realisasi sebesar Rp **7.316.201.972,-** dan akumulasi persen (**94,15%**)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2025 memuat laporan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 yang dituangkan menjadi 5 target sasaran strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan ini di maksudkan sebagai pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat di pergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh profesionalnya kinerja para pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan yang membawa dampak secara luas kepada Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan terkait pencapaian target kinerja antara lain, infrastruktur baik berupa sarana dan prasarana untuk peningkatan keamanan informasi, sumber daya manusia berbasis ilmu teknologi

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola program/kegiatan untuk pencapaian kinerja urusan bidang.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kesekretariatan dan bidang agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARKANI, S.K.M.,M.K.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**
Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 13 Oktober 2025



PIHAK PERTAMA,

MARKANI, S.K.M.,M.K.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Kabupaten : Barito Selatan
SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| | Program | Anggaran | Sumber Dana |
|----|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 13.347.392.785,- | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 2. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 5.037.854.000,- | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 3. | Program Aplikasi Informatika | Rp. 1.570.166.000,- | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 127.982.000,- | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| 5. | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Rp. 87.534.000,- | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

Buntok, 13 Oktober 2025



PIHAK PERTAMA,

MARKANI, S.K.M., M.KM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671205 199203 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Kabupaten :Barito Selatan

SKPD :Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|----------|
| 01. | Meningkatnya Integritas, tansparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DiskominfoSP | Indeks | 66/Baik |
| 02. | Meningkatnya Integritas, tansparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Daerah | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DiskominfoSP | Nilai | 3,19 |
| 03. | Integrasi Standar Pelayanan dan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 2,50 |
| 04. | Meningkatnya Jangkuan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Indeks | 78,50 |
| 05. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Proporsi Desa / Kelurahan yang Memiliki Sinyal Internet Telepon Seluler / Hanphone dengan kondisi Sinyal Sangat Kuat | Persen | 40,00 |
| 06. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 2,8/Baik |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|-----------|
| 07. | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | Indeks Pembangunan Statistik | Indeks | 2,90 |
| 08. | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | Nilai | Tingkat 1 |

Buntok, 13 Oktober 2025



PIHAK PERTAMA,

MARKANI, S.K.M., M.KM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19671205 199203 1 018

2. Foto Penghargaan Pemerintah Daerah Mendapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.202.058.3.0003 | Bebanja Modal: Kebutuhan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 42.380.000,00 |
| 5.202.058.3.0004 | Bebanja Modal: Sewa Gedung/Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890.000,00 |
| 5.202.058.3.0005 | Bebanja Modal: Sewa Tanah/Bangunan/Pejabat | 55.745.500,00 | 55.654.950,00 | 99,75 | 0,00 |
| 5.202.058.3.0007 | Bebanja Modal: Lampsiran dan Jasa Pejabat | 20.025.000,00 | 20.208.000,00 | 100,90 | 28.060.000,00 |
| 5.202.06 | Bebanja Modal: Alat Statistik, Dokumentasi, dan Penerjemahan | 7.220.200.000,00 | 6.822.000.000,00 | 94,48 | 670.280.000,00 |
| 5.202.06.1 | Bebanja Modal: Alat Statistik | 7.220.200.000,00 | 6.822.000.000,00 | 94,48 | 670.280.000,00 |
| 5.202.06.1.0001 | Bebanja Modal: Perawatan Statistik: Audio | 1.750.000,00 | 1.675.000,00 | 95,71 | 550.000,00 |
| 5.202.06.1.0002 | Bebanja Modal: Perawatan Statistik: Video dan Foto | 7.200.000.000,00 | 6.746.200.000,00 | 93,69 | 280.000.000,00 |
| 5.202.06.1.0003 | Bebanja Modal: Perawatan Statistik: Gambar | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 60.000,00 |
| 5.202.06.1.0004 | Bebanja Modal: Perawatan Penerjemahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 5.202.06.1.0005 | Bebanja Modal: Perawatan Penerjemahan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000.000,00 |
| 5.202.07 | Bebanja Modal: Transportasi | 173.070.000,00 | 146.473.000,00 | 84,62 | 634.303.500,00 |
| 5.202.07.1 | Bebanja Modal: Transportasi Darat | 130.000.000,00 | 110.000.000,00 | 84,62 | 280.812.500,00 |
| 5.202.07.1.0001 | Bebanja Modal: Personal Computer | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 100,00 | 260.812.500,00 |
| 5.202.07.1.0002 | Bebanja Modal: Transportasi Udaris Lainnya | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.202.07.1.0003 | Bebanja Modal: Perawatan Komputer | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 50,00 | 100.000.000,00 |
| 5.202.07.1.0004 | Bebanja Modal: Perawatan Personal Computer | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5.202.07.1.0005 | Bebanja Modal: Perawatan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.488.000,00 |
| | JUMLAH REALISASI MODAL | 12.790.211.800,00 | 12.056.201.000,00 | 94,25 | 1.302.400.000,00 |
| | JUMLAH REALISASI | 28.170.628.280,00 | 26.608.220.000,00 | 94,45 | 12.018.400.000,00 |
| | MURUPUNDASIS | 128.178.520.780,00 | 118.180.220.000,00 | 92,19 | 102.000.000,00 |

Kab. Banta Sebera, 6 Februari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

HABNAN,SKM,PHK
NIP. 84712051982024038

4. Lampiran IKK (Indeks Kinerja Kunci)

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2014 | TARGET TAHUN | | | | | |
|------|---|--------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) |
| 1. | 2.30 - Indeks PERSIPAT (Pelayanan Publik) KORPRIKAM (dan BOPHAK/PA) | | | | | | | | | |
| 2. | Persentase Layanan Publik yang dilaksanakan secara online dan | persen | % | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Persentase Peningkat Cerdas (PI) yang terhubung dengan sistem internet yang | persen | % | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | 2.31 - LPI (dan PERSIPAT) CEMERLANG | persen | persen | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Persentase Indikator yang menjadi | persen | % | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | 2.32 - LPI (dan PERSIPAT) (dan BOPHAK/PA) BERKUALITAS | | | | | | | | | |
| 7. | Persentase PO yang meningkatkan | persen | % | 74 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8. | Persentase PO yang meningkatkan | persen | % | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9. | 2.33 - LPI (dan PERSIPAT) (dan BOPHAK/PA) PERMANEN | | | | | | | | | |
| 10. | Target kemampuan pelayanan pemerintah | persen | % | 80,33 | 80,20 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 |